

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

MENUJU NEGARA KESATUAN : Negara Pasundan

oleh :

Helius Sjamsuddin

Edi S. Ekadjati

Ietje Marlina

Wiwi Kuswiah

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1992**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, September 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Buku "Menuju Negara Kesatuan : Negara Pasundan" merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1991/1992.

Buku ini memuat uraian tentang proses terbentuknya Negara Pasundan sebagai salah satu strategi dan taktik Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Kemudian diuraikan juga pelaksanaan pemerintahannya dan proses penyerahannya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

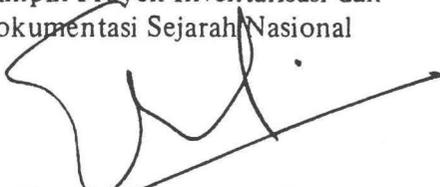
Penelitian dan penulisan "Menuju Negara Kesatuan : Negara Pasundan" merupakan studi awal dari serangkaian penelitian tentang "negara-negara bagian" buatan Belanda yang akan dikerjakan secara bertahap oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang me-

madai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, September 1992

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Sutjiatiningsih', written over a diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.

Dra. Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

PENGANTAR

Tahun-tahun antara 1946 sampai 1948 adalah salah satu episode yang cukup *crucial* dalam sejarah pembentukan persatuan dan kesatuan bangsa kita setelah para pendiri negara dan bangsa (*founding fathers*) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Antara tahun-tahun ini Belanda giat melakukan "gerakan federalisasi" yaitu membentuk apa yang di dalam buku-buku sejarah kita dikenal dengan "negara-negara boneka ciptaan Van Mook" sebagai suatu strategi dan taktik Belanda untuk dapat menguasai kembali wilayah jajahannya dahulu, Hindia Belanda. Gerakan Belanda ini merupakan antipode terhadap Republik Indonesia. Belanda menganggap bahwa Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sehingga tidak pantas untuk diajak bicara, atau menganggap bahwa Republik Indonesia itu sama sekali tidak pernah ada.

Sejak terbentuk "Negara Indonesia Timur" bulan Desember 1946 sebagai negara pertama dalam rangkaian ini sampai dengan "Negara Jawa Timur" yang terakhir bulan November 1948, terdapat sejumlah 15 "negara" dan "daerah istimewa" yang bermacam. Semuanya berasal dari wilayah Republik Indonesia yang direbut Belanda dengan kekerasan senjata. Penelitian dan penulisan kembali sejarah dari "negara-negara" dan/ atau "daerah-daerah istimewa" federal yang dibentuk Belanda itu perlu dilakukan bukan untuk "memfederalisasikan" Sejarah

Nasional Indonesia. Usaha-usaha penelitian dan penulisan ini dilakukan untuk mencoba melihat "sejarah dari dalam" dari negara-negara tersebut. Mengapa negaranegara semacam itu bisa dibentuk oleh Belanda? Faktor-faktor apa yang memudahkan pembentukannya atau menghambat pelaksanaannya? Motif-motif apa yang mendorong para *dramatic personae* berperan sebagaimana yang telah mereka perankan dalam negara-negara tersebut? Selain terdapat elemen-elemen sentrifugal sebagai daya desintegratif, mengapa masih juga terdapat elemen-elemen sentripetal yang mempunyai daya integratif dalam negara-negara tersebut, terutama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa dari Negara Republik Indonesia? Atau sejauh mana struktur masyarakat tertentu mendukung primordialisme, di mana awal dan di mana akhirnya?

Tulisan "Negara Pasundan" ini adalah salah satu dari usaha-usaha atas. Suatu penelitian dan penulisan kembali yang lebih mendalam dari pada apa yang sementara dapat dicapai oleh buku ini masih terbuka untuk dilakukan. Tulisan ini kami bagi atas lima bab. Bab I mengenai masyarakat Jawa Barat sebelum Tahun 1948, Bab II mengenai pembentukan Negara Pasundan, alasan dan prosesnya, Bab III mengenai pelaksanaan pemerintahan Negara Pasundan, praktek dan hambatan-hambatannya, Bab IV, kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bab V adalah Penutup.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga memungkinkan pelaksanaan penelitian dan penulisan buku ini kami mengucapkan terima kasih. Pertama, kepada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang telah memberikan dana penelitian. Kedua, kepada para petugas di Arsip Nasional Jakarta dan Arsip Daerah di Bandung yang telah menyediakan berkas-berkas bahan-bahan pertama (*primary sources*) tentang "Negara Pasundan", dan ketiga kepada mereka yang tidak ingin disebutkan namanya; mereka telah merasa puas dengan telah memberikan bantuan.

Para Penulis

Bandung, 25 Maret 1992

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar	v & vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Masyarakat Jawa Barat Sebelum Tahun 1948	1
1.1 Geografi	1
1.2 Demografi	4
1.3 Pemerintahan	6
1.4 Sosial Budaya dan Ekonomi	11
Bab II Pembentukan Negara Pasundan	21
1.2 Van Mook dan Gerakan Federal	21
2.2 Lahirnya Negara Pasundan	26
2.2.1 Negara Pasundan dari Suria Kartalegawa	28
2.2.2 Negara Pasundan Hasil Konferensi Jawa Barat	33

Bab	III Pelaksanaan Pemerintahan Negara Pasundan	48
3.1	Negara dan Parlemen Pasundan	48
3.2	Pemilihan Wali Negara	52
3.3	Pembentukan Kabinet Negara Pasundan ..	56
3.4	Pemerintahan dalam Praktek	66
3.5	Pengalaman Bernegara Federal	70
Bab	IV Kembali ke Negara Kesatuan	78
4.1	Penyerahan Pemerintahan Pasundan kepada RIS	78
4.2	Penyerahan Pemerintahan Komisaris Negara Pasundan kepada Pemerintah Republik Indonesia	82
Bab	V Penutup	88
	Daftar Bacaan	91
	Gambar	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. RAAM. Wiranatakusumah, wali negara dari Negara Pasundan.	96
2. RAAM. Suria Kartalegawa, mantan bupati Garut; memproklamasikan berdirinya "Negara Pasundan" dan mengangkat dirinya sebagai "presiden"	97
3. Demonstrasi rakyat Jawa Barat menentang pembentukan "Negara Pasundan "	98
4. Konferensi Malino (Ujung Pandang) di bawah Van Mook antara 16 -- 22 Juli 1946.	99
5. Konferensi Denpasar (Bali) di bawah Van Mook antara 18 -- 24 Desember 1946.	100
6. Demonstrasi PRP (Partai Rakyat Pasundan) dengan lambang "mahkota" (kroon) Belanda.	101
7. Reproduksi beberapa surat kabar tentang Suria Kartalegawa.	

BAB I

MASYARAKAT JAWA BARAT SEBELUM TAHUN 1948

1.1 Geografi

Jawa Barat, tempat Negara Pasundan berada, merupakan bagian dari daratan Pulau Jawa dan bagian dari gugusan kepulauan Nusantara. Letaknya berada pada posisi antara $5^{\circ}50$ — $7^{\circ}50$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48$ — $108^{\circ}48$ Bujur Timur. Luas wilayahnya adalah 46.890 km^2 atau kira-kira sepertiga bagian Pulau Jawa atau 2,46% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Wilayah ini sekarang secara administratif termasuk ke dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat yang masing-masing luasnya 590 km^2 dan 46.300 km^2 .

Secara geomorfologi, wilayah Jawa Barat dapat dibagi menjadi empat zone (bagian). Keempat zona dimaksud adalah (1) Zona Jakarta, (2), Zona Bogor, (3) Zona Bandung, dan (4) Zona Pegunungan Selatan. Bentuk zona-zona tersebut memanjang dari barat ke timur. Zona Jakarta terbentang sepanjang pesisir utara sejak dari Serang di barat hingga Cirebon di timur. Lebar zona ini sekitar 40 km. Tanahnya merupakan endapan alluvial yang terbentuk oleh aliran lahar dan sungai

dari daerah pegunungan di sebelah selatan dengan puncak-puncaknya antara lain Gunung Gede dan gunung Pangrango. Zona Bogor terbentang dari Rangkasbitung di sebelah barat hingga ke daerah Indramayu di sebelah timur, melalui Bogor, Purwakarta, Subang, dan Sumedang. Zona ini terdiri atas daerah lipatan tanah berbukit yang di sana-sini bukitnya berupa batuan keras. Zona Bandung merupakan daerah gunung berapi yang lokasinya terletak antara Zona Bogor dan Zona Pegunungan Selatan. Zona ini tanahnya merupakan endapan alluvial dan endapan vulkanis muda dari masa kuartar. Zona Pegunungan Selatan terbentang dari Pelabuhan Ratu di sebelah barat hingga Pulau Nusakambangan di sebelah timur. Lebar zona ini sekitar 50 km, tetapi makin ke arah timur makin menyempit.

Menurut fisiografinya, wujud wilayah Jawa Barat dapat dibedakan dalam dua macam daerah dimaksud adalah (1) dataran rendah alluvial di bagian utara dan (2) daerah pegunungan di bagian selatan. Perbandingan luas wilayah keduanya ialah 1 : 3. Dengan demikian, bagian terbesar wilayah Jawa Barat merupakan daerah pegunungan. Sehubungan dengan hal itu, jumlah gunung di wilayah Jawa Barat pun cukup banyak, seluruhnya lebih dari 30 buah. Sebagian dari gunung-gunung itu merupakan gunung berapi, sebagian lagi sudah lama tidak memperlihatkan kegiatan berapi, sebagian lagi sudah lama tidak memperlihatkan kegiatan berapi. Gunung-gunung di Jawa Barat berderet dari ujung barat ke ujung timur, sejak Gunung Krakatau, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari di Banten hingga Gunung Ciremai, dan Gunung Sawal di daerah perbatasan dengan Jawa Tengah. Wilayah Priangan memiliki jumlah gunung terbesar di Jawa Barat. Gunung berapi biasa mengeluarkan abu dan lahar yang lama-kelamaan dapat menyuburkan tanah, baik di wilayah pegunungan sendiri maupun di dataran rendah sebelah utara berkat pengendapan alluvial yang terbawa aliran sungai dan lava.

Wilayah pegunungan membentuk pula banyak aliran sungai yang mengalirkan air dari dataran tinggi ke dataran rendah sampai ke laut. Di sekitar gunung-gunung yang berhutan lebat muncul mata air yang lama-kelamaan membentuk aliran sungai.

Sungai-sungai di Jawa Barat bermula dari wilayah pegunungan di pedalaman, kemudian mengalir melalui dataran rendah di sebelah utara dan barat serta celah-celah dataran tinggi selatan, dan akhirnya bermuara di Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Indonesia. Sungai-sungai yang besar antara lain Cisanggarung, Cimanuk, Citarum, Ciliwung, Diujung, Cimandiri, dan Citanduy.

Berdasarkan orografis, yang tinggi daratannya diukur dari permukaan air laut, wilayah Jawa Barat dapat dibedakan dalam empat daerah, yaitu (1) daerah yang tingginya antara 0-10 m dari permukaan laut, (2) daerah yang tingginya antara 101 – 750 m, (3) daerah yang tingginya antara 751 -- 1500 m, dan (4) daerah yang tingginya lebih dari 1500 m. Daerah yang pertama disebut dataran rendah, kedua disebut dataran tinggi, ketiga disebut pegunungan, dan daerah keempat disebut gunung.

Tinggi permukaan tanah yang berbeda-beda dari permukaan air laut karena adanya dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan, yaitu antara 0 -- lebih dari 3000 m, menyebabkan suhu udara di wilayah ini berbeda-beda, walaupun secara umum sepanjang tahun termasuk suhu udaranya panas karena berada di daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa. Di daerah dataran rendah, terutama di sepanjang pesisir utara, suhu udara bisa mencapai lebih dari 20⁰ C, sedangkan di daerah pegunungan yang tingginya lebih dari 1500 m suhu udara bisa sampai di bawah 10⁰C.³

Perbedaan tinggi permukaan tanah dan suhu udara memungkinkan jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di wilayah ini bermacam-macam dan banyak jumlahnya. Di dataran rendah tumbuh dengan baik padi, tebu, jagung, kelapa, dan lain-lain, di dataran tinggi tumbuh karet, teh, kina, dan kopi di pegunungan tumbuh kayu-kayuan yang baik pohonnya seperti pinus dan rasamala.

Iklim di wilayah Jawa Barat sama dengan iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu iklim tropis dengan dua pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut pergantian berubah setiap enam bulan sekali. Pada musim hujan (September -- Februari), angin bertiup dari arah barat laut dan barat daya serta membawa uap air yang men-

datangkan hujan; sebaliknya, pada musim kemarau (Maret -- Agustus) angin bertiup dari arah timur laut dan tenggara (dataran Australia) sehingga terjadi musim kemarau, namun untuk wilayah Jawa Barat angin timur laut dan tenggara itu masih bisa mendatangkan hujan, sehingga jumlah curah hujannya dan juga lama musimnya lebih banyak dan lebih lama dari pada wilayah-wilayah lain. Bogor dipandang sebagai kota hujan, karena seringnya turun hujan sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata di wilayah Jawa Barat di atas 2000 mm, bahkan di beberapa daerah pesisir mencapai 3000 -- 5000 mm. Jumlah hari hujan setahun adalah 352 hari di dataran tinggi dan 138 hari di dataran rendah.⁴

Jenis tanah yang subur, curah hujan yang tinggi, dan variasi tinggi dataran yang banyak, memungkinkan Jawa Barat menjadi wilayah yang subur dan dapat ditumbuhi aneka macam tanaman dengan baik sehingga menjadi gudang makanan dan kegiatan agrobisnis di Indonesia. Di bagian dataran rendah Jawa Barat terhampar persawahan luas yang subur ditanami padi sejak dari daerah Serang di bagian barat hingga daerah Cirebon di bagian timur, di bagian dataran tinggi ditanami sayur-mayur serta tanaman untuk ekspor, terutama perkebunan teh, kina dan karet.

1.2 Demografi

Penduduk Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan etniknya yang mempunyai identitas kebudayaan dan wilayah pemukiman masing-masing. Dalam hal ini, bangsa Indonesia terdiri atas sukubangsa-sukubangsa yang jumlahnya lebih dari 300 sukubangsa. Itulah sebabnya, dalam lambang Negara Republik Indonesia, burung garuda, tertera di dalamnya selain Pancasila yang menjadi dasar negara, juga semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna berbeda beda tetapi bersatu jua.

Bagian terbesar penduduk Jawa Barat adalah orang Sunda (sukubangsa Sunda). Mereka dipandang sebagai penduduk asli atau pribumi wilayah itu. Selain itu, di wilayah Jawa Barat bermukim pula sukubangsa Melayu-Betawi, di wilayah Jawa Barat bermukim pula sukubangsa Melayu-Betawi, sukubangsa

Jawa, dan lain-lain, yang masing-masing konsentrasi tempat tinggal mereka ialah di daerah Jakarta dan sekitarnya. serta di daerah pesisir Cirebon dan Banten. Perlu dikemukakan pula bahwa di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Jakarta, Cirebon, berdatangan pula sukubangsa lain seperti Batak, Padang, Ambon, Melayu sejak awal abad ini. Selain itu, etnis Cina dan Arab menetap pula di daerah perkotaan di wilayah ini, terutama di daerah aktivitas perdagangan tampil menonjol.

Menurut sensus penduduk tahun 1930, di wilayah Jawa Barat terdapat penduduk 8.275.140 orang yang termasuk sukubangsa Sunda. Jumlah seluruh penduduk di wilayah ini 11.379.146 orang, terdiri atas 5.586.999 orang pria dan 5.810.147 orang wanita atau terdiri atas 11.039.350 orang Indonesia dan 80.774 orang Eropa, 259.718 orang Cina, dan 17.304 orang Timur Asing lainnya, terutama orang Arab. Dengan demikian, jumlah bukan orang Sunda yang berdomisili di Jawa Barat waktu itu ada 3.122.006 orang, antara lain terdiri atas sukubangsa Jawa sebanyak 1.757.457 orang, sukubangsa Betawi sebanyak 955.295 orang. Pada waktu itu di luar Jawa Barat masih terdapat pula orang Sunda sebanyak 191.187 orang, yang paling banyak menetap di Jawa Tengah yaitu sebanyak 178.924 orang.⁵ Jika dipresentasikan, maka perbandingan orang Indonesia yang tinggal di Jawa Barat waktu itu adalah 75% untuk orang Sunda, 16% untuk orang Jawa, 8,65% untuk orang Betawi.

Faktor yang relevan untuk dikemukakan di sini mengenai kependudukan ialah mobilitas penduduk. Berdasarkan sensus tahun 1930, terungkap terjadinya beberapa macam mobilitas penduduk di Jawa Barat. Pertama, terjadi mobilitas penduduk antardaerah (kewedanaan, kebugatiran, keresidenan) di wilayah Jawa Barat sendiri yang biasa dikatakan sebagai migrasi lokal. Kedua, terjadi mobilitas penduduk dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat. Ketiga, mobilitas penduduk dari Jawa Barat masuk ke wilayah Jawa Barat. Misalnya, penduduk daerah Banten pada masa itu telah terbiasa pindah (keluar-masuk dan menetap) ke daerah-daerah : Jakarta, Lampung,

Sumatera Timur. Penduduk Priangan Timur banyak yang pindah ke daerah pesisir utara Jawa Barat, yaitu daerah-daerah: Kra-
wang, Jakarta, dan Indramayu.⁶ Sebaliknya, banyak pula orang dari luar Jawa Barat, baik masih dari Pulau Jawa maupun dari luar Jawa, datang menetap di Jawa Barat. Di terus beranak-pinak di wilayah ini. Pada tahun 1930 tercatat 195.252 orang (1,7% dari jumlah penduduk Jawa Barat) yang datang mema-
suki Jawa Barat dari wilayah lain, terdiri atas 25.883 orang dari luar Jawa dan 169.369 orang dari bagian lain Pulau Jawa.⁷

Semua jenis mobilitas tersebut terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya, bahkan hingga sekarang, dengan jumlah orang dan jenis mobilitas yang makin meningkat. Makin meningkatnya mobilitas penduduk itu dimungkinkan karena makin lengkap dan baiknya penyediaan prasarana dan sarana bagi kegiatan itu. Dalam hal ini, terutama tersedianya jalan umum yang makin baik, teratur, dan terpelihara sejak dibanggunya jalan raya pos (1809 – 1810) beserta cabang-cabangnya yang menghubungkan berbagai kota dan tempat penting di Jawa Barat serta Pulau Jawa umumnya, kemudian jalan kereta api sejak pertengahan abad yang lalu, beserta jenis-jenis kendaraannya sejak dari kereta yang ditarik oleh kuda atau kerbau hingga kendaraan yang ditarik oleh mesin (mobil, kereta api, kapal api).

Pada umumnya kaum pendatang yang masuk ke Jawa Barat menetap di kota-kota, karena kota memang memiliki daya tarik bagi mereka, seperti lembaga pendidikan (sekolah), perkantoran (pemerintah dan swasta), perusahaan, industri, perdagangan. Oleh karena itu, kota-kota di Jawa Barat berpenduduk heterogen, sedangkan penduduk pedesaannya bersifat homogen, yaitu lebih dari 90% merupakan orang Sunda.

1.3 Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Jawa Barat pada masa pendudukan Jepang dan rebolusi kemerdekaan, sebagian mengikuti struktur pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Waktu itu pemerintahan di Hindia Belanda (Indonesia) dilakukan secara otokratis, birokratis, dan sentralistis dengan kurang

memperhatikan struktur pemerintahan tradisional.⁸

Pada akhir abad ke-19, Jawa Barat dibagi dalam keresidenan (Banten, Batavia, Krawang, Priangan dan Cirebon), masing-masing diperintah oleh seorang residen. Tiap keresidenan terdiri atas beberapa *afdeeling* dan kebutupatian. *Afdeeling* dikepalai oleh seorang asisten dan seorang patih atau beberapa orang demang/wedana. Kebupatian diperintah oleh seorang bupati. *Afdeeling* dan kebutupatian terdiri atas beberapa distrik (kewedanaan). Distrik meliputi beberapa onderdistrik (kecamatan), masing-masing membawahi sejumlah desa.⁹

Pada pemerintahan yang sentralistis itu dijalankan pula azas dekonsentrasi, yaitu tugas pemerintahan dilampihkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah secara hirarkis. Sistem pemerintah ini disebut "Pemerintahan Pangrehpraja".¹⁰

Struktur pemerintahan yang bersifat sentralistis itu berlangsung sampai awal abad ke-20. Selanjutnya pemerintahan dilakukan menurut azas desentralisasi yang melahirkan dewan-dewan lokal, yaitu dewan keresidenan (*gewestelijke raden*) dan dewan kota (*gemeente raden*) sebagai lembaga otonom, masing-masing dipimpin oleh pegawai-pegawai *Bhinnelands Bestuur* (BB). Perubahan ini mulai terjadi setelah pemerintah mengeluarkan *Decentralisasi Besluit* dan *Locale Radenordonantie* tahun 1905. Berdasarkan kedua peraturan itu pada tiap keresidenan di Jawa dan Madura dibentuk pemerintahan *gemeente* (kotapraja, kemudian menjadi kotamadya). *Gemeente* pertama kali didirikan di Jawa Barat, yaitu Batavia, *Meester Corneüs* dan *Buitenzorg* (1905); Bandung dan Cirebon (1906); Sukabumi tahun 1914.¹¹

Setelah Perang Dunia I, timbul suara dari berbagai pihak untuk mengadakan reorganisasi dalam struktur pemerintahan. Tuntutan itu lebih santer lagi setelah pemerintah membentuk *Volksraad* (18 Mei 1918) yang memberi kesempatan agak luas kepada bangsa Indonesia untuk turut dalam pemerintahan kolonial. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengadakan pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi lebih luas lagi dengan menetapkan :

- (1) Pembentukan daerah otonom provinsi (*Bestuurshervormingwet* 1922)
- (2) Pembentukan daerah otonom kabupaten (*Regenschapsordonantie* 1924)
- (3) Ketentuan tentang *stadsgemeenten* di Jawa dan Madura (*Stadsgemeente-ordonantie* 1926)

Berdasarkan peraturan tersebut di Jawa dibentuk tiga buah provinsi (Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur). Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk di Hindia Belanda (1 Januari 1926). Wilayahnya meliputi lima keresidenan terdiri atas 18 kabupaten dan enam *gemeenten*. Dalam hal ini terjadi perubahan status administratif. Bogor yang semula berstatus *afdeeling* dari Keresidenan Batavia dijadikan keresidenan. Krawang yang semula sebagai keresidenan berubah menjadi kebutatian di wilayah Keresidenan Batavia. Kotapraja tetap seperti sebelumnya.¹²

Pemerintahan tingkat provinsi dilakukan oleh Dewan Provinsi (*Provincialeraad*), *College Gedeputeerden* dan gubernur atau Dewan Provinsi dan gubernur dengan ketua dewan dipegang oleh Dewan Kabupaten (*Regentschpsraad*), *College Gecommitterden* dan bupati dengan ketua dewan dipegang oleh bupati. Pemerintahan kotapraja dilakukan oleh Dewan Kota (*Gemeenteraad*), *College Burgemeester* dan *Wethouders* atau Dewan Kota dan walikota (*Burgemeester*) dengan ketua dewan dipegang oleh walikota. Bangsa Indonesia yang duduk dalam dewan-dewan pemerintah itu jumlahnya meningkat, terutama pada dewan kebutatian.¹³

Sistem dan struktur pemerintahan seperti itu berlangsung sampai menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang (8 Maret 1942). Sejak itu sampai 14 Agustus 1945, Indonesia diduduki oleh balatentara Jepang.

Untuk sementara waktu, tentara penduduk Jepang di Indonesia menjalankan pemerintahan militer. Struktur Pemerintahan pada dasarnya seperti pada zaman Belanda, hanya namanya diganti dengan istilah Jepang (provinsi = *gunseibu*, keresidenan = *syu*, kebutatian = *ken*, kewedanaan = *gun*, kecamatan = *son*, dan desa = *ku*).

Badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang Pemerintah Hindia Belanda, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang, tetapi, *Raad van Indie*, *Voksraad* dihapuskan *Kotapraja (syi)* dilepaskan dari lingkungan administratif bupati. Walikota menjadi pegawai pengrehpraja dan berada di bawah residen (*syuchokan*).

Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Tentara Keenam-belas (*Rikugun* = Angkatan Darat). Wilayah ini dibagi atas tiga *Gunseibu*, masing-masing diperintah oleh seorang *gunseikan* (gubernur militer), yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan pusat masing-masing di Bandung, Semarang dan Surabaya.¹⁴

Untuk mengatasi kekurangan pegawai, pemerintah terpaksa mengangkat bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan penting (residen, kepala polisi, kepala jawatan dsb). Pada 29 April 1942 diangkat empat orang residen bangsa Indonesia untuk Jawa Barat, yaitu RAA. Hilman Jayadiningrat (Banten), RAA. Suryajayanegara (Bogor), RAA. Wiranatakusumah (Priangan), dan Pangeran Aria Suriadi untuk Cirebon,¹⁵ Sementara itu di Jawa Barat, Gubernur Kolonel Matsui didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil dibantu oleh Atik Suardi.¹⁶

Setelah tenaga sipil Jepang (golongan Sakura) datang di Indonesia (sekitar bulan Juli 1942), sistem pemerintahan diubah menjadi pemerintahan sipil, tetapi dalam praktek, kendali pemerintahan tetap berada di tangan militer. Pemerintah kemudian melakukan reorganisasi. Pemerintah dijalankan dengan sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan perwakilan rakyat. Pemerintahan tingkat propinsi dihapuskan, sehingga *syu* (keresidenan) merupakan pemerintahan teratas yang mempunyai wewenang sendiri. *Syu* diharapkan dapat berdiri secara otonom dan berswasembada terutama dalam hal pangan, meskipun hubungan antara satu *syu* dengan lainnya sering terputus. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu politik militer guna mempertahankan pendudukan Jepang di Indonesia. Harapan itu ternyata kandas karena Negeri Jepang dibom

atom oleh Sekutu (6 dan 9 Agustus 1945), sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu (14 Agustus 1945).

Tiga hari kemudian, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya (18 Agustus 1945) ditetapkan undang-undang dasar serta Soekarno terpilih sebagai presiden RI dan Mohammad Hatta wakilnya.¹⁷ Keesokan harinya lagi (19 Agustus 1945), Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata menetapkan dua masalah penting, yaitu mengenai daerah dan pemerintahan, sebagai berikut :

(1) Daerah

(a) Wilayah kekuasaan RI adalah seluruh daerah bekas Hindia Belanda, termasuk Irian Barat. Untuk sementara wilayah ini dibagi menjadi delapan provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil), masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur.

(b) Daerah provinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan, masing-masing dikepalai oleh seorang residen. Dalam menjalankan pemerintahannya, gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

(c) Kedudukan kotapraja (*gemeente*) diteruskan.¹⁸

(2) Pemerintahan

Ditetapkan adanya 12 kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pertanahan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum) dan lima menteri negara.¹⁹

Pada 29 Agustus 1945 dibentuk kabinet RI pertama (Kabinet Presidentil) yang kemudian dilengkapi oleh aparat pemerintah lainnya. Selanjutnya presiden mengangkat gubernur untuk tiap-tiap propinsi. Dalam hal ini, Sutarjo Kartohadikusumo terpilih menjadi gubernur pertama Jawa Barat (Agustus akhir Desember 1945). Mula-mula ia berkedudukan di Jakarta merangkap sebagai ketua I KNIP.²⁰ Sejak akhir November

1945 kedudukan gubernur Jawa Barat pindah ke Bandung. ²¹

Provinsi Jawa Barat dibagi dalam lima keresidenan (Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon), masing-masing diperintah oleh seorang residen. Keresidenan terdiri atas kebugatian-kebugatian dan kotapraja dengan bupati dan wali kota sebagai kepalanya. ²²

Telah disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, gubernur dan residen dibantu oleh KNID. Pembentukan KNID di Jawa Barat dimulai pada tingkat keresidenan, yaitu Keresidenan Priangan (24 Agustus 1945) dengan ketua Niti Sumantri, ²³ Pembentukan KNID kebugatian (Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis) dilakukan antara 24 Agustus -- 9 September 1945, ²⁴ Setelah KNID di tingkat keresidenan dan kebugatian terbentuk, barulah KNID Provinsi Jawa Barat dipersiapkan (9 September 1945). Berhubung situasi Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, kacau akibat perebutan senjata dari tangan tentara Jepang, berdirinya KNID Provinsi Jawa Barat baru dapat diresmikan pada 3 Oktober 1945 dengan Ketua Otto Iskandar Dinata. ²⁵ Gubernur Jawa Barat selanjutnya ialah Datuk Djamin (Januari 1946), dr. Murdjani (1946 -- 1947), Sewaka (April 1947 -- 1948), dan Ir. Ukar Bratakusumah sebagai gubernur militer. Sejak Maret 1946 pemerintahan Jawa Barat dikendalikan dari daerah pengungsian.

1.4 Sosial Budaya dan Ekonomi

Telah disebutkan bahwa pada tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan sistem pemerintahan, yaitu dibentuknya *gemeente* (kotapraja) pada tiap keresidenan di Jawa dan Madura. Pemerintah *gemeente* ini pertama kali dibentuk di Jawa Barat. Perubahan dalam bidang pemerintahan itu, langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Gemeente yang dibentuk untuk kepentingan orang-orang Belanda telah menyebabkan jumlah orang Belanda dan Eropa lainnya yang berdomisili di kota-kota keresidenan semakin bertambah. Di Jawa Barat, hal ini terutama terjadi di Bandung.

Di kota ini telah tersedia berbagai fasilitas kota, baik untuk kepentingan pemerintah maupun untuk masyarakat, terutama masyarakat Eropa. Fasilitas yang penting antara lain gedung keresidenan, keputatian, kantor-kantor, hotel-hotel, kantor pos dan telepon, toko-toko besar, pasar, rumah sakit, tempat hiburan dan rekreasi, sarana transportasi, dan lain-lain.

Dalam pada itu, penduduk pribumi dan golongan Timur Asing pun semakin meningkat jumlahnya. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat, terutama di daerah Priangan sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1930-an, cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain :

- (1) Tumbuh dan berkembangnya perkebunan-perkebunan swasta milik orang-orang Eropa, terutama Belanda, akibat Undang-Undang Agraria 1870.
- (2) Angka kematian lebih rendah daripada kelahiran, karena kesehatan masyarakat mendapat perhatian pemerintah.
- (3) Perekonomian rakyat cukup baik akibat perluasan lahan pertanian, banyaknya lapangan kerja (buruh perkebunan, buruh pabrik, pertukangan, dagang, kuli pasar dan stasiun kereta api, dan lain-lain).
- (4) Pendidikan rakyat mulai merata akibat adanya guru-guru lulusan HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) Bandung.

Dalam hal ini pendidikan, masyarakat Jawa Barat telah diperkenalkan dengan berbagai jenis sekolah model Barat sejak pertengahan abad ke-19. Pada umumnya dan yang diutamakan memasuki sekolah model Barat itu adalah putera-puteri dari keluarga elit (menak). Sekolah yang mereka masuki adalah sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik dan tingkatannya makin tinggi. Jenis-jenis sekolah dimaksud antara lain, Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*), Sekolah Desa (*Volkschool*), *Hollands Inlandsche School* (HIS) bagi pendidikan dasar, *Vervolgschool*, Sekolah Guru (*Kweekschool/HIK*), MULO, Sekolah Teknik (*Ambachtschool*), *Algemeene Middelbare School* (AMS) bagi pendidikan lanjutan atau menengah, *Hoofden-school*, Sekolah Dokter Jawa, *Rechthogeschool*, *Technische*

Hogeschool (THS) bagi pendidikan tinggi. Di samping itu, rakyat Jawa Barat sudah sejak berabad-abad mengenal pendidikan pesantren. Pemerintah Hindia Belanda mengadakan berbagai jenis sekolah dengan tujuan utama mendapatkan tenaga kerja terdidik dan murah.²⁶

Adanya dikriminasi siswa-siswa pada sekolah-sekolah masa kolonial terselip maksud kaum kolonial untuk membentuk kelompok masyarakat yang dapat hubungannya dan setia kepada pemerintah kolonial.²⁷ Namun tujuan yang bersifat kolonial itu tidak seluruhnya tercapai, bahkan kenyataannya ada sesuatu yang tumbuh yang justru bertentangan dengan tujuan kolonial, yaitu munculnya kaum terpelajar yang menyadari kedudukan mereka yang tidak layak dalam masyarakat kolonial, sehingga berupa keras untuk meningkatkan kehidupan dan derajat bangsa mereka serta membebaskan bangsa mereka dari kungkungan kolonial.

Upaya kaum terpelajar tersebut terkenal dengan sebutan pergerakan nasional. Pada masa itu, Jawa Barat, terutama Kota Jakarta dan Bandung, menjadi pusat utama kegiatan pergerakan nasional yang melahirkan para pemimpin nasional serta organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satu organisasi pergerakan nasional dimaksud ialah "Pagujuban Pasundan" yang didirikan di Jakarta tahun 1974 dan berkembang di Bandung hingga akhir kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Paguyuban Pasundan didirikan oleh kaum terpelajar Sunda yang melahirkan para pemimpin dari kalangan orang Sunda, seperti R. Otto Iskandar Dinata, Ir. Ukar Bratakusumah, R. Emma Puradireja.²⁸

Faktor penting lain yang turut mendorong berubahnya kehidupan sosial rakyat Jawa Barat ialah perkembangan transportasi dan komunikasi sejak dibukanya jalur kereta api di Jawa Barat antara tahun 1881 -- 1911, sehingga Jawa Barat dapat berhubungan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur kereta api. Akibat perkembangan kota-kota dan adanya transportasi rakyat, maka timbul pula urbanisasi dan migrasi penduduk. Terjadinya hubungan antardaerah dan percampuran hidup antara pribumi dengan orang Belanda/

Eropa serta dengan golongan Timur Asing, menyebabkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi rakyat Jawa Barat semakin kompleks.

Di atas telah dikemukakan bahwa tanah di wilayah Jawa Barat pada umumnya termasuk jenis tanah yang subur. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan tinggi permukaan tanahnya berbeda-beda. Semua faktor tersebut memungkinkan wilayah Jawa Barat menjadi daerah agraris yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sejak abad yang lalu, produksi pertanian dari wilayah Jawa Barat bukan hanya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat bukan hanya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat sendiri, melainkan juga mempengaruhi perekonomian Nusantara. Produksi-produksi pertanian dimaksud ialah kopi, teh, kina, karet, tebu, dan padi.

Produksi kopi Jawa Barat pada awal abad yang lalu, perediaan tahun 1807 sejumlah kurang lebih 27.000 ton, telah menolong Pemerintah Hindia Belanda dari kebangkrutan, setelah Kompeni dibubarkan akibat bangkrut total.²⁹ Produksi kina yang dihasilkan dari wilayah Jawa Barat sebelum Perang Dunia II mencapai hasil diperhitungkan oleh konsumen dunia.³⁰

Sementara itu, sejak pertengahan abad yang lalu di lereng-lereng dataran tinggi dan pegunungan wilayah Priangan, dari daerah Bogor hingga Tasikmalaya, terhampar sejumlah perkebunan teh beserta pabrik pengolahannya yang hasilnya bukan saja dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, namun jauh lebih banyak untuk keperluan ekspor. Pada tahun 1902, dari 100 perkebunan teh di Indonesia, 80 buah di antaranya berada di Jawa Barat.³¹ Di dataran yang lebih rendah berderet pula sejumlah perkebunan karet, dari daerah Banten selatan hingga daerah Ciamis di perbatasan Jawa Tengah. Dalam pada itu, di dataran rendah Cirebon dan Majalengka terhampar pula perkebunan tebu dengan beberapa pabriknya. Perkebunan-perkebunan tersebut didirikan dan dikembangkan dengan modal swasta dengan teknologi Barat, terutama datang dari Negeri Belanda yang telah lama menjadi kaum kolonial di

Indonesia. Semua itu mempunyai nilai strategis bagi perekonomian Jawa Barat dan Indonesia, walaupun pernah menjalani kemunduran pada masa pendudukan militer Jepang.

Sejak memasuki abad ke-20 ini, di beberapa tempat di Jawa Barat didirikan dan dikembangkan sentra industri, seperti di Majalaya (Kabupaten Bandung) bagi industri tekstil, di Bogor bagi industri ban kendaraan "Good Year", dan di Bandung terdapat pabrik kina yang terkenal di dunia. Selain menjadi ibu kota, Jakarta dikembangkan pula menjadi pelabuhan besar dan pusat perdagangan.

Sehubungan dengan potensi ekonomi, strategis wilayah Jawa Barat dalam konteks Indonesia pada masa kolonial, tidaklah mengherankan jika pihak kolonial Belanda berusaha keras dengan segala rekayasa untuk dapat menguasai wilayah Jawa Barat.

Dalam pada itu, kehidupan agama Islam pada masyarakat Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan, bahkan Bandung menjadi tempat Kongres Nasional Sarekat Islam (SI) pertama (1916). Sementara itu, antara tahun 1900 hingga 1940-an, kehidupan kesenian, kesusastraan, media masa (majalah dan surat kabar) turut berkembang pula.³² Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial ekonomi rakyat mengalami kemunduran, karena politik dan tindakan Jepang, antara lain rakyat harus melakukan kerja paksa (*romusha*) yang cukup lama, bahkan kadang-kadang di tempat yang jauh dari rumah mereka. Demikian pula dalam bidang kesenian, khususnya seni tari, tidak mengalami perkembangan. Akan tetapi ada satu hal yang menggembarakan, yaitu meluasnya pemakaian bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan sama sekali penggunaan bahasa Belanda, baik dalam peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman resmi pemerintah maupun dalam percakapan sehari-hari. Pada waktu itu masyarakat Indonesia dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia.³³ Hal ini berarti menunjang Sumpah Pemuda 1928. Pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia umumnya lebih berkembang lagi setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945 -- 1949), kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Jawa Barat dapat dikatakan mengalami stagnasi, karena seluruh perhatian pemerintah dan masyarakat yang mencintai Republik tercurah kepada perjuangan kemerdekaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa bagian terbesar penduduk Jawa Barat yang juga merupakan penduduk asli adalah orang Sunda. Mereka memiliki ciri-ciri sosial budaya mandiri yang membedakan mereka dengan suku lainnya, sebagai hasil kristalisasi dari perjalanan panjang sejarah mereka secara turun-temurun selama berabad-abad, di samping memiliki persamaan-persamaan dengan suku bangsa lain di Nusantara. Ciri mandiri orang Sunda yang paling kentara adalah bahasa dan kesenian yang mereka miliki, yaitu bahasa dan kesenian Sunda. Keseluruhan alam dan tantangan hidup yang mereka hadapi sepanjang sejarahnya memang telah membentuk sosial budaya mereka sebagaimana tampak sampai sekarang ini.

Di samping klasifikasi sosial berdasarkan etnisnya, terhadap penduduk Jawa Barat, terutama golongan orang Sunda, dapat dikelompokkan menurut stratifikasinya (tinggi-rengahnya kedudukan sosial), yaitu pertama, golongan menak atau bangsawan, disebut juga golongan elit; kedua, golongan cacah, rakyat biasa.³⁴ Golongan menak jumlahnya sedikit, tetapi mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar, karena merekalah yang memegang kekuasaan di dalam pemerintahan (penguasa/ yang memerintah). Kaum menak terbentuk karena keturunan atau hubungan darah yang biasanya ditandai oleh gelar raden dan pangeran, dan karena pendidikan atau jabatan dalam pekerjaan. Mereka masih dapat dibedakan atas menak golongan tinggi (sultan atau bupati beserta keluarganya), golongan menak menengah (kelompok menak di bawah bupati), dan golongan menak rendahan (para pegawai rendah di bawah bupati di lingkungan pemerintahan tradisional). Golongan cacah jumlahnya besar. Mereka adalah rakyat termasuk yang diperintah. Berdasarkan pemilikan tanah, kekayaan yang dimiliki, dan pekerjaannya, golongan cacah dibedakan dalam : (1) cacah biasa, umumnya punya tanah, sawah, dan sejumlah kekayaan dan (2) cacah kuricakan, menumpang, penukang, buruh tani,

yaitu cacah yang miskin, tidak memiliki tanah dan bekerja mengolah tanah orang lain.

Karena pemerintahan kalangan pribumi (pemerintahan tradisional) merupakan lanjutan atau bagian dari pemerintahan kolonial, maka para menak itu merupakan bawahan para pejabat kolonial, baik langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, mereka dituntut untuk setia kepada pemerintah kolonial. Kesetiaan kaum menak kepada penguasa kolonial dipertahankan dan bahkan dipupuk terus melalui struktur birokrasi pemerintahan, dan juga melalui jenjang pendidikan dan kepangkatan dalam pekerjaan. Kondisi sosial tersebut di atas selanjutnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam hal ini, pergerakan nasional merupakan jembatan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke alam kemerdekaan.

CATATAN BAB I

1. *Biro Statistik*, 1978, hal. 4.
2. R.W. van Bemmelen, *The Geology of Indonesia*. The Hague: Government Printing Office, 1949.
3. Yudistira Garna, "Gambaran Umum Daerah Jawa Barat", *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*, Jakarta : Girmukti, 1984, hal. 12.
4. *Ibid*.
5. *Volkstelling*, 1930, I, 1933.
6. *Volkstelling 1930*, VIII, 1936, hal. 16, 18.
7. *Volkstelling 1930*, I, 1933, hal. 23 – 31.
8. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpraja Ditinjau dari Segi Sejarah*, Bandung : Alumni, 1978, hal. 14.
9. A. Sobana Hardjasaputra, *Pemerintahan Daerah Jawa barat Pada Masa Revolusi Fisik (September 1945 – Juni 19948)*. Bandung : Fakultas Sastra Unpad, 1980, hal. 11 – 13.
10. Liang Gie The, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Djakarta; Gunung Aung, 1967, hal 21; Joeniarto, *Pemerintahan Lokal*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1975, hal. 52f.

11. Koesoemahatmadja, *op. cit.*, hal 18. Cf. *Regeringsalmanak*, 1928, hal. 176f.
12. Hardjasaputra, *op. cit.*, hal 17–18.
13. *Regeringsalmanak*, 1928, hal. 753f.
14. *Rachman Santoso, Djakarta Raya Pada Djaman Djepang (1942 – 1945)*, Prasaran pada Seminar Sedjarah Nasional II di Jogjakarta, 1970, hal. 2. Cf. Nugroho Notokusanto, ed., *Sejarah Nasional Indonesia*, VI, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1977, hal. 5 – 6.
15. *Asia Raya*, 4 Mei 1942.
16. *Pemandangan*, 16 Maret 1942.
17. Iwa Kusumasumantri Sumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Jilid II, Djakarta; Grafica, 1965, hal. 31.
18. Koesoemahatmadja, *op. cit.*, hal. 21.
19. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Revolusi Nasional Tahapan Revolusi Bersendjata, 1945 – 1950*, Djakarta : Pembangunan, 1962, hal. 57.
20. Tirtoprodjo, *op. cit.*, hal 58; Nasution, *op.cit.*, I, hal 245.
21. Hardjasaputra, *op. cit.*, hal. 93
22. The, *op.cit.*, hal. 23 – 24.
23. *Ijahaja*, No. 205, 25 Agustus 1945; Cf. John R.W. Smail, *Bandung in the Early Revolution 1945 – 1946; A Study in the Social History of the Indonesian Revolution*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1964, hal. 40–41.
24. Hardjasaputra, *op. cit.*, hal. 47.
25. *Soeara Merdeka*, 5 Oktober 1945; Cf. Smail, *op. cit.*, hal 44.
26. Ekadjati, et. al. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Bandung : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat, 1986, hal. 39 – 106.
27. Sartono Kartodirdjo, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta Balai Pustaka, 1975.
28. Lihat Tiarsah, 1975.

29. Moh. Ali, et.al. *Sejarah Djawa Barat; Suatu Tanggapan*. Bandung : Pemerintah Daerah Jawa Barat, 1972, hal. 170.
30. *Ibid.*, hal. 197.
31. *Ibid.*
32. *Sejarah Seni Budaya Jawa Barat II*, 1977.
33. *Ibid.*, hal 92.
34. Samiati Alisyahbana, *A Preliminary Study of Cluass Structures Among teh Sundanese in the Priangon*. Ithaca : Cornell University, 1954.

BAB II PEMBENTUKAN NEGARA PASUNDAN

2.1 Van Mook dan Gerakan Federal

Terbentuknya unit negara-negara di Indonesia sejak Tahun 1946 yang kemudian menjadi negara-negara bagian dari negara federasi RIS pada akhir Tahun 1949, tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem politik federal yang direkayasa oleh Dr. H.J. van Mook dan pengganti-penggantinya. Ketika itu van Mook menjabat letnan gubernur jenderal Hindia Belanda dan kepala NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Oleh sebab itu maka negara-negara tersebut pada hakekatnya adalah produk pemerintah kolonial Belanda yang dipertahankan dengan militer dan polisi pimpinan Belanda.

Daerah-daerah yang kemudian dipecah menjadi negara-negara itu pada dasarnya adalah wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang pleno PPKI yang diselenggarakan pada 19 Agustus 1945, telah ditetapkan wilayah Republik Indonesia terdiri atas delapan provinsi yang meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda dulu. Kedelapan provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Setiap provinsi masing-masing diperintah oleh seorang

gubernur. Meskipun nama Irian tidak disebutkan, tetapi karena seluruh bekas Hindia Belanda, maka Irian niscaya juga termasuk di dalamnya, dalam hal ini dalam Provinsi Maluku.

Ketika Belanda berusaha kembali masuk ke Indonesia pada bulan September 1945 dengan menumpang kehadiran tentara Sekutu (Inggris) yang bertugas membebaskan tawanan-tawanan perang Belanda dan mengembalikan tentara Jepang ke tanah air mereka, mereka jumpai bekas jajahannya itu telah menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dan bertekad untuk membela dan mempertahankannya terhadap kekuatan mana pun yang berusaha untuk mengubah kenyataan itu. Bentrokan-bentrokan fisik antara Republik Indonesia yang baru berdiri di satu pihak dengan kekuatan-kekuatan Sekutu Belanda, dan sisa-sisa tentara Jepang di lain pihak pada masa-masa awal pasca Proklamasi adalah manifestasi dari tekad bangsa Indonesia untuk tetap bertahan merdeka.

Kenyataan-kenyataan inilah yang semula tidak dapat diterima oleh Belanda yang ingin tetap menjadikan Indonesia sebagai sebuah koloninya seperti sebelum Perang Dunia II. Belanda yang dalam hal ini van Mook yang mendarat pertama kali pada awal Oktober 1945 untuk mempersiapkan kembalinya wilayah Hindia Belanda itu, akhirnya harus menyusun strategi dan taktik baru untuk menghadapi perkembangan-perkembangan dan kenyataan-kenyataan di lapangan yang ada. Untuk memutar kembali jarum jam sejarah ke masa pra-Perang Dunia II adalah mustahil, tetapi untuk mencoba tetap dapat menguasai dan memerintah kembali bekas Hindia Belanda dulu dengan cara lain adalah sebuah usaha yang meskipun mengandung resiko yang belum dapat diramalkan hasilnya, tetapi mereka anggap mungkin dicoba untuk dilakukan.

Tujuan Belanda adalah tetap untuk menguasai kembali Indonesia. Caranya ialah memecah-mecah Indonesia dan mekanismenya ialah memerintah tidak langsung (*indirect rule*) melalui negara-negara federal (*federal states*) yang dibentuk Belanda mengikat negara-negara itu dalam sebuah federasi (serikat), lalu membentuk Uni Indonesia-Belanda untuk tetap menjamin kepemimpinan Belanda seperti sebelum perang. Cara ini dengan

sendirinya akan memojokkan Republik Indonesia sehingga menjadi hanya salah satu saja dari negara-negara bagian yang ada. Republik hasil Proklamasi ini dianggap oleh Belanda sebagai biang penghalang kembalinya kekuasaan kolonial Belanda.

Wilayah dari negara-negara yang dibentuk Belanda itu umumnya direbut dari Republik Indonesia melalui kekerasan senjata. Oleh sebab itu negara-negara ini bukan hasil keinginan dari rakyat Indonesia sendiri. Dan oleh karena negara-negara ini adalah produk Belanda, maka terdapat beberapa karakteristik yang hampir sama yang akan kita lihat nanti di bawah.

Sistem politik federal ini berbeda dengan cara-cara pada masa pra-kolonial sebelum perang. Sarjana ilmu politik dan sejarah dari Amerika George McTurnan Kahin, seorang yang kebetulan menjadi saksi mata sebagai jurnalis dalam periode kemelut di Indonesia pada waktu itu menunjukkan perbedaan-perbedaan itu sebagai berikut:

- (1) Pemerintah tidak langsung (*indirect rule*) diberi formula baru dan lebih luas di mana kontrol Belanda lebih disamarkan daripada sebelumnya.
- (2) Lebih banyak orang-orang Indonesia sendiri yang memegang jabatan-jabatan menengah dan atas pada administrasi pemerintahan tetapi tetap berkonsultasi dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia (Jakarta).
- (3) Struktur ini didukung oleh kekuatan militer dan polisi yang lebih besar.
- (4) Lebih banyak lagi nasionalis Indonesia yang dijebloskan ke dalam penjara daripada sebelum perang.¹

Antara Tahun 1946 – 1949 gerakan pembentukan negara-negara federal dari van Mook ini telah menghasilkan 15 negara yang dapat dibagi dalam dua kelompok: (1) kelompok yang disebut negara (berjumlah enam, antara lain Negara Pasundan) dan (2) kelompok yang disebut daerah-daerah istimewa (berjumlah sembilan).² Benang merah dalam kerangka gerakan ini dapat dirunut sejak dari Konferensi Malino (Juli 1946), Konferensi Pangkalpinang (Oktober 1946), pembentukan Negara In-

donesia Timur (Desember 1946), Daerah Federal dan Daerah Istimewa Borneo Barat (Mei 1947), pembentukan Negara Pasundan (Mei 1947 dan Februari 1948), Negara Madura (Januari 1948), Negara Sumatera Timur (Maret 1948), Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur (November 1948) Perundingan-perundingan antara Belanda dengan wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia di Hoge Veluwe, Linggarjati, 'Renville', 'Roem-Royen', sampai ke KMB,³ hampir semuanya mengandung ketentuan-ketentuan yang menunjukkan kepedulian yang sangat dari Belanda kepada kelangsungan sistem politik federal dan dominasinya dalam Uni Indonesia-Belanda. Demikian pula melalui tekanan-tekanan militer dalam agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua, pada dasarnya adalah untuk bisa menjamin pemerintah kolonial Belanda bisa tetap hadir dalam sistem yang telah direkannya.

Sebenarnya orang-orang Indonesia sendiri yang mendukung sistem politik federal di 15 negara dan daerah istimewa itu merupakan minoritas saja dibandingkan dengan yang benar-benar pro-Republik Indonesia. Mereka merupakan elemen-elemen dengan motivasi-motivasi yang bermacam-macam. Kahin mencoba mengklasifikasinya atas lima kelompok. Kategorisasi ini mungkin akan dapat membantu memahami motivasi dari berbagai *dramatis personae* yang duduk dalam negara-negara federal itu, tentu saja termasuk untuk Negara Pasundan yang akan dibicarakan nanti di bawah.

Kelompok-kelompok itu ialah :

- (1) Elemen-elemen aristokrat lokal yang takut kehilangan posisi-posisi politik dan ekonomi dalam pemerintahan Republik Indonesia.
- (2) Oportunis-oportunis politik yang tidak puas dengan posisi mereka dalam Republik Indonesia.
- (3) Khusus untuk Sumatera Timur. Selain dua elemen di atas, ada elemen-elemen profesional dan pegawai yang jelas bukan oportunis politik. Mereka timbul sebagai akibat 'revolusi sosial' bulan Januari 1946. Ketika itu kekuasaan Republik belum berdiri kokoh di Sumatera Timur; terdapat sejumlah elemen-elemen kelas menengah pro-Republik, ter-

masuk pemimpin-pemimpin Republik setempat. Ketika terjadi kekacauan yang dipimpin oleh orang-orang komunis, maka bukan hanya keluarga bangsawan-bangsawan lokal pro-Belanda saja yang dibunuh akan tetapi anggota-anggota keluarga dan rumah-rumah mereka yang pro-Republik pun yang turut menderita ikut terbunuh dan dihancurkan. Sebelum kekuasaan Republik datang untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan, kekuasaan Belanda dan Inggris telah lebih dahulu tiba sehingga mereka terpaksa di Medan dan di pelabuhan mencari perlindungan kepada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki semula. Ketika pada akhirnya kekuasaan Republik berhasil ditegakkan di daerah itu meskipun mereka menyesal tetapi cap kolaborator sudah melekat pada diri mereka.

- (4) Setelah negara-negara atau daerah-daerah otonomi yang didukung oleh Belanda berdiri, ada elemen-elemen orang Indonesia lainnya yang ikut serta dalam negara itu. Dalam beberapa hal mereka benar-benar pro-Republik, tetapi dengan sukarela ikut duduk dalam parlemen-parlemen itu dengan suatu keyakinan bahwa dengan berbuat demikian mereka dalam batas-batas tertentu akan dapat mengimbangi sikap-sikap anti-Republik dari para aristokrat atau oportunist-oportunist yang mencari keuntungan pribadi yang pada umumnya merupakan elemen-elemen yang dominan dalam pemerintahan-pemerintahan itu.
- (5) Terdapat pula elemen dari sejumlah orang Indonesia yang memberikan dukungan pasif terhadap rejim-rejim itu dengan alasan ekonomi. Belanda menakut-nakuti "kerjasama atau kehilangan pekerjaan" kepada sebagian terbesar kelas menengah yang terdiri atas pegawai negeri itu sudah cukup mencemaskan mereka. Mereka yang telah menderita selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang ditambah lagi satu atau dua tahun melawan Belanda membuat mereka hampir-hampir kehilangan daya lawan Belanda menafsirkan "non-kooperasi" mereka sebagai suatu perlawanan dan tidak jarang karena itu Belanda memenjarakan mereka. Bagi seseorang yang menjadi gantungan nasib seluruh keluarganya

terpaksa harus berpikir beberapa kali untuk melakukan perlawanan aktif. Oleh sebab itu meskipun mereka pada dasarnya adalah nasionalis, mereka hampir tidak berdaya di daerah negara-negara federal itu.⁴

Dalam Negara Pasundan yang akan kita bicarakan nanti, kecuali untuk butir ketiga, untuk butir-butir lain bukan tidak terdapat elemen-elemen tersebut, tentu saja dengan variasi-variasinya.

Di negara-negara federal atau daerah-daerah istimewa yang dibentuk Belanda diadakan pemilihan-pemilihan dan pembentukan pemerintah-pemerintah lokal Indonesia. Biasanya setelah Belanda memenjarakan sejumlah besar pemimpin-pemimpin pro-Republik yang paling aktif dan cakap Pemilihan-pemilihan itu tentu saja di kontrol sehingga mayoritas yang terpilih benar-benar mendukung Belanda. Kemudian keuntungan bertambah lagi diperoleh Belanda karena mereka dapat mengangkat sejumlah orang-orangnya untuk duduk dalam parlemen-parlemen. Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa mereka yang telah dipilih dan ditunjuk Belanda karena dianggap dapat dipercayai dan nasionalismenya termasuk moderat kemudian berbalik menjadi pendukung-pendukung Republik yang keras sehingga mereka ini menjadi sumber kejengkelan Belanda.⁵

2.2 Lahirnya Negara Pasundan

Jawa Barat setelah Proklamasi mengalami perubahan. Dalam Bab I sudah disebutkan bahwa semula pada masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah Jawa Barat yang disebut *West Java* merupakan sudah provinsi. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan atas *Osamu Seirei* No. 29 tahun 1942, Jawa Barat dibagi menjadi lima *syu* atau keresidenan yakni *Banten Syu*, *Bogor Syu*, *Jakarta Syu*, *Priangan Syu*, dan *Cirebon Syu*. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka dalam sidang PPKI 19 Agustus 1945, Jawa Barat ditetapkan menjadi salah satu dari delapan provinsi Republik Indonesia; provinsi-provinsi lain ialah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada 2 September 1945, bersama-sama dengan gubernur lain diangkat

gubernur Jawa Barat pertama yaitu Sutarjo Kartohadikusumo.⁶

Pada awal Oktober 1945, terbentuk Komite Nasional Daerah Jawa Barat dengan R. Otto Iskandar Dinata sebagai ketua, dan Syamsulrizal sebagai ketua Komite Nasional Daerah Kota Bandung. Yang terakhir ini lalu diangkat menjadi wali kota Bandung menggantikan RA. Atmadinata. Pada bulan Maret 1947 wali kota Bandung dijabat oleh Ir. Ukar Bratakusumah dan Gubernur Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo diganti oleh Mr. Datuk Jamin.

Untuk melaksanakan anjuran pemerintah pusat guna menghimpun tenaga bekas anggota *Heiho*, Peta dan KNIL, pada 27 Agustus 1945 dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) daerah Priangan dengan ketuanya Aruji Kartawinata. Selain itu masih dibentuk lagi laskar-laskar para pemuda dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), Persatuan Pemuda Pelajar, AMPTT (Angkatan Muda Pos Telegram Telepon), AMPU (Angkatan Muda Pekerjaan Umum) dan lain-lain. Adanya badan-badan perjuangan dan laskar-laskar rakyat di Jawa Barat menunjukkan keikutsertaan mereka dalam mempertahankan Republik Indonesia. Mereka inilah antara lain nantinya menjadi bagian dari masyarakat yang turut menentang berdirinya Negara Pasundan di samping tokoh-tokoh dari Jawa Barat sendiri.

Dalam upaya mengumpulkan senjata dari tangan Jepang, semula para pemuda hanya mendatangi tangsi-tangsi atau gudang-gudang persenjataan Jepang, tetapi jika mendapat perlawanan dari Jepang, para pemuda pun membalasnya dengan serangan sehingga terjadilah bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak. Bentrokan-bentrokan itu tanpa bisa dihindarkan menjalar di seluruh Jawa Barat.

Aksi para pemuda ini terus berlanjut sampai datangnya Inggris pada 12 Oktober 1945 di Kota Bandung dan mencapai puncaknya pada peristiwa Bandung Lautan Api pada 24 -- 25 Maret 1946. Dalam peristiwa tersebut penduduk Kota Bandung harus meninggalkan kampung halamannya mengungsi ke luar kota. Kota Bandung sendiri kemudian dikuasai oleh tentara Inggris (Sekutu) sampai 27 Mei 1946, ketika mereka akhirnya

harus meninggalkan Bandung setelah menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Sejak itu pasukan-pasukan Republik Indonesia berhadapan langsung dengan Belanda di Kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Sementara itu Pemerintah RI mengadakan perubahan-perubahan dalam pimpinan militer di Jawa Barat yaitu dengan dibentuknya Divisi Siliwangi pada 20 Mei 1946 di bawah komandan divisinya AH. Nasution. Selanjutnya, selain dilakukan oleh laskar-laskar yang tersebar hampir seluruh perlawanan terhadap tentara Belanda di Jawa Barat sejak itu dilakukan oleh tentara Republik Indonesia dari Divisi Siliwangi.⁷

Sesudah ditandatangani Persetujuan Linggajati, 25 Maret 1947, terjadi pembicaraan-pembicaraan antara pihak Republik dengan Belanda mengenai pengembalian Bandung khususnya kepada pihak Republik. Pengakuan *de facto* wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera menurut ketentuan Linggajati dengan sendirinya mengandung pengertian bukan hanya Bandung atau Jawa Barat saja, tetapi seluruh Jawa. Pembicaraan-pembicaraan itu tidak membawa hasil, apalagi ketika itu muncul gerakan pembentukan Negara Pasundan oleh PRP (Partai Rakyat Pasundan) dari Suria Kartalegawa bulan April dan Mei 1947 dan klimaksnya agresi militer Belanda pertama terhadap Republik Indonesia 21 Juli 1947 yang menjadikan Jawa Barat (kecuali Banten) sebagai salah satu sasaran penyerbuan tentara Belanda. Dengan dikusainya sebagian dari Jawa Barat oleh Belanda setelah agresi itu ditambah lagi setelah Divisi Siliwangi 'hijrah' ke Jawa Tengah sebagai konsekuensi dari persetujuan 'Renville' bulan Januari 1948, maka proyek Negara Pasundan itu mulai dilaksanakan.

Sehubungan dengan Negara Pasundan 'ini, kita perlu membedakan antara 'dua negara' yang waktu proses kelahiran, dan pimpinannya berbeda. Pertama ialah Negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa dan kedua ialah Negara Pasundan yang proses pembentukannya melalui konferensi-konferensi Jawa Barat.

2.2.1 *Negara Pasundan dari Suria Kartalegawa*

Primordialisme etnis merupakan kenyataan di Indonesia. Meskipun demikian pembentukan suatu negara federal atas da-

sar etnisitas semata tidak semudah yang diduga Belanda semula. Pada 18 November 1946 seorang bangsawan Sunda RAAM, Suria Kartalegawa mendirikan sebuah partai yang bernama PRP (Partai Rakyat Pasundan). Tokoh ini mengidentikkan dirinya dengan PRP (Suria Kartalegawa adalah PRP dan PRP adalah Suria Kartalegawa), dan ia mengklaim pada April 1947 anggota di seluruh Jawa Barat berjumlah 250.000 orang.⁸ Suria Kartalegawa adalah mantan bupati Garut (1929 -- 1944), anak dari Musa Kartalegawa, seorang penghulu agama di Kabupaten Garut.⁹ Karena pengabdianya yang setia kepada pemerintah Belanda, ia pernah dijanjikan menjadi bupati untuk tujuh keturunannya. Hal inilah yang membuatnya tinggi hati, haus kekuasaan untuk meraih harapan yang telah dijanjikan Belanda terhadap dirinya yaitu kedudukan tinggi. Van Mook sendiri menyebutnya *de corrupte figuur*.¹⁰

Tujuan pembentukan PRP adalah membentuk suatu negara di Jawa Barat yang terpisah dari Republik Indonesia. Dalam hal ini Surja Kartanegara dengan sengaja atau tidak menjadi alat dari van Mook dalam usahanya mencari jalan sendiri di luar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dengan RI. Sudah sejak perundingan-perundingan dengan Perdana Menteri Syahrir awal 1946 kedua belah pihak memutuskan untuk bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat, di mana Jawa Barat termasuk RI. Kesepakatan definitif tercapai dalam perundingan Linggajati yang diparaf oleh Syahrir dan wakil Belanda (Schermerhorn) pada 15 November 1946. Sebelum naskah itu disahkan (ratifikasi), lima hari setelah itu Surya Kertanegara membentuk PRP dengan tujuan :

mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka berdaulat dan berdasarkan demokrasi (kerakyatan) dalam ikatan federasi dan termasuknya Negara Pasundan sebagai negara (tidak sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera), dari Negara Indonesia Serikat, dalam sementara waktu dalam waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda.¹¹

Di daerah pendudukan Belanda Surja Kartalegawa mengadakan kampanye politik untuk melaksanakan tujuan PRP itu yaitu Negara Pasundan dengan bendera sendiri berwarna "hijau-putih" sebagai lambang harapan dan kesucian.¹² Untuk itu ia

mendapat dukungan dari pejabat-pejabat militer dan sipil Belanda seperti Kolonel Thomson di Bogor, Residen Priangan M. Klaassen di Bandung, dan pemangku jabatan Gubernur Jakarta CWA. Abbenhuis. Begitu pula ketika ia akan memproklamasikan Negara Pasundan di Bandung, para pejabat Belanda ini memberikan dukungannya. Sehari sebelum proklamasi, 3 Mei 1947, van Mook mengirim surat kepada komandan divisi B de Waal untuk membantu menyukseskan rapat umum di Bandung 4 Mei 1947 yang bertujuan mendirikan Negara Pasundan, membentuk kabinet dan badan pekerja. Bantuan yang diminta van Mook berupa transportasi, menyebarkan undangan dengan pesawat terbang, meminjamkan uang, dan kalau perlu senjata.¹³

Demikianlah pada 4 Mei 1947, dengan mengambil tempat di alun-alun Bandung, PRP–Suria Kartalegawa mengadakan rapat terbuka yang dihadiri kira-kira 4000 orang. Rakyat dikerahkan dari Ujungberung dan Kiaracondong yang diangkut dengan truk-truk Belanda untuk mendengarkan pidato Suria Kartalegawa yang akan memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan dan mengangkat dirinya sebagai presiden dan Mr. R. Kustomo sebagai perdana menteri. Van Mook hadir juga dalam rapat umum ini.¹⁴

Adapun tujuan PRP membentuk Negara Pasundan seperti yang diberitakan oleh *Berita Indonesia* pada 5 Mei 1947, adalah sebagai berikut :

1. PRP dengan ini memproklamasikan kemerdekaannya Negara Pasundan sesuai dengan kemauan rakyat Sunda dalam hubungan federatif, karena jalan ini adalah satu-satunya untuk politik "negara" ini di kemudian hari.
2. PRP akan menentang usaha-usaha untuk memasukkan daerah-daerah yang telah dimerdekakannya ke dalam republik.
3. PRP mendorong supaya di daerah-daerah yang telah dimerdekakannya maupun di daerah Republik diadakan plebisit atau pemungutan suara.
4. PRP menjadikan Bandung sebagai ibu negri "Negara Pasundan."
5. PRP akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onder-neming-onderneming kepunyaan bangsa asing kepada yang punya.
6. PRP meminta pengakuan pemerintahan sementara di daerah-daerah yang dimerdekakannya, jika pemungutan suara berhasil.

7. PRP minta untuk pemerintahan sementara ini statusnya yang sama dengan pemerintahan Indonesia Timur.
8. PRP memilih sebagai anggota pemerintahan sementara dari negara Pasundan Raden Moh. Suria Kartalegawa sebagai presiden dan Dr. (Mr.) Kustomo sebagai pembentuk Kabinet (Kabinet Formatur).¹⁵

Untuk menyebarluaskan proklamasi itu diadakan rapat-rapat umum sambil membentuk cabang-cabang PRP. Pada 11 Mei diadakan rapat umum di Jakarta dan membentuk cabang-cabang PRP di Jakarta dan sekitarnya, juga di Krawang dibentuk 20 cabang PRP.¹⁶ Tindakan lebih nekat lagi dilakukan oleh PRP dengan menyerang sisa-sisa administrasi pemerintahan Republik di Bogor pada 23 Mei 1947. Anggota-anggota PRP Bogor menculik sejumlah pemimpin Republik setempat, menyita kantor mereka dan menjadikannya milik Negara Pasundan. Dalam aksi-aksi ini PRP mendapat bantuan dari Kolonel Thomson dan residen Belanda.¹⁷

Proklamasi Negara Pasundan dan aksi-aksi PRP selanjutnya menimbulkan reaksi keras, tidak saja dari Pemerintah Republik yang menganggapnya sebagai suatu pelanggaran terhadap Linggajati,¹⁸ tetapi juga dari para pemuka rakyat Jawa Barat sendiri, baik yang berada di Yogyakarta maupun di Jawa Barat, bahkan orangtua Suria Kartalegawa sendiri di Garut menentang gerakan separatis itu.

Sebenarnya, sebelum ada PRP telah ada organisasi etnis Sunda sebelum perang dunia yang bernama "Paguyuban Pasundan". Meskipun tampaknya khusus untuk etnis Sunda tetapi sebenarnya organisasi ini merupakan organisasi kebangsaan dengan sifat kedaerahan yang terbuka yang untuk etnis-etnis lain. Apalagi kalau dilihat bahwa pendiri organisasi ini semula bukan orang Sunda asli yaitu Daeng Kanduruan Ardawinata. Ia adalah seorang keturunan raja Makassar yang menjadi tokoh Sunda, menjadi redaktur Balai Pustaka antara tahun 1916 -- 1922, seorang pendidik dan termasuk salah seorang sastrawan Sunda terkemuka. Pada 22 September 1914 ia menyelenggarakan rapat di rumahnya di Jakarta dengan para siswa STOVIA yang berasal dari suku Sunda. Rapat itu merupakan realisasi usul-usul para siswa untuk membentuk sebuah organisasi

guna memajukan Pasundan. Peristiwa ini menandai awal lahirnya Paguyuban Pasundan, sebuah organisasi yang semula bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi dalam perkembangan kemudian bergerak juga dalam bidang ekonomi dan politik.¹⁹ Jadi organisasi ini sebenarnya mirip dengan Budi Utomo sejak fase awal kedaerahan sampai kepada perkembangan kemudian fase kebangsaan (nasional). Adalah dari pemuka-pemuka Paguyuban Pasundan ini datangnya reaksi keras terhadap Negara Pasundan dari Suria Kartalegawa. Meskipun sebagian di antara mereka mempunyai paham politik federasi, namun mereka sebagaimana yang berpaham unitaris ingin melihat Pasundan (Jawa Barat) sebagai suatu bagian yang otonom dari Republik Indonesia, bukan sebagai negara yang berdiri sendiri dalam ikatan kerjasama dengan Belanda sebagaimana Negara Pasundan dari PRP—Suria Kartalegawa. Apalagi mereka melihat adanya motif-motif keuntungan pribadi tertentu yang lebih menonjol pada diri Suria Kartalegawa sendiri. Oleh sebab itu tokoh-tokoh terkemuka Paguyuban Pasundan umumnya lebih cenderung kepada Republik sebagaimana ternyata kehadiran mereka dalam pengungsian di Yogyakarta. Salah seorang tokoh Sunda yang mengaktifkan kembali Paguyuban Pasundan seperti sebelum perang di Yogyakarta sebagai reaksi terhadap PRP ialah Mohammad Enoch yang ketika itu menjadi wali Kota Yogyakarta.²⁰

Sementara itu rapat-rapat umum di daerah Republik di Jawa Barat diadakan untuk menentang pembentukan Negara Pasundan itu bahkan di Garut tentara Republik menjanjikan uang sepuluhribu rupiah bagi mereka yang dapat menangkap hidup atau mati Suria Kartalegawa.²¹

Reaksi lain berasal dari keluarga besar aristokrat Sunda terkemuka di Jawa Barat RAAM. Wiranatakusumah. Pada 6 Mei 1947 mereka mengirim kawat kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta yang menyatakan penolakan yang sekeras-kerasnya terhadap pembentukan negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa 4 Mei 1947. Mereka menegaskan "berdiri mati-matian di bawah Pemerintah Republik Indonesia, berpendirian menuntut kesatuan Kepulauan Indonesia."²²

Kemudian yang cukup menarik ialah rekasi dari ibu kandun dan putri Suria Kartalegawa sendiri. Sang itu yang sudah lanjut usia berbicara atas nama keluarga di muka corong Radio Republik Indonesia di Garut yang ditujukan kepada anaknya :

”Uca (nama panggilan Suria Kartalegawa). Ibu tidak mengerti kau berbuat yang bukan-bukan. Tak ingatkah kau kepada Ibu dan saudara-saudaramu, sehingga kau memisahkan diri dari keluarga. Ibu dan saudara-saudaramu bahkan Mang Abas Cianjur (bekas bupati Cianjur dan tinggal di Tasikmalaya) tidak menyetujui kau mendirikan Negara Pasundan.”²³

Ternyata reaksi-reaksi keras dari berbagai pihak terhadap pembentukan Negara Pasundan dari PRP—Suria Kartalegawa ini membuat Belanda sadar bahwa tokoh PRP ini memang tidak populer, sebab itu Belanda melepaskan dukungannya sambil memikirkan cara dan prosedur lain untuk membentuk suatu Negara Pasundan baru yang tetap dapat dikendalikannya. Sementara itu terjadi agresi militer Belanda pertama 21 Juli 1947. Meskipun PRP sendiri tidak bubar, tetapi Negara Pasundan dari Suria Kartalegawa lenyap dengan sendirinya. Hanya saja ketika kemudian terbentuk Negara Pasundan berikutnya, mula-mula Suria Kartalegawa menentanginya, tetapi ketika ia juga ikut ditunjuk sebagai salah seorang anggota Parlemen Pasundan mewakili PRP, ia menganggap bahwa semangat Negara Pasundan lama ikut menjelma dalam Negara Pasundan baru itu.

2.2.2 Negara Pasundan Hasil Konferensi Jawa Barat

Setelah Belanda berhasil menduduki sejumlah tempat-tempat di Jawa Barat sejak mereka melancarkan agresi militer pertama 21 Juli 1946, maka pemerintah kolonial Belanda mulai merekayasa pembentukan suatu negara federal baru untuk Jawa Barat. Program itu dimulai dengan diselenggarakannya Konferensi Jawa Barat I antara 13 sampai 18 Oktober 1947, dilanjutkan dengan Konferensi Jawa Barat II antara 16 sampai 20 Desember 1947, kemudian diakhiri dengan Konferensi Jawa Barat III antara 23 Februari sampai 5 Maret 1948.

Konferensi Jawa Barat I sebenarnya telah dianggap sebagai peletak dasar dari pembentukan Negara Pasundan. Konferensi itu dihadiri oleh 50 orang anggota pemuka-pemuka rakyat

dari berbagai golongan di seluruh Jawa Barat kecuali Banten. Konferensi itu dianggap sebagai "rapat keluarga".²⁴

Dalam konferensi itu dibicarakan antara lain tentang : bagaimana rakyat Jawa Barat dapat mempunyai pemerintahan sendiri dengan cepat; keinginan pemerintah (kolonial Belanda) menghilangkan perbedaan antara pamongpraja Belanda dan Indonesia; bagaimana cara rakyat Jawa Barat mengambil bagian dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat; ikhtiar untuk memulihkan keamanan.

Dalam konferensi itu dibentuk sebuah panitia penghubung yang menjadi jembatan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat. Tugasnya menyiapkan suatu konferensi dari semua wakil golongan rakyat di Jawa Barat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sementara atas dasar "demokrasi". Dalam panitia penghubung itu ditunjuk R. Hilman Jayadinigrat sebagai ketua, dengan anggota-anggota R. Juwarsa, R. Tirtasuyatna, dan R. Sunariakusumah, R. Musa Sastranegara.

Dalam pandangan umum ("urun rembuk") dari konferensi itu mengenai susunan ketatanegaraan Jawa Barat, menarik untuk disimak pandangan dari berbagai anggota. Meskipun terdapat 20 orang pembicara, kita mengambil beberapa contoh (*sample*) saja. Ranuwijaya, misalnya, menganggap perlu menunggu lebih dahulu hasil keputusan KTN (Komisi Tiga Negara) untuk menentukan corak negara. Sebagai seorang Sunda ia setuju saja pembentukan Negara Sunda asal benar-benar diinginkan oleh rakyat serta dilaksanakan dengan cara-cara sehat demokratis. Akhmad Atmaja mengusulkan nama Negara Indonesia Serikat diubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dua Balai Perwakilan, agar lagu "Indonesia Raya" dan bendera "Merah Putih" tetap ada. Akhmad Sanusi mengusulkan segala keputusan harus secara demokratis diambil oleh sidang dan Belanda. Pembentukan negara bersifat sementara saja sambil menunggu keputusan KTN. Sukardi menyatakan bahwa dari sudut politik, ekonomi, dan kebudayaan Jawa Barat tidak bisa dipisahkan dengan kepulauan lain. Konferensi itu belumlah merupakan suara rakyat, oleh sebab itu perlu ditunggu hasil keputusan KTN. Martadisastra mendesak supaya pemerintahan didasarkan atas Islam. Makhyar setuju dengan berdirinya

Negara Pasundan. Anwar Sanusi mengatakan pembentukan negara sebaiknya diserahkan kepada rakyat dan agama perlu mendapatkan perhatian. Sumaatmaja mendesak kerjasama menurut Linggajati. Ia tegas tidak setuju dengan pembentukan negara atau daerah yang terpisah dengan Republik Indonesia. Sultan Kanoman Cirebon mengusulkan supaya Cirebon menjadi daerah istimewa. Haji Junaedi merasa sebagai rakyat Pasundan setuju dengan Republik Pasundan. Priatman tidak setuju dengan pembentukan negara di luar Republik Indonesia dan menganjurkan supaya diambil sikap menunggu. Dr. Hamami tidak setuju dengan pemisahan Jawa Barat dari Republik dan meminta supaya kekuasaan pimpinan semua jawatan diserahkan kepada orang-orang Indonesia. Perubahan status Jawa Barat hanya bisa diterima menurut keputusan rakyat melalui pemungutan suara bebas. Kemudian Akhmad Memet setuju dengan pembentukan negara Pasundan sendiri.

Dari pemandangan umum yang bermacam-macam ini kita dapat melihat bahwa paling sedikit ada tiga pihak yang saling berbeda pendapat; di satu kutub karena merasa diri orang Sunda ada yang setuju dengan pembentukan Negara Pasundan, di lain kutub mekipun ia orang Sunda tetapi menolak sama sekali pembentukan negara baru, apalagi harus dipisahkan dari Republik Indonesia. Kemudian yang berada di tengah-tengah bersikap ambivalen dengan variasinya: setuju dengan pemerintahan baru tetapi sementara, atau pemerintahan yang bercorak Islam, atau menuntut daerah istimewa tertentu. Gambaran yang serupa ini sebenarnya dapat dilihat dalam Konferensi Jawa Barat II dan Konferensi Jawa Barat III, bahkan setelah Negara Pasundan harus diterima sebagai suatu kenyataan dan Konferensi Jawa Barat III menjelma menjadi Parlemen Pasundan, ketiga sikap itu harus terus dibawa-bawa.

Selanjutnya atas penunjukkan Recomba (*Regerings Commissaris Bestuursangelegenheden*), Gubernur Jawa Barat, Konferensi Jawa Barat II berhasil menghadirkan 170 anggota yang dianggap mewakili semua golongan dan aliran dalam masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri atas orang-orang Indonesia, Cina, Arab, dan Belanda.

Jumlah anggota Panitia Penghubung dari Konferensi Jawa Barat I ditambah menjadi 11 orang dalam Konferensi Jawa Barat II, dan namanya pun diubah menjadi Panitia Persiapan. Tiga orang dari golongan Indonesia ialah Wisaksono, Oto Subrata, dan Male Wiranatakusumah; seorang dari golongan Cina, Ir. Tan Hwat Tiang; seorang dari golongan Belanda, Ir. Wermuth; dan seorang dari golongan Arab, Usman Aljufri. Berhubung Hilman Jayadiningrat diangkat *recomba*, maka sebagai ketua diangkat R. Tg. Juwarsa, ditambah R.H. Ranuwijaya sebagai anggota. Juwarsa inilah yang kemudian akan mempersiapkan Konferensi Jawa Barat III.

Dalam pemandangan umum yang kemudian tertuang dalam mosi-mosi dan resolusi, tampak bahwa suara-suara untuk menggolkan pembentukan segera suatu negara Jawa Barat lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang menghendaki pemerintahan sementara saja, atau mereka yang "tidak menghendaki penetapan kedudukan ketatanegaraan Jawa Barat sebelum diadakan plebisit". Yang terakhir ini umumnya pro-Republik dan cenderung untuk menunda-nunda perubahan status Jawa Barat dengan alasan perlu diadakan plebisit lebih dahulu. Meskipun pada akhirnya dicapai suatu "kompromi", namun sebelumnya ada di antara anggota dalam kesempatan pemandangan umum itu mengangkat isu "demokrasi" ke permukaan. Male Wiranatakusumah, misalnya, menganggap bahwa konferensi itu "tidak berdasarkan atas demokrasi yang benar". Ia menuntut supaya "rakyat harus didengar terlebih dahulu". Menurut pendapatnya Konferensi Jawa Barat tidak berhak menetapkan status Jawa Barat. Meskipun ia bukan tidak setuju dengan penyusunan daerah atau Negara Jawa Barat, tetapi sidang harus mendengar terlebih dahulu "keinginan dan kehendak rakyat".

Mosi dan resolusi dari Konferensi Jawa Barat II itu akhirnya memutuskan supaya dibentuk Pemerintahan Sementara untuk Jawa Barat dalam coran Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Negara ini akan masuk dalam lingkungan Indonesia Serikat. Maka sebuah Konferensi Jawa Barat yang berikutnya dipersiapkan untuk itu.

Sehubungan dengan hasil-hasil Konferensi Jawa Barat II itu, sejumlah 20 orang pemuka dan intelektual Jawa Barat pada 20 Desember 1947 segera mengeluarkan manifest yang menentanginya. Manifest yang kemudian dikenal dengan "Manifest 20" yang ditandatangani antara lain oleh Prof. Dr. Juhana Wiradikarta dan Dr. R. Temenggung Jumhana Wiriatmaja, aslinya ditulis dalam bahasa Inggris karena dikirimkan kepada Komite Jasa Baik dari Dewan Keamanan PBB, selain kepada pers dan Pemerintah Republik Isinya :

1. Konferensi Jawa Barat (II) tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan apapun mengenai status Jawa Barat;
2. Dalam hubungannya dengan kenyataan bahwa Jawa Barat merupakan suatu bagian integral dari wilayah Republik Indonesia dan kenyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan sepenuhnya kepada wilayah-wilayahnya untuk mendapatkan otonomi maka status Jawa Barat harus ditentukan dalam konsultasi dan persetujuan dengan Pemerintah Republik Indonesia.²⁵

Sementara Juwarsa sibuk dengan persiapan Konferensi Jawa Barat III yang akan resmi membentuk Negara Jawa Barat, Jenderal Spoor sibuk pula mempersiapkan tentara bagi Negara Jawa Barat. Maklumat pun disebarakan ke daerah-daerah pendudukan Belanda.

Negara Jawa barat harus Aman, Tenteram dan Sentosa.

Oleh karena itu: Pemerintah (Belanda) akan mewujudkan keadaan itu dengan jalan membentuk Pasukan Pengawal (negara-Leger), yaitu sebuah pasukan tentara untuk negara Jawa Barat.

Pemuda-pemuda, yang berhasrat ingin mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kesentosaan tanah airnya, serta mempunyai minat pada soal ketenteraan, harus selekas mungkin mendaftarkan dirinya masing-masing, kepada Camat atau Wedana di tempatnya masing-masing, kepada Camat atau Wedana di tempatnya masing-masing. Di tempat itu mereka akan menerima pelbagai keterangan yang sejelas-jelasnya.²⁶

Pasukan pengawal untuk Jawa Barat akan mulai dibentuk di Cimahi 1 Februari 1948, sedangkan Negara Jawa Barat sendiri belum ada. Latihan untuk Batalyon Pasundan pertama dibuka 1 Februari 1948, kemudian menurut rencana Batalyon kedua 1 Juni 1948, dan Batalyon ketiga 1 September 1948. Mereka akan digaji menurut gaji anggota KNIL. Jenjang-jenjang

kepangkatan menurut hasil pendidikan, tetapi untuk menjadi perwira harus berijazah MULO atau HBS tiga tahun.

Batalyon-batalyon yang dilatih ini akan menjadi Batalyon Keamanan (*VB = Veiligheids Batalion*) yang bertugas, di samping tentara Belanda, menjaga keamanan pemerintahan sipil dari pemerintah atau negara yang dibentuk Belanda. Batalyon serupa sudah ada di Sumatera Timur dan Madura, sedangkan untuk Jawa Barat dan Sumatera Selatan sedang dipersiapkan,²⁷ tetapi ternyata kemudian batalyon serupa ini tidak pernah berfungsi betul di Jawa Barat karena seluruhnya didominasi oleh tentara Belanda sendiri.

Dalam pada itu kegiatan Juwarsa mempersiapkan Konferensi Jawa Barat terus berlangsung dengan mengirimkan undangan ke segala penjuru Jawa Barat. Untuk menggambarkan kegiatan tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.

UNDANGAN

Surat undangan ini kami tujukan umumnya kepada saudara-saudara yang pada saat ini masih ada dalam evakuasi, belum menjalankan pekerjaannya masing-masing untuk kebutuhan Bangsa dan Tanah Air. Terutama kami tujukan kepada saudara-saudara yang menjadi pemimpin dari suatu pekerjaan, yang mempunyai kepandaian istimewa (ahli) dari pekerjaannya (*deskundigen*)!

Saudara-saudara sekalian!

Meskipun saudara ada di tempat pengungsian, akan tetapi kami percaya, bahwa saudara-saudara telah mengetahui, tentang adanya, langsungnya Konferensi Jawa Barat I yang disusul oleh Konferensi Jawa Barat II yang diadakan di Bandung dalam bulan Desember yang baru lalu.

Konferensi yang ke-2 ini telah mengambil putusan, yang isinya (sarinnya) kami boleh pendekkan sebagai di bawah ini: Akan membentuk Pemerintah Sementara untuk Jawa Barat dengan memakai corak Negara dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Berhubung dengan putusan yang tersebut di atas itu, panitia persiapan pada masa ini sedang sibuk membanting tulang, menyelenggarakan apa-apa yang perlu untuk mendirikan Negara (*Staat*).

Yang sangat dibutuhkan, selainnya naskah Undang-undang Dasar dan lain-lain, terutama dari sekarang juga, kita harus mulai dengan membentuk atau menyempurnakan pendirian-pendirian dan perusahaan-perusahaan jawatan-jawatan yang biasa dipegang oleh pemerintahan, misalnya: Jawatan Pengajaran, Jawatan Kehutanan, Pertanian, Peri-

kanan, Perkebunan dan lain-lain. Jika nanti negara Jawa Barat berdiri, jawatan-jawatan dan perusahaan-perusahaan itu harus sudah berdiri. Saudara-saudara yang pada saat ini belum bekerja kembali dan mempunyai kepandaian keahlian !!! Marilah saudara-saudara datang dan menyerahkan tenaga saudara-saudara kepada kami, untuk Nusa dan Bangsa !!! Pikirkanlah, bahwa Tanah Air kita ini harus maju dan kita-lah yang mempunyai kewajiban untuk memajukan tempat tumpah darah ini.

Salah sekali, bahwasanya kita mempunyai kewajiban yang mutlak masih berdiam, termenung saja, sedang orang-orang yang membantu kita, sudah menyingsingkan lengan bajunya dan bekerja sekuat tenaga untuk keperluan tanah air kita !

Datanglah saudara-saudara, kita menunggu kedatangan tuan-tuan !

Juwarsa

Ketua Panitia Persiapan Pembentukan
Pemerintah Sementara Negara Jawa Barat.²⁸

Dengan alasan yang berbeda, timbul reaksi keras dari dua pihak tokoh Jawa Barat menentang rencana pembentukan Negara Jawa Barat itu. Di satu pihak ialah PRP dari Suria Kartalegawa. Mereka menolak konferensi itu karena mereka berpegang teguh kepada Negara Pasundan yang sudah diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa. Mereka menyiarkan "Naskah Perjuangan Pasundan" dan menyebutkan bahwa "Negara Pasundan Merdeka" itu sudah ada karena telah memenuhi syarat-syarat bagi tegaknya suatu negara yaitu adanya wilayah, rakyat dan pemerintah. Akan tetapi berhubung keadaan masih kacau, maka untuk sementara pemerintahan diserahkan kepada Belanda.²⁹ Untuk menggiatkan "kebangsaan Pasundan", PRP menganjurkan penggunaan bahasa Sunda sebagai "bahasa kebangsaan" dan untuk menghidupkan kebudayaan Sunda asli dianjurkan memakai pakaian "kebangsaan", antara lain ikat kepala "bendo".³⁰ Tetapi setelah Suria Kartalegawa dan PRP ditunjuk Belanda ikut dalam Parlemen Pasundan kemudian, mereka menyesuaikan diri dan oposisi mereka hilang dengan sendirinya.

Di lain pihak tantangan terhadap pembentukan Negara Jawa Barat itu berasal dari tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan pro-Republik di Yogyakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh Mohammad Enokh, Kusumaatmaja, Ir. Juanda, Ny. Emma Puradireja, Kartajumena, dan Jerman Prawirawinata pada 24

Januari 1948, mereka memutuskan untuk memprtahankan Jawa Barat sebagai daerah otonom dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini mereka mengeluarkan maklumat:

. . . Seperti diketahui, adalah pendirian Paguyuban Pasundan dari dahulu, bahwa Jawa Barat menurut syarat kulturil, historis dan ekonomis sebaiknya berdiri sendiri, akan tetapi di dalam memperjuangkan ini selalu tidak mau meninggalkan persatuan yang erat dengan saudara-saudara bangsa Indonesia lainnya, dan selalu berpedoman kepada penyusunan kekuatan Indonesia seluruhnya. Perjuangan yang mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yaitu RI; di dalam RI inilah tempatnya Paguyuban Pasundan tetap berjuang sampai cita-cita kedaulatan seluruh Indonesia tercapai.

Meninggalkan Republik pada tingkatan perjuangan sekarang berarti memecahkan tenaga dan dengan sendirinya memperlemah perjuangan bangsa Indonesia. Dari sebab itu untuk keselamatan Indonesia seluruhnya, sikap kita sekarang ini semestinya memprtahankan Jawa Barat sebagai daerah otonom dari kesatuan Negara RI.

Berhubung dengan ditandatangani persetujuan Renville pemerintah Republik mengubah sikapnya dengan memperkenan kepada pegawai-pegawai dan orang-orang Republik umumnya untuk ikut serta dalam konferensi-konferensi atau pemilihan, baik untuk dipilih maupun untuk memilih, yang diadakan oleh pemerintah daerah pendudukan Belanda, sebagai wakil rakyat, maka sesuai dengan ini, pengurus besar Paguyuban Pasundan tidak berkeberatan jika anggota-anggotanya bekerja sesuai dengan dasar koperasi yang diumumkan oleh pemerintah Republik tadi.

Bagaimana pun juga kami berseru kepada semua cabang dan anggota untuk, jalan manapun juga yang akan diambilnya, bekerja aktif ke arah satu usaha dan tujuan, yaitu mempertahankan Jawa Barat sebagai bagian autonom dari kesatuan Negara RI . . .³¹

Sehubungan dengan rencana pembentukan Negara Jawa Barat itu Pemerintah Republik Indonesia juga menentanginya dengan mengeluarkan maklumat pada 15 Februari 1948 yang isinya sebagai berikut :

KONFERENSI JAWA BARAT DAN PERSETUJUAN "RENVILLE"

1. Jika konferensi Jawa Barat kesatu diadakan sebelum dimulai perundingan antara pemerintah Republik dengan perundingan baru dimulai, maka "konferensi Jawa Barat" ketiga menurut berita akan diadakan sediki waktu lagi, diadakan sesudah tercapai persetujuan "Renville" dan dengan tidak mempedulikan persetujuan-persetujuan yang telah diperoleh.

2. Pasal 3 dari pokok-pokok *principles* persetujuan Renville yang sudah dicapai berbunyi: "diinsyafi bahwa putusan yang mengenai perubahan dalam pemerintahan daerahnya hanya dapat dijalankan dengan persetujuan penuh dan merdeka dari penduduk daerah-daerah tersebut dan apabila keamanan dan kebebasan daripada paksaan bagi penduduk sudah terjamin", sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 dari pokok-pokok persetujuan Renville, tidak mungkin tercapai dalam konferensi ketiga ini, oleh karena:
 - (a) konferensi tersebut tidak terdiri dari wakil-wakil seluruh daerah Jawa Barat, akan tetapi hanya terdiri semata-mata dari anggota-anggota dari bagian-bagian Jawa Barat yang diduduki tentara Belanda, di mana berlaku undang-undang *staat van beleg* dan lain-lainnya yang menyempitkan kemerdekaan-kemerdekaan bersuara dan pergerakan organisasi politik.
 - (b) Sebagian besar dari penduduk daerah pendudukan itu sendiri masih tinggal dalam pegunungan dan dalam pengungsian di luar daerah pendudukan itu untuk menyelamatkan diri, menunggu sampai keamanan terjamin, dan kehidupan normal dapat kembali.
3. Enam pokok-pokok penyelesaian politik yang sudah diterima oleh kedua belah pihak dengan tidak pakai syarat, sudah membukakan jalan tengah yang sebaik-baiknya yakni jalan pemungutan suara rakyat untuk menentukan apakah penduduk dari beberapa daerah di Jawa, Madura dan Sumatra menghendaki supaya daerahnya merupakan bagian dari RI atau bagian negara lain dalam negara Indonesia Serikat, yakni dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun sesudah penandatanganan persetujuan pasal 4.
4. Pemerintah RI berpendapat, bahwa dengan pemungutan suara (plebisit) secara yang dimupakati oleh kedua pihak, dengan peninjauan KTN itulah satu-satunya jalan yang dapat membawa kepada penyelesaian yang sempurna, sebagai dasar pembangunan negara selanjutnya. Adapun konferensi Jawa Barat ketiga ini hendak diadakan seolah-olah tidak ada perundingan dan persetujuan sama sekali.

AUTONOMI SELUASNYA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK

1. Mempunyai kesempatan ini untuk menegaskan keterangan tanggal 15 Desember 1947, bahwa berdasar kepada undang-undang dasar bab 6 pasal 18, kenegaraan RI memungkinkan autonomi

kultur dan kebudayaan sepenuhnya dengan tidak mengakibatkan perpecahan kenegaraan yang melemahkan kedudukan negara seluruhnya dan membahayakan bagi daerah yang menceraikan diri.

2. Walaupun bagaimana, pemerintah Republik dengan ini menegaskan pendirian dan kesediaannya melaksanakan cara penyelesaian soal ini berdasarkan persetujuan Renville, dengan sungguh-sungguh (loyal dan royal) menurut keputusan suara rakyat seluruh daerah yang dipersoalkan, meskipun bagaimana hasil plebisit itu nanti.

STATUS JAWA BARAT DAN PEMBANGUNAN

1. Menunda penetapan status Jawa Barat sampai dapat dilakukan pemungutan suara (plebisit) menurut pokok persetujuan Renville sama sekali tidak berarti menahan nahan usaha pembangunan di daerah pendudukan di Jawa Barat. Berhubung dengan ini, pemerintah RI mengingatkan pengumuman pemerintah No 2 tanggal 2 Pebruari 1948 yang membukakan jalan bagi pegawai-pegawai Republik untuk menyumbangkan tenaga mereka kepada jawatan jawatan pemerintah sementara dalam daerah pendudukan untuk pembangunan.
2. Sedangkan penetapan status Jawa Barat sebagai negara yang terlepas dari Republik dalam keadaan dan suasana tingkatan (fase) sekarang ini semata mata sebagai melanjutkan keputusan satu konferensi yang diadakan sebelum persetujuan Renville dengan tidak memperdulikan pokok-pokok persetujuan yang baru dicapai, sama sekali tidak memberi jaminan akan adanya suasana aman dan baik yang diperlukan bagi usaha pembangunan, bahkan sebaliknya akan membawa akibat yang memecah belah antara kita sama kita dan menerbitkan banyak kesulitan kesulitan yang merintang pelaksanaan pokok persetujuan Renville yang baru saja tercapai dengan susah payah itu.
3. Lebih-lebih oleh karena rakyat Jawa Barat bersama-sama rakyat dari lain bagian dari Republik, pun dari daerah-daerah lainnya di kepulauan Indonesia, telah bahu membahu memberi pengorbanan jiwa raga dan harta di dalam perjuangan kemrdekaan ini, maka hendaklah rakyat dan terutama pemimpin-pemimpinnya di Jawa Barat yang ikut dalam konferensi tersebut khususnya mempertimbangkan soal ini dari segala sudut dengan teliti lebih memandang ke masa depan, agar perjuangan kita bersama itu membawa hasil yang sempurna bagi rakyat di Jawa Barat khususnya dan bangsa kita Indonesia seluruhnya.³²

Akhirnya Konferensi Jawa Barat III diselenggarakan juga, mungkin bukan suatu kebetulan sesudah penandatanganan persetujuan Renville bulan Januari 1948 dan Divisi Siliwangi

melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah pada awal Februari 1948

Dalam konferensi ini hadir 100 orang wakil yang terdiri atas : 53 orang bangsa Indonesia asli yang ditunjuk melalui pemilihan; 14 orang Indonesia asli yang diangkat oleh *Recomba* Jawa Barat dengan persetujuan Panitia Persiapan (ditunjuk Belanda); sebelas orang Belanda; delapan orang golongan Cina; tiga orang golongan Arab; dan sebelas orang anggota panitia.³³ Adapun wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan bertingkat dilakukan di daerah-daerah pendudukan Belanda dari tingkat desa-desa sampai kabupaten-kabupaten. Mereka itu berasal dari Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Jakarta, *Ommelanden* (sekitar Jakarta), Purwakarta, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Setiap kabupaten memilih tiga orang wakil, kecuali Jakarta, Bogor, Bandung, dan Cirebon masing-masing lima orang wakil. Kemudian yang diangkat oleh Belanda ialah wakil-wakil dari PRP (termasuk Suria Kartalegawa), Paguyuban Pasundan (antara lain R. Adil Puradireja), golongan rakyat Banten yang berdiam di luar Banten, golongan tani, golongan buruh, golongan pedagang, dari Jakarta, Garut, dan Cirebon. Juga termasuk Panitia Persiapan Negara Barat.³⁴ Entah diketahui atau tidak oleh Belanda, ternyata bahwa ada wakil-wakil yang diangkat itu pro-Republik, misalnya R. Suyoso, mantan wedana Republik di Seneñ (Jakarta) atau Adil Puradireja dari Paguyuban Pasundan, yang nantinya dalam Parlemen Paasundan dipilih sebagai perdana menteri. Duapuluh tujuh orang dari anggota yang dipilih itu adalah mereka yang pro-Republik.³⁵

Sidang-sidang konferensi itu berlangsung sepuluh hari lamanya antara 23 Februari sampai 5 Maret 1948. Dalam konferensi masih terdapat dua aliran yaitu golongan Republik yang dipimpin oleh R. Suyoso dan golongan federal yang dipimpin oleh Panji Sunario. Meskipun golongan pertama merupakan minoritas, namun suara mereka cukup vokal dalam mempengaruhi jalannya sidang. Mereka kompak dan alasan-alasan mereka cukup meyakinkan. Ketika itu Belanda cenderung menghendaki rancangan konstitusi Negara Pasundan itu ber-sistem presidensial. Mereka melihat contoh Negara Indonesia

Timur, pemegang kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada Perlemen. Di sini ditemukan sejumlah minoritas Republikan yang gigih mempengaruhi jalannya pemerintahan. Supaya model NIT ini tidak terulang, Belanda menghendaki agar dalam Negara Pasundan itu "wali negara" (presiden) yang memegang eksekutif tidak bertanggung jawab kepada perlemen. Akan tetapi golongan Suyoso berhasil mempengaruhi sidang agar merubah rancangan konstitusi dari sistem persidensial menjadi sistem perlemitter di mana perdana menteri yang memegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab Perlemen. Dengan demikian "wali negara" merupakan lambang saja Lebih jauh lagi minoritas Suyoso berhasil mengusulkan RAAM. Wiranatakusumah sebagai wali negara dan Adil Puradireja sebagai perdana menteri.^{3 6}

Demikianlah meskipun mayoritas suara pada akhirnya berhasil dalam konferensi Jawa Barat III itu dengan pembentukan Negara Pasundan, Parlemen Pasundan, pemilihan wali negara, dan pengangkatan perdana menteri, nama elemen nasional yang minoritas tetap merupakan potensi dalam perlemen yang memperjuangkan penyatuan kembali dengan Republik Indonesia pada masa-masa mendatang dari pemerintah Negara Pasundan.

CATATAN BAB II

1. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961, hal. 351.
2. *Ibid.*, hal. 354.
3. Lihat *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950.
4. Kahin, *op. cit.*, hal 352 –353.
5. *Ibid.*, hal 353.
6. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1945, Jakarta :Sekretariat Negara RI, 1981, hal. 30 – 31.
7. A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Jilid 2 – 11, Bandung : Angkasa, 1978.
8. Lihat S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden Betreffende De Nederlands – Indonesiasche Betrekkingen 1945 – 1950*, Deel 7, 's-Gravenhage : Meartinus Nijhoff, 1978, hal. 512, dan P.J. Drooglever 7 M. J. B. Schouten, *Officiele Bescheiden Betreffende Nederlands – Indonesische Betrekkingen 1945 – 1950*, 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, Deel 12, 1985, hal. 106.
9. Lihat Laporan Residen Klaassen tanggal 27 – 12 – 1946 tentang PRP dalam S.L. Van der Wal, *Officiele Bescheiden*

- Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945–1950*, 's Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1976, Jilid 6, hal. 674, 676, 681. Mengenai asal-usul, menurut Tanu Suherly, Suria Kartalegawa adalah anak Pengulu Agama Kabupaten Garut, *op. cit.*, hal. 5 Tetapi menurut Junaedi, Suria Kartalegawa adalah anak Penghulu Agama Kabupaten Sumedang, *op. cit.*, 44.
10. Lihat surat van Mook kepada Menteri Wilayah Seberang Jonkman tanggal 15–12–1946 dalam Van der Wal, *op. cit.*, hal. 577. Cv. *Api Rakjat*, "Gara-gara Kartalegawa", 30 Mei 1947.
 11. Junaedi, "Runtuhnya Negara Pasundan," Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 45. Bandingkan *Api Rakjat*, "Kertalegawa Trompet Kaum Kapitalis Belanda", 5 Mei 1947, "Tariklah Semua Tentara Belanda, Tepatilah Linggajati", 12 Mei 1947.
 12. Lihat Laporan Residen Klaassen tanggal 27–12–1946 dalam van der wal, *op. cit.*, 6, hal. 676.
 13. Lihat van der Wal, *Officiele Bescheiden Betreffence de Nderlands–Indonesische Betrekkingen 1945–1950*, 's–Gravenhage: Martinus Nujhoff, 1979, 8, hal. 526. Cf. Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1959*, Jakarta : Grafiti, 1990, hal. 139.
 14. Junaedi, *op. cit.*, hal. 45, Lihat juga Kusnadi Hermawan Sukinda, "Negara Pasundan", Skrepsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1986, hal. 28; Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat, *hal. 150*.
 15. Junaedi, *op. cit.*, hal. 46.
 16. Cribb, *op.cit.*, hal. 139.
 17. *Ibid.*, hal. 140.
 18. Lihat reaksi Menteri Dalam Negeri RI Mr. Moh. Roem sebelum proklamasi itu sendiri dilakukan, dalam *Het Dagblad*, 1 Mei 1947, yang tidak bisa mentolerir gerakan separatis

- dengan mendirikan negara tersendiri, dikutip van der Wal, *op. cit.*, 8, hal. 527.
19. Junaedi, *op. cit.*, hal. Hal. 14. Vide van der wal, *op. cit.*, 6, hal. 672.
 20. Lihat Nasution, *op. cit.*, 7, hal. 159. Cf. Cribb, *op.cit.*, hal. 140. Juga lihat P.J. Drooglever dan M.J.B. Schouten, *Officiële Bescheiden Betreffende De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945–1950*, 1985, 12, hal. 348.
 21. Cribb, *op. cit.*, hal. 140.
 22. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*, Jakarta : IDKD, 1980/1981, hal. 150–151.
 23. *Ibid.*, hal. 150–1951; Junaedi, *op.cit.*, hal. 48; Api Rakjat, 5 Mei 1947.
 24. Kecuali disebutkan lain, maka uraian ini bersumber dari J.M.A. Tuhuteru, *Riwajat Singkat Berdirinja Negara Pasundan*, Djakarta: Djawatan Penerangan Pemerintah.
 25. Drooglever & Schouten, *op.cit.*, 1988, 12, hal. 478–479.
 26. Nasution, *op.cit.*, 7, hal. 155.
 27. *Ibid.*, hal. 155–157.
 28. *Ibid.*, hal. 157–158.
 27. *Ibid.*, hal. 158.
 30. *Ibid.*
 51. *Ibid.* , hal. 159. Cf. Drooglever & Schouten, *op.cit.*, 12, hal. 348.
 32. *Ibid.*, hal. 163–165.
 33. *Risalah Tahunan Parlemen Pasundan*, hal. 14; CV. Tuhueru, *op. cit.*, hal. 16.
 34. Nasution, *op.cit.*, hal 160–161. Cf. Tuhuteru, *op.cit.*, hal 16–17; *Risalah Tahunan Parlemen Pasundan*, hal. 14.
 35. Lihat Tuheteru, *op.cit.*, hal. 17; Cv. *Parlemen Pasundan Setahun*, hal. 17–21. Vide Cribb, *op.cit.*, hal 176.
 36. Cribb, *op.cit.*, hal 176–177.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA PASUNDAN

3.1 Negara dan Parlemen Pasundan

Pada bab sebelumnya telah dibicarakan bahwa proses lahirnya Negara Pasundan itu ialah melalui konferensi-konferensi. Pertama, Konferensi Jawa Barat I (12 -- 19 Oktober 1940,7), kedua, Konferensi Jawa Barat III (23 Februari -- 5 Maret 1948).¹

Ketiga konferensi yang diadakan berturut-turut itu adalah hasil rekayasa Belanda, terutama konferensi Jawa Barat III adalah atas prakarsa Pemerintah Federal Sementara di Jakarta yang disebut Pemerintah Umum. Pemerintah Federal Sementara itu dibentuk 13 Januari 1948,² tanpa persetujuan Republik Indonesia. Pemerintahan ini dimaksudkan sebagai pemerintah peralihan yang mempersiapkan pembentukan RIS. Pada hakekatnya Pemerintah Federal Sementara adalah suatu bentuk pemerintah kolonial baru karena diketuai oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook dan R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo selaku *staatssecretaris* (sekretaris negara) yang memimpin apa yang disebut Urusan Umum.³ Melalui *Recomba* (gubernur) Jawa Barat, konferensi mengusulkan kepada Urusan Umum dan disetujui segera pada hari yang sama pada 26 Februari 1948 oleh van Mook, pembentukan Negara Jawa Barat, dan konferensi Jawa Barat III itu sendiri diputuskan menjadi Parlemen

yang disebut Badan Perwakilan Rakyat Sementara Jawa Barat. Sebagai ketua Parlemen Sementara dipilih R.Tg. Juwarsa,⁴ dan masing-masing sebagai wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III adalah : R.S. Suradiraja, R. Panji Sunario, dan Drs. Tan Eng Oen. Juwarsa kebetulan menjadi ketua konferensi itu yang juga dalam Konferensi Jawa Barat II diangkat menjadi ketua "Panitia Persiapan Pemerintahan Sementara Negara Jawa Barat."

Dalam sidangnya 2 Maret 1948, Parlemen, atas mosi tiga orang anggotanya yaitu R.S. Suradireja, R.A. Atmadinata, dan Akhmad Atmaja mengusulka nama "Jawa Barat" menjadi "Pasundan". Pada kesempatan ini pula, Suria Kartelegawa, anggota Parlemen dan ketua PRP (Partai Rakyat Pasundan), dan pernah menjadi presiden dari Negara Pasundan yang diproklamasikannya 4 Mei 1947, menambahkan bahwa istilah "Pasundan" ini mempunyai arti historis-kultural yang amat besar bagi etnis Sunda; pada tahun 1926 pun pemerintah Hindia Belanda telah resmi menerima istilah ini.⁵ Nama "Jawa Barat" (*West Java*) adalah istilah kedudukan geografis-territorial yang diberikan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai konsekuensi untuk tetap konsisten terhadap penamaan daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikianlah mosi dengan segala penjelasannya disetujui secara aklamasi oleh Parlemen : Nama "Jawa Barat" kemudian resmi diganti menjadi "Pasundan."

Dalam Parlemen Sementara Pasundan ini terdapat sepuluh fraksi atau golongan yaitu Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, Fraksi Indonesia, Fraksi PRP, Fraksi Tengah, Fraksi IEV, Fraksi *Nederlandse Groep*, Fraksi Katolik, Golongan Cina dan Golongan Arab.⁶ Dari seluruh sepuluh fraksi hanya ada tiga besar fraksi, yaitu Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, dan Fraksi Indonesia. Meskipun demikian semua fraksi dan golongan itu sebenarnya menunjukkan dan mewakili sikap-sikap dasar ambivalen terhadap bentuk negara federalis atau unitaris. Untuk memperoleh gambaran, di bawah ini disebutkan dasar dan/atau tujuan dari beberapa fraksi sebagai berikut :

Fraksi Indonesia mempunyai dasar-dasar :

- (1) Indonesia merdeka, berdaulat, dan demokrasi
- (2) Persatuan oerah-daerah dan negara-negara seluruh Indonesia
- (3) Kewarganegaraan Indonesia atas hak-hak yang sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan bangsa, agama, dan budaya (*cultuur*)

Tujuan Fraksi Indonesia :

- (a) mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan lain-lain kepentingan dari seluruh Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya,
- (b) mempertahankan persatuan seluruh Indonesia dan mencegah segala yang dapat menimbulkan kemungkinan untuk perpecahan di Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya,
- (c) mempertahankan kepentingan Jawa Barat dalam arti seluas-luasnya sebagai satu bagian dari Indonesia.

Tujuan Fraksi Nasional :

- (a) kemerdekaan seluruh Indonesia,
- (b) demokratis (kerakyatan),
- (c) kultural,
- (d) nasional,
- (e) federal dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat.

Tujuan Fraksi Kesatuan :

- (a) mempertahankan kemerdekaan seluruh Indonesia dengan jalan *Federatie*,
- (b) mempertinggi derajat dan mempertahankan hak rakyat umumnya dan buruh khususnya,
- (c) berusaha untuk kemajuan Nusa oan Bangsa berdasar atas kenyataan (*realiteit*),
- (d) kerjasama dengan semoa golongan.

Tujuan Fraksi Tengah :

Indonesia merdeka dan berdaulat dalam corak *federatie* atas dasar *realiteit* bekerjasama dengan fraksi lain dan ikut serta dalam pembangunan Negara Pasundan

Tujuan Fraksi PRP :

Mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka dan berdaulat dan berdasarkan demikrasi (kerakyatan) dalam ikatan *federatie* dan masuknya Negara Pasundan sebagai negara (bukan sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera) dari Negara Indonesia Serikat dan sementara waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, fraksi-fraksi itu ada yang mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai nama maupun jumlah anggota. Fraksi Nasional misalnya, mengubah namanya menjadi Parki (Partai Kebangsaan Indonesia) dan jumlah anggotanya dari 15 menjadi 21 orang; Fraksi Indonesia dari 34 menjadi 22 orang. Lalu muncul juga fraksi baru yaitu Fraksi Demokrasi, pecahan dari Fraksi Indonesia.⁸ Selanjutnya di antara fraksi-fraksi yang sepaham saling mengadakan pendekatan, misalnya yang berpaham kebangsaan dalam arti luas membentuk Front Nasional.⁹ Sementara itu Fraksi Tengah di bawah pimpinan Juwarsa diubah namanya menjadi Fraksi Sunda yang mempunyai tujuan :

- (1) mengokohkan serta memelihara kemerdekaan Pasundan supaya menjadi nyata dan bukti untuk mereka yang berdiam dalam daerah Negara Pasundan,
- (2) memelihara dan membangunkan Agama Islam beserta keSundaan dengan kebudayaannya memakai arti turut dengan kemajuan zaman,
- (3) membela dan berusaha untuk kepentingan masyarakat yang termasuk dalam Negara Pasundan supaya hidup aman dan makmur,
- (4) mengusahakan sekuat tenaga supaya Negara Pasundan dalam lingkungan Indonesia Serikat merupakan negara yang mempunyai kekuasaan serta dapat mewujudkan negara yang cukup kuat,
- (5) berusaha bekerja bersama dengan aliran-aliran dari negara-negara dan daerah-daerah yang mempunyai kemauan mewujudkan Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, serta saling menghormati dan saling menghargai.¹⁰

Oleh pimpinannya yaitu Suria Kartalegawa, akhirnya Fraksi PRP diganti namanya menjadi Partai Rakyat Demokrasi Indonesia (Pardi). Menurut Suria Kartalegawa, anjuran PRP untuk mendirikan Negara Pasundan telah berhasil; oleh sebab itu selanjutnya "perlu berpandangan politik yang lebih luas menuju Republik Indonesia Serikat dan akan terus menentang sisa-sisa stlesel kolonial yang masih ada."¹¹

3.2 Pemilihan Wali Negara

Dalam sidang Parlemen Negara Pasundan 4 Maret 1948 diadakan pemilihan wali negara yang akan menjabat sebagai kepala negara Pasundan. Ada dua calon yang ditampilkan, yaitu *pertama*, RAAM. Wiranatakusumah, ketika itu sedang menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung RI yang berkedudukan di Yogyakarta, dan *kedua*, ialah RAA. Hilman Jayadiningrat, *recomba* Jawa Barat.¹² Akhirnya setelah melalui pemungutan suara sampai tiga kali, Wiranatakusumah yang terpilih.¹³

Sehubungan dengan pemilihan Wiranatakusumah itu, Ketua Parlemen Negara Pasundan Juwarsa, melalui radio menyiarkan berita hasil pemilihan itu kepada Wiranatakusumah di Yogyakarta. Wiranatakusumah diberi waktu satu minggu untuk menyatakan sikapnya, bersedia atau tidak menerima pengangkatannya sebagai wali negara. Jika bersedia maka suatu utusan yang terdiri atas tiga orang, yaitu R. Suradireja, R. Adil Puradireja, dan Mr. Thung Jie Leh akan datang menjemput dengan pesawat terbang ke Yogyakarta.¹⁴ Rupanya atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia, Wiranatakusumah menyatakan kesediaannya.

Wiranatakusumah sebenarnya adalah seorang Republikan. Ia berasal dari keluarga aristokrat (menak) Sunda terkemuka dari Garut, bahkan ada yang mengaitkannya sebagai keturunan raja-raja Pajajaran.¹⁵ Nama lengkapnya Raden Ario Adipati Mukharam Wiranatakusumah. Ketika diangkat menjadi wali negara, ia berusia 60 tahun. Antara tahun 1918 sampai 1926, ia menjadi bupati Bandung. Kemudian antara tahun 1926 -- 1930, ia menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat). Selama pendudukan Jepang ia kembali menjadi bupati Bandung.

Menjelang kemerdekaan ia termasuk anggota BPUPKI dan PPKI. Sesudah Proklamasi, di dalam Kabinet RI pertama ia menjadi menteri dalam negeri. Setelah itu ia diangkat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung RI di Yogyakarta. Ketika ia berlibur ke Garut, ia terkena *stroke* sehingga harus istirahat beberapa lama, tetapi sebelum agresi militer Belanda pertama, 21 Juli 1947, ia sudah kembali beberapa bulan di Yogyakarta.¹⁶ Tokoh yang dihormati oleh masyarakat Sunda ini dikenal dengan sebutan "Dalem Haji" setelah menunaikan ibadah haji dan dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Kecenderungan Islam dalam pemikiran politiknya terekam dalam sebuah buku kecil berjudul *Islamietische Democratie in Theorie en Praktijk* (Bandung: Pusaka, 1948).¹⁷

Pada umumnya keluarga besar Wiranatakusumah adalah tokoh-tokoh berjiwa Republik. Salah seorang putra Wiranatakusumah yaitu Kapten Akhmad Wiranatakusumah adalah komandan Batalyon 26 Divisi Siliwangi dari sektor pertempuran Ciwidey, sebelah barat daya Bandung sekarang letnan jenderal TNI purnawirawan). Meskipun Akhmad Wiranatakusumah adalah kemenakan bahkan kemudian menjadi menantu tokoh PRP dan "Presiden Negara Pasundan Suria Kertalegawa", namun dalam masa perjuangan itu keduanya tetap berdiri pada dua kutub yang berbeda.¹⁸ Kemudian putra tertua Wiranatakusumah, Male Wiranatakusumah, adalah bupati Bandung yang menjadi ketua Fraksi Kesatuan dalam Parlemen Pasundan. Ia termasuk salah seorang yang semula menentang perubahan status Jawa Barat dalam Konferensi Jawa Barat II. Ia menganggap bahwa wakil-wakil yang duduk dalam konferensi itu bukanlah wakil-wakil rakyat sebenarnya karena tidak dipilih secara demokratis.¹⁹

Sikap-sikap dasar dari Wiranatakusumah terhadap pembentukan Negara Jawa Barat sebenarnya dapat diketahui dari pernyataan-pernyataannya sesudah Konferensi Jawa Barat II dan sebelum Konferensi Jawa Barat III. Dalam sebuah wawancara dengan Antara 30 Desember 1947, ia berkata : "*Dalam prinsip saya tidak setuju dengan gerakan separatisme yang dilakukan Belanda sekarang ini, apalagi kalau saya memang di-*

*calonkan untuk menjadi kepala negara Jawa Barat ciptaan KIS (Komite Indonesia Serikat) (Belanda)''.*²⁰ Kemudian sebelum Konferensi Jawa Barat III diselenggarakan yang akhirnya menghasilkan terbentuknya Negara Pasundan 19 Februari 1948; jadi setelah terjadi "Hijrah" dari Jawa Barat ke Jawa Tengah 1 Februari, Wiranatakusumah telah menyatakan sikapnya terhadap usaha pemisahan antara Jawa Barat dan Pemerintah RI :

. . . Pada saat kita sekarang berpuluh ribu berkumpul di sini, semuanya saudara-saudara berasal dari Jawa Barat, maka dengan sendirinya pikiran dan hati kita bukan gembira, melainkan penuh dengan kesedihan, oleh karena banyak rakyat di Jawa Barat berkorban lahir batin. Saya tahu beribu-ribu isteri yang ditinggalkan oleh suaminya dan beribu-ribu anak-anak telah menjadi yatim.

Saya tahu beratus ribu rakyat mengalami keprihatinan, oleh karena meninggalkan kampung halamannya. Dan mereka yang berkorban, menderita dan mengungsi itu, maksudnya tiada lain daripada memperjuangkan kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudara dari Jawa Barat yang sekarang berkumpul di sini meninggalkan sawah, kebun dan pekerjaan masing-masing, meninggalkan keindahan tanah Parahiangan, menempuh jalan beratus-ratus kilometer, semata-mata ingin tetap menggap kemerdekaan dan ingin terus menjalankan perjuangan di bawah komando pusat perjuangan kemerdekaan kita, ialah RI. Berkenaan dengan keadaan perjuangan kemerdekaan di Jawa Barat sekarang ini, saya berseru kepada saudara-saudara agar tetap memegang persatuan, antara saudara-saudara sendiri yang berasal dari Jawa Barat dan antara saudara-saudara dan penduduk lain bagian Tanah Air Indonesia.

Kepada rakyat yang ada di Jawa Barat saya ingin menyampaikan amanat saya demikian, pihak lain sekarang sedang menggerakkan usaha supaya Jawa Barat dapat terpisah dari rakyat Indonesia lainnya. Apapun yang akan terjadi di Jawa Barat, peganglah teguh iman dan keyakinanmu, bahwa rakyat di Indonesia lainnya. Bahwa rakyat di Jawa Barat tidak akan dapat diadukan dengan Republik. Peganglah teguh kunci persatuan yang disabdakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersatulah kamu, jangan berselisih bercerai-cerai. . .²¹

Selain Wiranatakusumah, di Yogyakarta ketika itu terdapat juga sejumlah tokoh Sunda lain yang berjiwa Republik. Beberapa tokoh Paguyuban Pasundan seperti Mohammad Enokh (Wali Kota Yogyakarta Mr. Dr. Kusumaatmaja (ketua Mah-

kamah Agung), Ir. Juanda (menteri perhubungan), Ny. Emma Puradireja (tokoh wanita dan kakak perempuan Adil Puradireja), Kartajumena, dan Jerman Prawiradinata, semuanya menginginkan Jawa Barat tetap sebagai bagian otonom dari negara kesatuan Republik Indonesia.^{2 2}

Selanjutnya sehubungan dengan pengangkatannya sebagai wali negara, Wiranatakusumah berkonsultasi lebih daulu dengan presiden dan wakil persiden RI. Meskipun tidak tertulis, rupanya atas persetujuan mereka, Wiranatakusumah menerima pengangkatan itu dan meletakkan jabatannya sebagai ketua DPA RI. Dalam suatu pernyataan kepada Antara ia mengatakan :

Sesungguhnya dalam prinsip saya tidak setuju dengan perceraian Jawa Barat dengan Republik, oleh karena semenjak permulaan saya bersifat Republik, saya bersedia menerima pengangkatan itu. Saya percaya bahwa Pemerintah Republik tidak akan memajukan keberatan-keberatan, oleh karena jika saya berada di sana, lebih besarlah ketika saya untuk bekerja bagi Nusa dan Bangsa daripada apa yang saya dapat mempertunjuk di hari-hari lampau. . .²³

Tampaknya salah satu faktor yang menjadi pertimbangan juga bagi Wiranatakusumah untuk menerima pengangkatan itu ialah, dari pada jabatan itu jatuh ke tangan orang yang pro-Belanda lebih baik dipegang oleh seorang yang pada dasarnya pro-Republik.²⁴ Pendirian ini tentu saja dengan harapan ideal bahwa Wiranatakusumah akan bisa berbuat lebih banyak untuk Republik di Jawa Barat dari pada jika ia masih berada di ibu kota Republik Yogyakarta. Komentar kemudian dari pihak Republik sendiri sehubungan dengan pengangkatannya itu dapat diketahui dari wawancara Menteri Agama Kiai H. Masykur dalam surat kabar *Sin Po*, 18 April 1948 :

Dalam *interview speciaal* mantri agama Maskoer, menjatakan bahoea pembesar-pembesar Repoeblik berpendapat perginja Wiranatakoesoemah dari Djogja ada kemenangan bagi Repoeblik . . . Maskoer menegaskan bahoea soeal Wiranatakoesoemah belon perna diperbintjangkan dengan resmi dengan kabinet dan persidangan-persidangan resmi Pamerentah, tetapi tiap pembesari jang berpengaroeh menjatakan kewadajibannya di Pasoendan sebagaimana dia melakoekan dharmanja

terhadap Repoeblik. Wiranatakoesoemah adalah pembesar jang sebelum dan sesoedahnja Repoeblik diproklameerkan tetap mengikoetin *continuiteit* politik Repoeblik dan senantiasa mempoenjai kedoeodoekan penting.²⁵

Pada 19 Maret 1948 Wiranatakusumah terbang ke Bandung dengan pesawat yang disediakan oleh Belanda. Di Bandung, di jalan-jalan yan dilaluinya, ia disambut oleh pelajar-pelajar yang sengaja dikerahkan untuk itu. Di luar dugaan sambutan yang meriah disertai pekik "merdeka" membuat Belanda kemudian menangkap beberapa orang guru dan pelajar yang dianggap bertanggung jawab atas seruan-seruan itu.²⁶ Selanjutnya untuk calon wali negara itu disediakan sebuah villa bernama "Eldorado" di Ciumbuleuit. Ternyata di sini ia mendapat pengawasan ketat dari Belanda dan diperlukan suatu izin khusus untuk dapat menemuinya. Setelah sebulan lebih di Bandung, baru pada 24 April 1948 Wiranatakusumah dilantik resmi sebagai wali negara oleh Dr. H.J. van Mook. Pada waktu pelantikan hadir juga Sekretaris Umum (Negara) Pemerintah Federal Sementara Abdul Kadir Wijoyoatmojo dan *Recomba* Jawa Barat Hilman Jayadiningrat. Dalam kesempatan ini Abdul Kadir membacakan Surat Keputusan No. 1 mengenai pengakuan terhadap Negara Pasundan terhitung mulai 23 April 1948.²⁷ Sehubungan dengan pelantikan ini, wali negara mengucapkan pidatonya dalam bahasa Sunda :

Sakumna ra'yat Pasundan, teu pilih bangsa jeung agama, geura prak saringkil, sing age-age digarawe babarengan kalawan kajujuran keur kaamanan, kama'muran nagara urang, nagara Pasundan. Disimpay ku tatali Gusti ulah paturay paburencay wa'tasimu bihabillah, jaman wala tafaraqu. Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.²⁸ [Seluruh rakyat Pasundan, dengan tidak membedakan bangsa dan agama, bersiaplah bersungguh-sungguhlah bekerjasama disertai kejujuran untuk keamanan, kemakmuran negara kita, negara Pasundan. Diikat dengan ikatan Tuhan janganlah bercerai-cerai wa'tasimu bihabillah, jaman wala tafaraqu. Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh].

3.3 Pembentukan Kabinet Negara Pasundan

Sebenarnya, susunan kenegaraan Pasundan telah dibuat sebelum terbentuknya Negara, Parlemen, Kabinet, dan pemilihan

an wali Negara Pasundan. Rancangan susunan kenegaraan telah disusun oleh Panitia Persiapan dan para ahli hukum dari Pemerintah Federal Sementara di Jakarta. Menurut rancangan, corak dan bentuk negara yang dipilih adalah menurut model Amerika Serikat. Pilihan ini mungkin dalam kerangka proyeksi ke Negara Indonesia Serikat kelak. Akan tetapi setelah rancangan ini dibicarakan dalam sidang Parlemen 2 Maret 1948, corak dan bentuk Serikat ditolak. Parlemen Pasundan memilih pemerintahan menurut model kontinental Eropa Barat, yaitu parlemen di mana Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Adapun yang menjadi keberatan terhadap model Amerika Serikat ialah pemerintahan presidensial di mana kekuasaan presiden, dalam hal ini wali negara, akan terlalu besar. Sementara itu susunan pemerintahan dianggap "kurang demokratis" karena hanya "75% yang dipilih."²⁹

Sehubungan dengan pilihan terhadap sistem parlementer itu, setelah Parlemen Pasundan dan wali negara tersedia, perlu disusun sebuah kabinet. Tiga fraksi besar dalam Parlemen dengan masing-masing ketuanya yaitu: R. Adil Puradireja dari Fraksi Indonesia, Suradireja dari Fraksi Nasional, dan Male Wiranatakusumah dari Fraksi Kesatuan bersama-sama memilih Mr. Dr. Kusumaatmaja, seorang putra Jawa Barat yang menjadi ketua Mahkamah Agung RI, untuk menyusun sebuah kabinet. Seorang utusan, Suyono, dikirim ke Yogyakarta untuk menjumpai dan menanyakan kesediaan Kusumaatmaja, tetapi tokoh ini menolaknya dengan menyatakan :

Berhubung dengan pendirian saya sebagai Ketua Komite Perjuangan Jawa Barat terhadap pembentukan negara Pasundan dan mengingat penyelesaian soal Indonesia-Belanda yang akan datang dan perundingan berdasarkan persetujuan Renville dengan perantaraan KTN, maka dengan menyesal saya menolak tawaran untuk menjadi formatur kabinet negara Pasundan, karena pembentukan negara tersebut adalah pelanggaran atas persetujuan Renville dan tidak berdasarkan atas kemauan dan suara rakyat yang bebas dan merdeka. . .³⁰

Akhirnya Parlemen menunjuk R. Adil Puradireja sebagai formatur kabinet dan pada 8 Mei 1948 ia berhasil membentuk Kabinet Pasundan pertama. Adil Puradireja adalah seorang wartawan Sunda yang berjiwa Republik, adik tokoh wanita

Ny. Emma Puradiereja.^{3 1} Pengangkatannya sebagai perdana menteri Pasundan ini merupakan kemenangan tidak saja bagi Fraksi Indonesia tetapi juga bagi elemen pro-Republik dalam tubuh Parlemen Pasundan.

Adapun susunan anggota Kabinet Pasundan pertama ini ialah sebagai berikut :

1. R. Adil Puradireja : perdana menteri merangkap menteri dalam negeri
2. Dendakusumah : menteri kemakmuran
3. Yudakusumah : menteri pendidikan
4. P.J. Gerke : menteri keuangan
5. Tan Hwat Tiong : menteri lalu-lintas dan pengairan.
6. Bunyamin : menteri sosial^{3 2}

Pada 13 Mei 1948, untuk pertama kalinya Adil Puradireja mengucapkan pidato (*regeringsverklaring*) selaku perdana menteri di muka sidang Parlemen Pasundan. Pada kesempatan ini ia menyampaikan dasar-dasar politik program kabinetnya sebagai berikut:

1. Memajukan perdjoangan kearah Indonesia Serikat jang merdeka, jang akan berdiri sebagai persatuan Negara-negara bagian.
2. Memberi hak-hak jang sama kepada semua warga negara dengan tidak mengingatkan perbedaan bangsa, agama, dan cultuur.
3. Mengakui dan melindungi hak-hak minoriteiten.

Mengenai tugas pemerintah ke dalam adalah:

1. Kembalikanja keamanan dan ketertiban umum, dan hilangnya (sebagai gevolg) [sebagai lanjutannya] Staat van Oorlog en Beleg [SOB, keadaan darurat perang].
2. Penjelenggaraan hak-hak negara, sebagai:
 - a. kemerdekaan berpikir dan berbitjara, jang tidak dipengaruhi oleh badan-badan resmi, asal tidak melanggar peraturan-peraturan hukum
 - b. mengakui dan melindungi hak-hak manusia (*democratische beginsel*) pada umumnja dan hak-hak golongan jang ketjil (*minoriteit*) pada khususnja.
 - c. memberi kesempatan jang sama kepada segala warga negara, sehingga dapat terhindar, bahwa segolongan atau terbanjak dari rakjat seolah-olah ditakdirkan menuntut kehidupan jang serba kekurangan, serba susah dan serba tidak lengkap,

sedangkan, kemakmuran benda dan jiwa menjadi warisan bersama dari umat manusia.

Dalam masa pemerintahan Kabinet pertama ini, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Pada 29 Mei 1948, diselenggarakan Konferensi Federal pertama di Bandung yang dipimpin oleh Perdana Menteri Adil Puradireja. Konferensi yang dihadiri oleh utusan-utusan dari negara-negara bagian yang telah dibentuk oleh Belanda menghasilkan pembentukan apa disebut BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), suatu badan kerjasama dari negara-negara bagian dalam persiapan untuk menjadi bentuk federasi. Konferensi ini disusul dengan Konferensi Federal kedua 12 Juli 1948, yang menghasilkan "Resolusi Bandung" yang isinya: NIS (Negara Indonesia Serikat) harus sudah berdiri 1 Januari 1949 dan juga pemerintahan *ad interim* federal.

Kabinet Puradireja hanya dapat berlangsung enam bulan lebih. Ketika terjadi aksi militer Belanda kedua yaitu dengan penyerbuan Belanda ke Yogyakarta dan menangkap presiden dan wakil presiden serta sejumlah pemimpin-pemimpin Republik lainnya pada 19 Desember 1948, Puradireja tidak saja meletakkan jabatannya sebagai pernyataan protes, tetapi juga secara terbuka mengutuk agresi Belanda itu. Aksi serupa ternyata dilakukan juga oleh Perdana Menteri Negara Indonesia Timur Mr. Anak Agung Gde Agung yang juga membubarkan diri karena protes. Bagi Adil Puradireja, tindakannya itu adalah sejalan dengan sikap mayoritas anggota Parlemen Pasundan yang pro-Republik sehingga mengesalkan pejabat-pejabat Belanda di Jakarta dan Den Haag. Akibatnya Belanda kemudian semakin memperkuat dan memperketat campurtangannya dalam kehidupan politik Negara Pasundan.

Tindakan Adil Puradireja yang membuat Negara Pasundan mengalami kevakuman pemerintahan itu waktunya kebetulan bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees ke Indonesia. Maksud kedatangannya yang secara luas diumumkan ke dunia internasional adalah untuk berbicara dengan wakil-wakil dari negara-negara bagian mengenai rencana pembentukan suatu pemerintah federal Indonesia interim. Ternyata bahwa dua negara bagian andalan Belanda yaitu Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur tidak dapat mengirimkan

wakil-wakilnya ke konferensi federal di Jakarta itu karena kedua-duanya tidak mempunyai pemerintahan. Keadaan ini tentu saja menyulitkan dan menyudutkan pejabat-pejabat kolonial Belanda di Indonesia yang sudah mempersiapkan konferensi itu. Oleh sebab itu mereka kembali campur tangan di Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan. Ternyata kemudian, jika Belanda dapat menekan anggota parlemen Negara Indonesia Timur untuk segera membentuk sebuah kabinet baru yang dipimpin kembali oleh Anak Agung, maka Adil Puradireja dan mayoritas Parlemen Pasundan menolak untuk membentuk kabinet baru buat Negara Pasundan. "Pembangkangan" ini mendorong Letnan Jenderal Simon Spoor dan Dr. R.W. van Diffe- len, masing-masing sebagai panglima Tentara Belanda untuk Indonesia dan komisioner mahkota Belanda untuk Negara Pasundan, campur tangan langsung. Mereka mendatangi Wali Negara Wiranatakusuma dan menuntut padanya agar segera menunjuk seorang formatur kabinet baru sehingga sebuah pemerintah baru terbentuk cepat.

Karena tekanan itu akhirnya Wiranatakusumah menunjuk salah seorang anggota Parlemen Pasundan non-partai untuk menjadi pembentuk kabinet yaitu Mr. R.T. Jumhana Wiriaat-maja. Kelemahan yang ditunjukkan oleh wali negara dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda, menurut George Mc. Turnan Kahin yang menjadi jurnalis dan pengamat politik pada periode itu, mungkin berasal dari kondisi kesehatannya. Wiranatakusumah terkena stroke sehingga ia tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya secara penuh.

Sementara itu bersamaan waktunya dengan aksi militer Belanda ini, *long march* mulai dilakukan oleh Divisi Siliwangi yang meninggalkan Jawa Tengah untuk kembali dan meneruskan perjuangan di Jawa Barat. Ini merupakan babak berikut dari perjuangan TNI ketika di Jawa Barat telah berdiri sebuah negara federal.

Kembali ke Negara Pasundan, dalam menyusun kabinet baru, Jumhana menampilkan beberapa program yang akan menjadi dasar kerja kabinet:

- (1) rehabilitasi Republik Indonesia seperti pada 18 Desember 1948 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta;

- (2) pembentukan segera suatu pemerintahan interim dalam mana Republik Indonesia termasuk,
- (3) melanjutkan perundingan-perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan PBB.
- (4) perwakilan dari setiap negara bagian (termasuk Republik Indonesia) menurut jumlah penduduknya.

Dengan program ini Jumhana berhasil mendapatkan dukungan mayoritas Parlemen Pasundan untuk kabinetnya. Dari jumlah anggota Parlemen 93 orang, Jumhana mendapat dukungan dari kelompok-kelompok fraksi: Kesatuan (14 orang), Nasional (12 orang), Tengah (8 orang), kelompok Eurasia ((8 orang). Adapun fraksi Indonesia yang terbesar (30 orang) yang keras pro-Republik menolak duduk dalam kabinet Jumhana tetapi mendukung program kabinetnya. Umumnya Fraksi Nasional dan Fraksi Persatuan anggota-anggotanya adalah para pegawai yang menerima gaji dari Jakarta.³⁷

Perlu diketahui, bahwa semula Jumhana mengusulkan personalia kabinetnya sebagai berikut:

1. Mr. Jumhana Wiriaatmaja : perdana menteri
2. M. Sewaka : menteri dalam negeri
3. P.J. Gerke : menteri keuangan
4. Dr. Maskawan : menteri kesehatan
5. R.S. Suradireja : menteri kemakmuran
6. Mr. Maria Ulfah Santoso : menteri sosial
7. Mr. Tirtawinata : menteri kehakiman
8. Ir. Abdul Karim : menteri pembangunan
9. Ir. Tan Hwat Tiang : menteri perhubungan
10. Ir. Ukar Bratakusumah : menteri pendidikan
11. R. Oto Kusumasubrata : menteri negara
12. M.S. Yudawinata : menteri negara³⁸

Akan tetapi ternyata kemudian bahwa tiga orang yang diusulkan dalam kabinetnya itu menolak yaitu Sewaka, Ukar Bratakusumah, dan Maria Ulfah. Sewaka adalah pejabat gubernur Jawa Barat dari pemerintahan Republik, sedangkan Ukar Bratakusumah dan Maria berdiam di Yogyakarta. Mereka adalah tokoh-tokoh Jawa Barat yang berjiwa Republik.

Akhirnya kabinet Pasundan kedua terbentuk juga dengan susunan sebagai berikut:

1. Mr. Jumhana Wiriaatmaja : perdana menteri
2. R. Adil Puradireja : wakil perdana menteri, merangkap menteri sosial
3. Mr. R.S. Dwijosewoyo : menteri kehakiman
4. P.J. Gerke : menteri keuangan
5. M.S. Yudawinata : menteri pengajaran dan agama
6. Mr. R. Ma'mun Sumadipraja: menteri dalam negeri
7. Mr. R.A. Kartajumena : menteri kemakmuran
8. Ir. Tan Hwat Tiang : menteri perhubungan dan pengairan, merangkap menteri kesehatan ³⁹

Sesudah kabinet baru terbentuk, Jumhana segera berangkat ke Jakarta untuk mengikuti konferensi federal yang dihadiri oleh program kabinetnya tidak bisa diterima oleh Belanda karena sifat "anti-Belanda"nya yang kuat. Jumhana menolak tuntutan Belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan, akan tetapi ia bersedia ikut bersama empat orang wakil lain dari negara federal (BFO) dukungan Belanda untuk berangkat ke Bangka dan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Republik yang sedang ditahan setelah agresi Belanda kedua itu. Ini menimbulkan protes keras dari para anggota Parlemen Pasundan yang telah mendukung Jumhana atas dasar program kabinetnya yang pro-Republik yaitu Fraksi Indonesia. Fraksi ini telah mendukung program Jumhana meskipun mula-mula menolak untuk duduk dalam kabinet sebagai taktik untuk sedapat mungkin memperlambat pembentukan sebuah kabinet baru. Mereka menganggap bahwa tindakan ikut dalam rombongan itu akan memasukkannya dalam perangkap Belanda untuk menekan para pemimpin Republik yang sedang ditahan Belanda dan karenanya dapat menyimpang dari program kabinet semula. Oleh sebab itu segera timbul rencana untuk mengajukan mosi tidak percaya dalam Parlemen Pasundan. Menyadari akan hal ini dan berang karena program dasar kabinet Jumhana telah diumumkan, Belanda bertindak keras dan cepat.⁴⁰

L.J.M. Beel yang menjadi komisaris tinggi mahkota Belanda untuk Indonesia menyurati Wiranatakusumah yang isinya mengingatkan bahwa jika program kabinet Jumhana itu tidak diganti, maka pemerintah Pasundan akan dibubarkan dan diganti dengan suatu pemerintahan militer yang ketat. Untuk lebih menegaskan lagi sikap Belanda ini, maka dikirim Mayor Jenderal Engels dan Dr. van Diffelen untuk menemui sendiri wali negara itu. Engels adalah panglima daerah dan pasukan Belanda di Jawa Barat yang berbicara atas nama Panglima Tinggi Belanda Jenderal Spoor, sedangkan Van Diffelen berbicara atas nama pemerintah Hindia Belanda (NEI). Pada kesempatan ini kedua pejabat Belanda itu dengan keras mengatakan bahwa jika program Kabinet Pasundan itu tidak diubah, maka sejumlah anggota pemerintahannya akan ditangkap. Untuk menunjukkan kesungguhan mereka, maka kepada Wiranatakusumah ditunjukkan sebuah daftar yang memuat sebagian nama-nama yang akan ditangkap. Di antaranya ialah Male Wiranatakusumah, putera tertua wali negara sendiri yang menjadi bupati Bandung dan pemimpin Fraksi Kesatuan dalam Parlemen Pasundan; Adil Puradireja, seorang anggota Parlemen dan mantan perdana menteri; Mr. Hasan, anggota Parlemen dan seorang pemimpin fraksi Indonesia yang pro-Republik; Mr. Kosasih, sekretaris Negara Pasundan; Makmun Sumadipraja, sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri Pasundan; dan Wirasupena. Kemudian keduanya menambahkan lagi bahwa masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang pro-Republik lain yang akan ditangkap jika tetap membangkang pada tuntutan Belanda itu.⁴¹

Mungkin di luar dugaan Belanda, Wiranatakusumah menjawab, jika semua orang-orang ini ditangkap, ia mengancam akan meletakkan jabatannya sebagai wali negara. Oleh karena itu, lebih-lebih menghadapi pembangkangan terus terhadap tuntutan-tuntutan Belanda, maka yang ditangkap hanya lima orang saja, itu pun bukan nama-nama yang telah disebut di atas. Kelima orang itu ialah Suyoso, seorang anggota Parlemen dan ketua Fraksi Indonesia yang pro-Republik; Mohammad Enokh, Dr. Suratman Erwin, dan Gondokusumo, ketiganya adalah anggota Parlemen yang pro-Republik Indonesia; dan Ating,

komisaris tinggi polisi Pasundan. Peristiwa penangkapan oleh penguasa militer Belanda di Bandung ini terjadi pada 14 Januari 1949, ketika kebetulan wali negara sedang melakukan peninjauan keliling di luar Bandung dan Perdana Menteri Jumhana sedang berada di Bangka.⁴²

Penangkapan-penangkapan itu telah mengintimidasi para anggota kabinet dan Parlemen. Mereka yakin bahwa semakin lama membangkang terhadap tuntutan Belanda untuk merombak program kabinet akan menyebabkan terjadinya penangkapan-penangkapan baru. Maka pada malam 15 Januari 1949, empat orang anggota kabinet yang berada di Bandung mengadakan rapat dan mereka memutuskan untuk mundur secara perorangan dari kabinet, tetapi Wiranatakusumah menolak pengunduran diri mereka itu. Jumhana yang baru pulang keesokan harinya, berhasil menunda pengunduran diri mereka itu sekitar satu minggu. Alasan-alasan Jumhana mengenai sebab-sebab anggota kabinetnya mundur ditentang oleh Mayor Jenderal Engels yang kembali turut campur dalam situasi politik negara Pasundan itu. Engels secara tegas dan terbuka membuat pernyataan yang oleh para anggota kabinet dirasakan sebagai ditujukan kepada mereka.

Pengaruh-pengaruh kembali giat lagi, terutama pada hari-hari terakhir ini, yang telah membahayakan ketertiban, perdamaian, dan keamanan di Pasundan sampai sedemikian rupa sehingga saya, selaku Panglima Daerah dan Pasukan di Jawa Barat yang ditugaskan dengan kekuasaan militer dengan menyesal tetapi terpaksa memerintahkan beberapa penangkapan.

Untuk rakyat, perdamaian, ketertiban dan keamanan harus dijamin dan *saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan-tindakan yang lebih keras terhadap siapapun yang menghalang-halangi pelaksanaan tugas saya.*⁴³

Segera setelah itu keempat menteri tadi mengundurkan diri. Dengan hanya dua menteri yang tersisa, Jumhana mencoba dengan sia-sia selama seminggu untuk menyusun kembali kabinetnya dan pada 28 Januari 1949 akhirnya ia mengundurkan diri. Fraksi Indonesia yang telah menolak mendukung kabinetnya sebelumnya, kini tampil dan menawarkan dukungannya,

tetapi jumlah pendukung-pendukung sebelumnya dalam Parlemen yang tetap ingin tinggal di belakangnya tidak cukup untuk memberikan kepadanya suatu mayoritas suara, meskipun dengan dukungan Fraksi Indonesia sekalipun.⁴⁴

Politik intimidasi Belanda ternyata telah berhasil. Satu-satunya cara bagi Jumhana untuk membentuk suatu kabinet baru ialah dengan menghapuskan program kabinetnya yang lama dan menggantikannya dengan suatu program yang sangat lunak. Program pemerintahan baru yang dibentuknya pada awal Februari menyebutkan pembentukan segera sebuah Negara Indonesia berbentuk federal yang berdaulat dan merdeka dan pembentukan suatu pemerintahan interim di mana Republik Indonesia ikut serta di dalamnya. Belanda mungkin menyadari adanya kesejajaran program ini dengan program sebelumnya. Meskipun demikian mereka yakin akan dapat memberikan tekanan-tekanan kepada Jumhana dan kabinetnya sehingga tidak dapat melaksanakan programnya itu dengan efektif. Pada gilirannya walaupun mendapat tekanan-tekanan Belanda, Jumhana bertekad untuk melaksanakan program kabinetnya.⁴⁵

Pada masa pemerintahan kabinet Jumhana, sejak Februari 1949 terjadi beberapa peristiwa penting dalam hubungan antara Negara Pasundan dengan Belanda, dan dalam hubungan antara Republik Indonesia dengan Belanda, dan dalam hubungan antara Republik Indonesia sendiri dengan Negara Pasundan.

Pada 7 Mei 1949 tercapai persetujuan "Roem-Royen". Pada 6 Juli 1949, ketika Presiden Soekarno dan wakil presiden RI kembali dari pengasingan mereka di Bangka ke Yogyakarta, mereka mendapat kawat ucapan selamat dari ketua Parki dan Ketua Parlemen Negara Pasundan R.S. Suradireja. Kemudian antara 19 -- 22 Juli 1949 diadakan Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta dan antara 30 Juli -- 2 Agustus di Jakarta, yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dan wakil-wakil dari BFO, termasuk dari Negara Pasundan. Yang dibahas ialah bagaimana agar terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan segera diadakan di Den Haag bulan Agustus 1949.⁴⁶

Sementara itu pada 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan "Negara Islam Indonesia" di Jawa Barat.⁴⁷ Ini merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Negara Pasundan.

Antara 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan KMB di Den Haag, yang diwakili oleh delegasi-delegasi Indonesia dan BFO, termasuk dalamnya juga wakil-wakil dari Negara Pasundan.⁴⁸

Sementara itu pada 27 Oktober 1949 berhasil disusun konsep Konstitusi RIS. Pada 14 Desember 1949 piagam Konstitusi RIS diterima. Dari Negara Pasundan, Jumhana ikut menandatangani.⁴⁹ Pada 15 Desember 1949 pemilihan presiden RIS dan dua hari kemudian yaitu 17 Desember 1949, Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden RIS.⁵⁰ Dalam waktu yang bersamaan Parlemen Pasundan mengadakan sidangnya di mana lembaga ini bersedia untuk mengundurkan diri.

Pada waktu Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949, Jumhana mundur dari kabinetnya sebagai perdana menteri. Mungkin atas usaha Wiranatakusumah, maka Anwar Cokroaminoto dari PSII diangkat sebagai perdana menteri Negara Pasundan.⁵¹ Belum jelas apa yang menjadi motivasi putera almarhum tokoh nasional HOS. Cokroaminoto ini sampai ikut dalam Kabinet Pasundan. Tampaknya tidak ada yang dapat dilakukannya pada saat-saat anti-klimaks bagi Negara Pasundan. Tragisnya setelah terjadi serangan APRA di Bandung 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh mantan Kapten Westerling, Anwar Cokroaminoto ditangkap bersama dengan tokoh PRP Suria Kertalegawa oleh Pemerintah Republik.⁵² Adapun anggota-anggota APRA terdiri atas bekas-bekas KNIL dan mereka ingin menjadi tentara dari Negara Pasundan tetapi tidak berhasil. Setelah peristiwa APRA yang gagal itu, mulailah saat-saat terakhir bagi riwayat Negara Pasundan.

3.4 Pemerintahan dalam Praktek

Negara Pasundan yang menjadikan Bandung sebagai ibu kotanya, teorinya meliputi Jawa Barat sekarang termasuk Ja-

karta. Sebagai sebuah negara yang mempunyai seorang kepala negara yang disebut wali negara, sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, sebuah parlemen yang anggotanya dipilih dan diangkat, kenyataannya tidak mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya untuk menjalankan pemerintahan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Negara yang diproyeksikan untuk menjadi salah satu bagian dari negara bagian RIS yang akan dibentuk, mendapat kontrol yang kuat dari Belanda. Pemerintah Umum di Jakarta tidak mau menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintah negara ini karena dianggap bahwa para anggota pemerintahan dan parlemennya terlalu menunjukkan sentimen pro-Republik yang kuat. Belanda tidak banyak dapat bergantung pada dukungan sejumlah anggota "oportunistik politik" yang tidak begitu berpengaruh. Itu sebabnya Negara Pasundan diberikan "otonomi yang lebih kecil" dibandingkan dengan yang diberikan Belanda kepada Negara Indonesia Timur misalnya.^{5 4}

Keadaan semacam ini tentu saja menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemerintah Negara Pasundan dan menimbulkan kecaman-kecaman dalam sidang-sidang Parlemen. Jangan dalam urusan dalam negeri, dalam urusan-urusan lain seperti keuangan, sosial, kesehatan, pendidikan, kehakiman, kehutanan, pertanian, kerajinan dan pekerjaan umum, semuanya diatur dari Jakarta. Baru pada bulan September 1948, urusan-urusan terakhir ini diserahkan satu demi satu kepada Negara Pasundan.^{5 4}

Negara Pasundan tidak mempunyai tentara sendiri. Karena wilayah Jawa Barat ditempatkan oleh Belanda di bawah SOB (*staat van oorlog en beleg*), keadaan darurat perang, maka urusan pertahanan dan keamanan dipegang sepenuhnya oleh tentara Belanda. Memang ada usaha untuk membentuk tentara sendiri yang disebut "batalyon keamanan", tetapi tidak pernah berfungsi. Demikian pula menjelang berakhirnya Negara Pasundan, sejumlah bekas anggota KNIL yang dipimpin oleh mantan Kapten Westerling memberikan ultimatum kepada RIS dan Negara Pasundan agar mereka diterima menjadi "Tentara Pasundan" dan menolak pembubaran Negara Pasundan. Akan

tetapi sebelum dijawab, Westerling yang memimpin pasukan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dari bekas-bekas anggota KNIL itu tiba-tiba menyerbu Kota Bandung serta menewaskan sejumlah anggota TNI dari Divisi Siliwangi pada 23 Januari 1950. Gerakan APRA pada akhirnya gagal ketika akan menyerbu Jakarta.^{5 5}

Wilayah Jawa Barat yang dianggap sebagai wilayah dari Negara Pasundan, selama tahun 1949 praktis terbagi menjadi tiga daerah kekuasaan: *pertama*, daerah kekuasaan Negara Pasundan sendiri yang dilindungi oleh pasukan-pasukan Belanda, *kedua*, daerah kantong-kantong gerilya yang dikuasai oleh TNI dari Divisi Siliwangi, dan *ketiga*, daerah yang dikuasai oleh DI dari "NII" Kartosuwiryo.

TNI yang kembali memasuki Jawa Barat dalam *long march* yang sulit dan menelan korban jiwa sejak agresi militer Belanda kedua bulan Desember 1948, menghadapi tidak saja tentara Belanda tetapi juga DI. Proses pertumbuhan dan perkembangan DI ini terjadi ketika TNI harus "hijrah" meninggalkan Jawa Barat pada bulan Februari 1948 sebagai konsekuensi dilaksanakannya persetujuan "Renville". Pasukan-pasukan/laskar-laskar perjuangan yang tidak mau ikut hijrah dengan alasan akan melanjutkan terus perlawanan terhadap Belanda di Jawa Barat, menggunakan "kewakuman" tentara Republik untuk kemudian menjadi inti kekuatan DI yang memproklamasikan "Negara Islam Indonesia" (NII) di bawah Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949.

Dalam situasi semacam ini terjadi interaksi yang cukup kompleks dan konflik bersenjata segi tiga di Jawa Barat : TNI dari RI melawan Belanda, Belanda melawan TNI dan DI, dan DI melawan TNI dan Belanda. Keadaan semacam ini dengan sendirinya membuat rakyat Jawa Barat (Pasundan ataupun Republik) terjepit dan menderita.

Kegiatan-kegiatan DI merupakan ancaman sekaligus bagi RI dan negara Pasundan. Negara Pasundan berada dalam posisi serba tanggung. Karena tidak mempunyai tentara sendiri, maka negara ini bersandar sepenuhnya kepada tentara Belanda dan TNI untuk melindungi warganya. Situasi semakin buruk bagi

Pasundan ketika tentara Belanda siap mundur menghadapi pengakuan kemerdekaan. Posisi-posisi tentara Belanda direbut oleh TNI yang akan menjadi inti dari tentara RIS yang akan merdeka. Kontak-kotak terjadi antara pemerintah Pasundan dengan pasukan-pasukan Siliwangi, bahkan sebelum terjadi persetujuan "Roem van Royen" bulan Mei 1949. Di bidang diplomasi internasional, sejak Januari 1949 Belanda telah ditekan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menerima resolusi atas dasar Linggajati dan "Renville". Kemudian ditambah lagi tekanan-tekanan di medan pertempuran seperti perang gerilya dan serangan umum TNI atas Yogyakarta 1 Maret 1949 yang mempunyai dampak besar bagi harga diri bangsa dan keyakinan Republik untuk tetap dapat bertahan hidup.⁵⁶

Sejak bulan Maret 1949 pemerintah Pasundan dengan persetujuan militer Belanda mencoba mendekati dua komandan batalyon Siliwangi yaitu Akhmad Wiranatakusumah dan Nasuhi untuk mengakhiri permusuhan dan membantu pengembalian ketertiban dan keamanan sehingga tercipta wilayah damai bagi Negara Pasundan. Kontak-kotak ini menunjukkan sikap tidak percaya diri yaitu mencari dukungan dari kekuatan (TNI/RI) yang tidak mendukung kedaulatannya. Menyadari ini maka Negara Pasundan harus berhati-hati juga dalam menghadapi dan membuat persetujuan dengan TNI yang potensial mengancam eksistensinya sebagai negara maupun teritorialnya.⁵⁷

Ajakan kerjasama untuk menghadapi DI bagi TNI menunjukkan kelemahan tentara Belanda yang ternyata tidak mampu mengalahkan TNI ataupun DI. Wibawa TNI meningkat karena diminta untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi mereka juga tidak terlalu antusias karena permintaan itu dalam kerangka Negara Pasundan, sedangkan mereka tidak dipersiapkan untuk mengajui Pasundan sebagai salah satu negara bagian dari RIS. Akhirnya kontak-kontak itu tidak membawa hasil bagi kedua belah pihak meskipun panglima Belanda untuk Jawa Barat Mayor Jenderal Engels telah mengeluarkan pernyataan bahwa Siliwangi telah menghentikan permusuhannya.⁵⁸

Sementara itu rencana KMB semakin dekat. Tentara Belanda akan menarik diri dari Indonesia. Negara Pasundan

akan kehilangan tulang punggungnya kecuali membalik sepenuhnya kepada TNI untuk menghadapi DI. Dengan perasaan cemas pemerintah Pasundan melihat kekuatan DI semakin meningkat di daerah kabupaten-kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pada bulan November 1949, dalam sidang Parlemen Pasundan, pemerintah didesak untuk memberikan perlengkapan senjata yang lengkap kepada TNI yang ditempatkan di Tasikmalaya agar kuat menghadapi serangan DI.⁵⁹

Keterangan Negara Pasundan pada TNI yang menjadi inti dari tentara RIS ini menempatkannya pada posisi lemah untuk bertahan lebih lama sebagai negara bagian dari RIS. Apalagi setelah terjadi peristiwa APRA bulan Januari 1950, maka semakin terbuka jalan bagi Negara Pasundan untuk meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia.⁶⁰

3.5 Pengalaman Bernegara Federal

Negara Pasundan adalah negara terbesar kedua dukungan Belanda sesudah NIT. Berbeda dengan NIT, Negara Pasundan mendapat otonomi yang lebih kecil dari pemerintah kolonial Belanda. Tetapi di dalam ruang gerak yang sempit itu, elemen-elemen unitaris yang pro-Republik dalam pemerintahan, parlemen, maupun masyarakat Sunda sendiri masih dapat mengimbangi elemen-elemen federalis, "oportunis politik", "kolaborator" atau "pasif politik". Elemen pertama terdiri atas para nasionalis lokal dan moderat tetapi pro-Republik. Adapun para nasionalis radikal dan bertaraf nasional telah menjadi tahanan-tahanan politik yang memenuhi penjara-penjara Bandung, Kuningan dan Cirebon, atau telah sempat mengungsi ke ibu kota Republik Yogyakarta. Mereka selain bersuara vokal dalam Parlemen sebagai latihan mereka selain bersuara vokal dalam Parlemen sebagai latihan mereka "berdemokrasi", juga berbicara dengan lambang-lambang. Jika kita lihat nama-nama fraksi yang ada dalam Parlemen seperti Kesatuan, Nasional, dan Indonesia, maka nama-nama ini mendukung simbol-simbol integrasi sehingga garis-garis pemisah yang tegas antara unitaris dan federalis itu hendaknya dilihat

dalam nuansa-nuansa lebih halus. Apalagi jika didengar suara wakil-wakil dalam Parlemen Pasundan yang menghendaki bahasa Indonesia (bukan bahasa Sunda misalnya, kecuali PRP) sebagai bahasa resmi, atau lagu "Indonesia Raya" sebagai lagu kebangsaan, atau bendera "Merah Putih" sebagai bendera negara.⁶¹ semuanya menunjukkan sikap ambivalensi terhadap eksistensi Negara Pasundan itu sendiri dan keterikatan batin kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak jarang dalam upacara-upacara resmi dinyanyikan lagu "Indonesia Raya" seperti pada waktu memperingati hari ulang tahun pertama Parlemen Pasundan yang dihadiri oleh wali negara, atau pembukaan Konferensi Serikat Buruh Tenun Indonesia (Sarbuti) di Bandung, misalnya.⁶²

Di Kota Bandung sebagai ibukota negara masih sempat terdapat kegiatan-kegiatan sosial, budaya serta agama sebagai penyaluran aspirasi mereka meskipun dihadapkan dengan tekanan-tekanan politik Belanda dalam ruang gerak SOB. Terdapat sejumlah organisasi-organisasi seprofesi, wanita, dan pemuda seperti Prerserikatan Buruh Kereta Api, Vakbond Pamongpraja, Bond Pegawai PTT, Perserikatan Pegawai Kehutanan, Serikat Guru Indonesia (SGI), Serikat Buruh Tenun Indonesia, Persatuan Jaksa-jaksa (Perwaja), Serikat Sekerja Pamongpraja, Serikat Buruh Beca; Budi Isteri yang mengurus para pengungsi, Partai Kebangsaan Indonesia Wanita (Parkiwa).⁶³ Adapun organisasi-organisasi pemuda misalnya: Badan Kongres Mahasiswa Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Bandung, Perserikatan Pelajar Indonesia Bandung, Pemuda Persatuan Islam, Pemuda Indonesia Pasundan, Pemuda Buruh, dan Tunas Muda Angkatan 45.⁶⁴ Organisasi-organisasi ini mengadakan konferensi dan membentuk sebuah Badan Penghubung Organisasi Pemuda Indonesia yang pada 26 Agustus 1949 telah mengeluarkan resolusi yang menuntut pembebasan tahanan-tahanan politik oleh Belanda, pencabutan undang-undang keadaan perang (SOB), dan diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih.⁶⁵

Sementara itu di kalangan umat Islam sendiri menunjukkan sikap yang pro-Republik. Pada 1 April 1948, di bawah pimpinan

Isa Anshary telah dihidupkan kembali kegiatan Persatuan Islam (Persis). Pada 13 April 1948 organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Guru Islam Indonesia, Persis mengadakan konferensi dan menyetujui pembentukan Majelis Persatuan Umat Islam. Gerakan Islam ini tidak ingin melibatkan diri sama sekali dengan Negara Pasundan;⁶⁶ suatu sikap yang turut membantu perjuangan Republik.

Semua sikap, pernyataan-pernyataan, dan tindakan-tindakan dari wali negara, dari kalangan pemerintah, anggota-anggota Parlemen, dari masyarakat dan rakyat di Jawa Barat sendiri selama berlangsungnya Negara Pasundan itu menunjukkan suatu pergulatan, pergesekan dan pergeseran dari gerakan-gerakan federal ke arah unitaris, dari disintegrasi Republik Indonesia Proklamasi karena sistem politik federal menuju kembali kepada reintegrasi nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

CACATAN BAB III

1. *Risalah Tahun 1948 – 1949 Parlemen Pasundan*. Bandung: Drukkerij Mascotte, t.t., hal. 12 – 14.
2. Proses pembentukannya sudah dimulai sebelumnya. Pada tanggal 4 Januari 1948 diadakan pertemuan di Pejambon, Jakarta, antara Perdana Menteri Belanda Beel, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, dan 10 negara bagian bentukan Van Mook yaitu : Negara Indonesia Timur, Federasi zelfbestuur Kalimantan Timur, Dewan Dayak Besar, Daerah Istimewa Kalimantan Baat, Daerah Bangka, Daerah Riau, Negara Sumatra Timur, Panitia Daerah Istimewa Sumatra Selatan, Panitia Penyelenggara Negara Jawa Timur, dan Panitia Indonesia Serikat. Lihat A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 6, Bandung: Penerbit Angkasa, 1978, hal. 26 – 30; 490 – 492.
3. Lihat A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Periode Renville, Jilid 7, Bandung: Penerbit Angkasa, hal. 22 – 29.
4. Sebelum pendudukan Jepang, Raden Temenggung Juwarsa menjabat ambtenar polisi Tangerang; sesudah kemerdekaan menjadi Bupati Krawang. Lihat Nasution, *op.cit.*, 6, hal 238.
5. Lihat *Risalah 1948–1949 . . .*, hal. 18. CF. Nasution, *op.cit.* 7, hal. 159.

6. Lihat *Risalah Tahun 1948 – 1949 . . .*, hal. 23 – 24. Cf. Tuhuteru, *Riwayat Singkat Berdirinja Negara Pasoendan*, Djakarta: Djawatan Penerangan Pemerintah, t.t., hal. 32 – 33.
7. Lihat *Risalah Tahun 1948–1949 . . .*, hal. 26 – 27.
8. Lihat *Sejarah Kota Bandung. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950)*, Bandung: Pemda Kodya Bandung dan Universitas Padjadjaran, 1981, hal. 365.
9. *Harian Indonesia*, 5 Agustus 1949, sebagaimana dikutip dari *Sejarah Kota Bandung*, hal. 365.
10. *Harian Indonesia*, 27–8–1949, dikutip dari *Sejarah Kota Bandung*, hal. 365 – 366.
11. *Harian Indonesia*, 10 – 8 – 1949, dikutip dari *Sejarah Kota Bandung*, hal. 366.
12. Sebelum Jepang, Hilman Jayadiningrat menjadi Bupati Serang; selama Jepang, Wakil Residen Bagor, sesudah kemerdekaan menjadi Bupati Sukabumi. Ketika Belanda menghidupkan "partai-partai" yang akan mendukungnya di Jawa Barat seperti PRP (Suria Kartalegawa dan Kustomo), Partai Rakyat Cirebon (Sultan Kanoman), maka Hilman Jayadiningrat dan Juwarsa aktif dalam Komisi Kontak Jawa Baat. Sesudah Konferensi Jawa Barat I, ia diangkat menjadi Re-comba Jawa Barat menggantikan Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Ketika berlangsung Konferensi Jawa Barat II, suatu organisasi yang menamakan dirinya GARIS (Gerakan Anti Republik Indonesia Sekarno) yang menuntut pembentukan Negara Jawa Barat mengusulkan Hilman Jayadiningrat menjadi Presiden dari Negara Jawa Barat. Lihat Nasution, *op.cit.*, 6, hal. 20; 244. Nasution memasukkan Hilman Jayadiningrat dan Juwarsa sebagai "pegawai yang berkhianat kepada Republik." Vide hal. 235.
13. Lihat *Risalah Tahun 1948 – 1949 . . .*, hal. 19 – 20. Cf. Tuhuteru, *op. cit.*, hal. 29. Ketika Konferensi Jawa Barat III sedang berlangsung, M. Sewaka yang menjadi Gubernur Republik untuk Jawa Barat, ditawan Belanda di Bandung karena mencalonkan diri menjadi Wali Negara. Ia mendekati

golongan pro Republik yang dipimpin oleh Suyoso tetapi oleh Belanda ia kemudian diinternir ke Tangerang pada tanggal 4 Maret 1948. Lihat Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949*, Jakarta: Grafiti, 1990, hal. 177.

14. Nasution, *op. cit.*, 7, hal. 175. Cf. *Risalah Tahun 1948 – 1949 . . .*, hal. 20.
15. Lihat S.L. van der Wal, *Officiele Bescheiden Betreffende De Nederlands – Indonesische Betrekkingen 1945 – 1950*, 6, hal. 672.
16. Tuhuteru, *op. cit.*, hal. 29.
17. Herbert Feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945 – 1965*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1970, hal. 221–226.
18. Lihat Nasution, *op. cit.*, Jilid 5, hal. 462 – 463.
19. Lihat Nasution, *op. cit.*, 6, hal. 242.
20. Nasution, *op. cit.*, 6, hal. 247.
21. Sebagaimana dikutip dari Nasution, *op. cit.*, Jilid 7, hal. 165 – 166.
22. *Ibid.*, hal. 159.
23. *Ibid.*, hal. 175.
24. Lihat Wawancara dengan Yudakusumah, 22 Februari 1980; Jerman Prawirawinata, 22 November 1952, sebagaimana yang dikutip dari *Sejarah Kota Bandung . . .*, hal. 354.
25. Sebagaimana dikutip dalam *Sejarah Kota Bandung*, hal. 354 – 355.
26. *Ibid.*
27. Lihat *Risalah Tahun 1948 – 1949 . . .*, hal. 20.
28. *Ibid.*
29. *Ibid.*, hal. 18.
30. Sebagaimana dikutip dari Nasution, *op. cit.*, hal. 180, 194 – 195.

31. Anthony J.S. Reid, *The Indonesia National Revolution, 1945 – 1950*, Canberra: Longman, 1974, hal. 118. Cf. Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi Di Jakarta, 1945 – 1949. Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Jakarta: Grafiti, 1990, hal. 177.
32. *Ibid.*, hal. 180 – 182.
33. Lihat *Risalah Tahunan Parlemen Pasundan 1948 – 1949*, hal. 21 – 22.
34. George Mc. Turman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961, hal. 374.
35. *Ibid.*, hal. 374 – 375.
36. *Ibid.*, hal. 375.
37. *Ibid.*, hal. 375.
38. Edi S. Ekadjati, *et.al.*, hal. 216 ?
39. *Ibid.*
40. Kahin, *op. cit.*, hal. 375 – 376.
41. *Ibid.*, hal. 376.
42. *Ibid.*, hal. 376 – 377.
43. *Ibid.*, hal. 377.
44. *Ibid.*
45. *Ibid.*, hal. 378.
46. Kahin, *op. cit.*, hal. 430 – 431. Cf. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1949, hal. 229 – 231.
47. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1949, hal. 233 – 235.
48. *Ibid.*, 1949, hal. 236 – 238.
49. *Ibid.*, 1949, hal. 243 – 244.
50. *Ibid.*, 1949, hal. 245 – 249.
51. Cribb, *op. cit.*, hal. 198.
52. Cribb, *op. cit.*, hal. 198.
53. Lihat Kahin, *op. cit.*, hal. 368 – 369.

54. Lihat *Sejarah Kota Bandung*, hal. 362 – 363. Cf. Kahin, *op. cit.*, hal. 369 – 374.
55. Lihat Cribb, *op. cit.*, hal. 197 – 198. Cf. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1950, hal. 24 – 27.
56. C. Van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam*, hal. 97–98. Cf. *30 Indonesia Merdeka*, hal.
57. *ibid.*, hal. 98.
58. *Ibid.*
59. *Ibid.*, hal. 99 – 100.
60. *Ibid.*, hal. 100 – 101.
61. Lihat *Risalah Tahun 1948 – 1949, Harian Indonesia*, tanggal 24 – 4 – 1949, tanggal 8 – 6 – 1949, sebagaimana yang dikutip dari *Sejarahh Kota Bandung*, hal. 378 – 380.
62. Lihat *Harian Indonesia*, 25 – 4 – 1949, dan 7 – 6 – 1949, sebagaimana dikutip dari *Sejarah Kota Bandung*, hal. 380, 384.
63. *Ibid.*, hal. 383 – 387.
64. *Harian Indonesia*, 30 Agustus 1949, sebagaimana yang dikutip dari *Sejarah Kota Bandung*, hal. 388.
65. *Ibid.*
66. Nasution, *op. cit.*, 7, hal. 178 – 180.

BAB IV

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN

4.1 Penyerahan Pemerintah Pasundan kepada RIS

Tumbuhnya keinginan agar Negara Pasundan dibubarkan bukan hanya datang dari rakyat, kepala-kepala desa dan pamongpraja, tetapi juga dari anggota-anggota Parlemen Pasundan sendiri dengan cara menyampaikan kritikan-kritikan yang keras pada waktu sidang Parlemen yang membahas anggaran belanja Negara Pasundan tahun 1949. Kritikan itu disampaikan di antaranya oleh Oli Setiadi, Dr. Hasan Nata Negara, Daruji, Suparno, dan anggota lainnya yang menyatakan dan mendesak kepada seluruh bangsa Indonesia di Pasundan supaya Negara Pasundan dibubarkan saja.¹

Sedangkan dari Fraksi Indonesia yang diwakili oleh Sumatmaja dalam sidang Parlemen Pasundan itu menyampaikan kritikan keras terhadap Pemerintah Pasundan, bahwa usaha yang dijalankan pemerintah Pasundan hasilnya gagal. Kegagalan itu disebabkan pemerintah Pasundan tidak dapat menyesuaikan diri dan tidak menindahkan keinginan rakyat umum di Pasundan. Selain terhadap pemerintah, ia juga menyampaikan kritikan terhadap beberapa pejabat pamong praja yang tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan keinginan rakyat.²

Mosi dari kritikan-kritikan itu mengakibatkan antara lain jatuhnya Kabinet Jumhana dan Kabinet Anwar Cokroaminoto.

Sebelum Kabinet Anwar Cokroaminoto berdiri, terlebih dahulu Wali Negara Pasundan RAAM. Wiranatakusumah menunjuk M. Sewaka sebagai formatur dalam pembentukan kabinet baru, tetapi kesanggupan Sewaka diikuti dengan tuntutan agar program kabinetnya nanti akan menjalankan usaha-usaha ke arah pembubaran Negara Pasundan. Permintaan dan tuntutan Sewaka tersebut dengan sendirinya ditolak dengan tegas, dan tidak diterima oleh wali negara Pasundan.³ Sebagai pengganti Sewaka sebagai formatur kemudian ditunjuk Anwar Cokroaminoto.⁴

Pemerintah Pasundan dalam sidang Parlemen 17 Desember 1949 mengeluarkan pernyataan atau keterangan, kesediaan dengan ikhlas untuk meletakkan jabatannya, apabila keamanan di dalam negeri telah terjalin. Pernyataan itu dikeluarkan setelah penyambutan peristiwa upacara pengambilan sumpah dan janji presiden RIS di Yogyakarta.⁵ Di samping pernyataan itu, dikeluarkan pula keterangan menyatakan sebagai berikut :

... bahwa negara Pasundan itu adalah negara perjuangan baik keluar maupun kedalam. Pemerintah berpendapat, bahwa dengan berakhirnya perjuangan Republik Indonesia-BFO sebagai suatu garis, di dalamnya Pasundan turut serta, dalam menghadapi pemerintah penjajahan Belanda sehingga menghasilkan resoulsi-resoulsi KMB, maka sekarang berarti pula bahwa perjuangan Pasundan ke luar sudah selesai dan pemerintah bersedia meletakkan jabatannya. Tetapi peletakan jabatan itu belum bisa dilaksanakan tergesa-gesa karena keamanan belum terjamin, sehingga tidak tepat saatnya untuk melepaskan tanggung jawab.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar RIS 1949, pemerintah memberi kesempatan untuk menampung suara rakyat guna menentukan kedudukan dan nasib masing-masing. Di samping itu keamanan dan ketertiban negara harus diperhatikan. Dalam menjamin keamanan dan ketertiban itu Pemerintah RIS menitikberatkan kepada TNI yang menjadi inti tentara Republik Indonesia Serikat sepenuhnya. Sedangkan untuk keamanan Negara Pasundan, Sultan Hamengkubuwono IX bersama Kolonel A.H. Nasution dan Mr. Ali Budiarjo dari Jakarta berangkat ke Bandung untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Pasundan dan Komandan Divisi Militer Belanda. Pemi-

caraan tersebut menghasilkan atau memutuskan bahwa keamanan di wilayah Pasundan dipedang oleh Kolonel Sadikin sebagai gubernur militer di seluruh wilayah Pasundan.⁷

Pada awal tahun 1950 kesulitan dan ketegangan dalam tubuh pemerintah Pasundan sudah sangat parah. Hal ini ditandai dengan adanya kritikan yang lebih keras lagi dari anggota-anggota Parlemen Pasundan sendiri, di samping hasrat dari rakyat yang menghendaki dibubarkannya Negara Pasundan dan dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu peristiwa Westerling merupakan suatu kejadian yang agaknya mempercepat proses dibubarkannya Negara Pasundan.⁸

Untuk menanggulangi hal tersebut, pada 30 Januari 1950 pemerintah Negara Pasundan mengajukan permohonan kepada Pemerintah RIS supaya segera memberikan bantuannya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Pada tanggal itu pula di hadapan sidang Parlemen wali negara Pasundan menyatakan niatnya untuk menyerahkan kembali mandatnya kepada Parlemen Negara Pasundan.⁹

Untuk memenuhi permohonan pemerintah Negara Pasundan, Pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan penyelenggaraan tugas pemerintah Negara Pasundan oleh komisaris Pemerintah RIS. Juga berdasarkan Undang-Undang Darurat itu, presiden RIS dengan surat keputusannya 4 Februari 1950, No. 58, mengangkat M. Sewaka sebagai komisaris Pemerintah RIS di Negara Pasundan. Surat keputusan itu disertai perintah yang memberi kekuasaan penuh kepada komisaris dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya.¹⁰

Adapun tugas dari Komisaris itu ialah menyelenggarakan pemerintah dari Negara Pasundan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah RIS. Di samping itu dalam instruksi yang termuat dalam Undang-Undang Darurat dinyatakan dengan tegas, bahwa penyimpangan dari *Regerings Staatkundige Organitatie Negara Pasundan* (Stb. 1948 No. 116), mengenai para menteri dan Parlemen Negara Pasundan, komisaris diserahi tugas untuk membentuk susunan baru dari kementerian-

kementerian menjadi departemen-departemen yang kepala-kepalanya bertanggung jawab kepada komisaris.¹¹

Dalam menjalankan Undang-Undang Darurat itu, untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan komisaris di wilayah Negara Pasundan, peraturan-peraturan negara yang mengenai para menteri dan Parlemen Pasundan selanjutnya dibekukan. Dalam menjalankan tugasnya, bila perlu komisaris boleh menyimpang dari peraturan-peraturan dan undang-undang yang masih berlaku di Negara Pasundan.¹²

Komisaris bertanggung jawab kepada Pemerintah RIS. Juga dianjurkan supaya bekerjasama dengan aparat pemerintahan Negara Pasundan yang ada dewasa itu, misalnya pembesar militer, polisi, sipil, dan lainnya yang masih menjabat.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat dan Surat Keputusan Presiden RIS No. 58 Tahun 1950, maka pada 10 Februari 1950 di kediaman wali negara Pasundan di Bandung dilangsungkan upacara penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pasundan kepada komisaris RIS. Dalam upacara itu dihadiri oleh ketua-ketua fraksi dalam Parlemen Pasundan dan wakil-wakil partai politik. Dari pihak pemerintah Pasundan hadir Wakil Wali Negara Pasundan Juwarsa, menteri-menteri dan para sekretaris jenderal, sedangkan dari Pemerintah RIS yaitu Sewaka, lengkap dengan kepala-kepala departemen.¹³

Upacara penyerahan itu dibuka oleh Mr. Mamun Sumadipraja selaku wakil Kementerian Dalam Negeri RIS, yang mengatakan bahwa status Pasundan belum dapat ditentukan sampai rakyat dapat menyatakan suara secara legal. Dalam masa peralihan ini, roda pemerintahan harus berjalan terus, dan sekarang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RIS. Menurut keterangan Juwarsa yang menjabat wakil wali Negara Pasundan, bahwa keadaan pemerintah maupun keamanan tidak terjalin pada waktu itu, sehingga Parlemen Pasundan memutuskan untuk menyerahkan kepada Pemerintah RIS.¹⁴

Setelah upacara penyerahan kedaulatan Negara Pasundan itu, sejak itu pula berakhir lah pemerintahan Negara Pasundan dan mulai berlakulah pemerintahan komisaris di wilayah bekas Negara Pasundan yang didirikan pada 26 Februari 1948.

4.2 Penyerahan Pemerintahan Komisaris Negara Pasundan kepada Pemerintah Republik Indonesia

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Komisaris RIS di wilayah bekas Negara Pasundan segera mengangkat pembantu-pembantunya menjadi kepala-kepala bagian pemerintahan yang semula dipegang oleh menteri-menteri. Di antaranya Mr. Kusna Puradireja diangkat sebagai kepala bagian kehakiman dan sosial, Isa Anshari diangkat sebagai kepala bagian kesehatan, Mr. Ukur Bratakusumah diangkat sebagai kepala bagian kemakmuran dan pekerjaan umum, Sanusi Harjadinata sebagai kepala bagian pengajaran, dan Sewaka sebagai kepala bagian dalam negeri.¹⁵

Setelah penyerahan pemerintahan dari Negara Pasundan kepada komisaris, setiap hari komisaris menerima surat dukungan dari desa-desa, kecamatan-kecamatan, kewedanaan-kewedanaan, dan kabupaten-kabupaten, baik yang disampaikan melalui partai politik maupun organisasi massa lainnya. Mereka menyatakan dukungan kepada komisaris dan menyatakan tidak mengakui adanya Negara Pasundan.¹⁶ Hal ini disebabkan kaburnya maksud dan tujuan lahirnya Negara Pasundan. Akibatnya segala aktivitas negara tersebut kurang mendapat perhatian masyarakat Jawa Barat sepenuhnya. Keinginan masyarakat untuk menyatukan diri dengan Republik Indonesia pada hakekatnya timbul dari keinginan massa rakyat Jawa Barat sendiri yang didukung oleh tokoh-tokoh Republik.¹⁷

Karena wilayah Negara Pasundan dipegang oleh Komisaris RIS, maka dalam pengambilan keputusannya pun harus selalu disesuaikan dengan pemerintah pusat (RIS). Orang-orang yang memegang pemerintahan dalam komisaris terdiri atas orang-orang yang pro-Republik Indonesia. Hal ini dengan sendirinya akan mempercepat proses kembalinya wilayah Pasundan ke pangkuan Republik Indonesia. Sementara itu pengajuan keinginan rakyat tentang pengembalian wilayah bekas Negara Pasundan seolah-olah mendapat dukungan. Apalagi setelah dipertegas oleh pernyataan Male Wiranatakusumah sebagai bupati Bandung yang menyatakan :

... mengenai status bekas Negara Pasundan tergantung kepada rakyat Pasundan sendiri, jadi rakyatlah yang bisa menentukan status negara tersebut. Asal dengan jalan yang sehat, jujur dan bersih ... juga rakyat diperbolehkan mengadakan propaganda mengenai status itu, asal tidak menyimpang dan melanggar dari ketertiban dan keamanan yang mengakibatkan bentrokan di antara kita.¹⁸

Pernyataan yang diucapkan tokoh-tokoh Republikan itu seakan-akan membakar dan mendorong keinginan yang membara dan semakin meningkatnya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan rakyat kepada pemerintah Komisaris, agar wilayah bekas Negara Pasundan dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada 8 Maret 1950, di Gedung Parlemen Pasundan di Bandung diselenggarakan sidang untuk menentukan status bekas Negara Pasundan. Sidang tersebut dilaksanakan atas perintah Komisaris RIS Sewaka. Anggota yang hadir dalam sidang itu sebanyak 159 orang wakil-wakil rakyat dari berbagai aliran dan golongan di seluruh Pasundan. Seluruh 159 orang anggota itu terdiri atas : Haminte Bandung 7 orang, Haminte Cirebon 2 orang, Haminte Bogor 1 orang, Haminte Sukabumi 1 orang, dari Kabupaten Bandung 13 orang, Kabupaten Tasikmalaya 13 orang, Kabupaten Ciamis 11 orang, Kabupaten Cirebon 11 orang, Kabupaten Indramayu 10 orang, Kabupaten Majalengka 7 orang, Kabupaten Kuningan 7 orang, Kabupaten Sukabumi 11 orang, Kabupaten Bogor 11 orang, Kabupaten Cianjur 8 orang, Kabupaten Krawang 16 orang, dan Kabupaten Subang 12 orang.¹⁹

Penetapan wakil-wakil dalam sidang itu ditetapkan oleh masing-masing daerah dan penunjukannya dilakukan oleh mereka yang terpandang sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai aliran dan golongan, yang banyaknya tergantung dari jumlah jiwa penduduk yang ditetapkan, satu wakil dari tiap 75.000 orang penduduk.²⁰ Pelaksanaan sidang diketuai oleh B. Hadiwijaya dan paniteranya Afandi Ridwan. Sidang tersebut tidak hanya dihadiri oleh dewan khusus dan undangan saja, tetapi dihadiri juga oleh rakyat dari berbagai penjuru Kota Bandung yang da-

tang memadati gedung bekas Parlemen Pasundan. Mereka ingin mengetahui dan menyaksikan jalannya sidang dengan seksama.²¹

Pelaksanaan pemungutan suara dalam sidang itu dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) apabila anggota sidang tidak setuju penggabungan bekas Negara Pasundan ke dalam Negara Republik Indonesia supaya berdiri; (2) anggota sidang yang menyatakan setuju terhadap penggabungan itu agar tetap duduk. Ternyata semua anggota Dewan Sidang tidak ada yang berdiri. Dengan tindakan itu menandakan bahwa semua anggota Dewan Sidang menyetujui penggabungan bekas wilayah Negara Pasundan ke dalam Negara Republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta.²²

Keputusan yang diambil dengan suara bulat oleh anggota sidang itu, harus segera disampaikan oleh Komisaris RIS Sewaka untuk diteruskan kepada pemerintah pusat (RIS). Pada 11 Maret 1950 keluarlah Surat Keputusan RIS No. 113 yang menyatakan bahwa wilayah Pasundan termasuk wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak itu berakhirlah riwayat Negara Pasundan.²³ Pemerintah Komisaris RIS di Jawa Barat diganti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan gubernurnya tetap M. Sewaka.

Sejalan dengan bubarnya Negara Pasundan dan Komisaris RIS, maka keluarlah instruksi pemerintah Republik Indonesia No. 1 tanggal 13 Maret 1950, yang menyatakan bahwa semua aparat Negara Pasundan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keputatian, dan kota semua dibubarkan.²⁴

Untuk mengisi kekosongan di Jawa Barat dan menunggu instruksi lebih lanjut, sementara waktu Dewan Perwakilan Rakyat Haminte dapat melanjutkan tugasnya yang telah berjalan. Pada 2 Juni 1950, gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 4/Uk/GD-B/50, yang menetapkan bahwa wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Haminte dilakukan oleh residen yang bersangkutan dan wewenang Dewan Pemerintahan dilakukan oleh kepala daerah bersangkutan.²⁵

Kegigihan dari rakyat Jawa Barat yang berusaha memperjuangkan daerahnya agar tetap berada dalam wilayah Negara

Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, menunjukkan bahwa asal mula hasrat dan usaha menegakkan kembali negara kesatuan di Jawa itu datangnya dari masyarakat Jawa Barat sendiri. Hal ini membuktikan pula bahwa semangat dan jiwa persatuan rakyat Jawa Barat benar-benar diwujudkan demi tercapainya cita-cita perjuangan untuk mencapai kesatuan negara dan bangsa Republik Indonesia seutuhnya.

CATATAN BAB IV

1. M. Sewaka, *Tjorat-Tjoret Dari Djaman ke Djaman*, Bandung: Visser, 1955, hal. 171.
2. *Berita Antara*, 11-10-1949, hal. 1.
3. Edi S. Ekadjati, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, hal. 445.
4. Sewaka, *op. cit.*, hal. 178. Dalam Sewaka disebutkan Harsono Cokroaminoto, tetapi sebenarnya adalah saudaranya yaitu Anwar Cokroaminoto.
5. *Berita Antara*, 17 - 12 - 1949, hal. 2.
6. *Berita Antara*, 17 - 12 - 1949, hal. 2.
7. *Sk. Merdeka*, 7 - 11 - 1949, hal. 1 - 3.
8. Sewaka, *op. cit.*, hal. 181.
9. Edi S. Ekadjati, *op. cit.*, hal. 451.
10. Sewaka, *op. cit.*, hal. 184.
11. *Ibid.*
12. *Ibid.*, hal. 185.
13. *Berita Antara*, 10 - 2 - 1950, hal. 1.

14. *Berita Antara*, 11 – 2 – 1950, hal. 1.
15. Sewaka, *op. cit.*, hal. 184 – 185.
16. Ekadjati, *op. cit.*, hal. 152.
17. *Pemerintah Daerah Jabar*, 1972, hal. 275.
18. *Harian Indonesia*, 122, 7 – 3 – 1950, hal. 2.
19. *Harian Indonesia*, 204, 9 – 3 – 1950, hal. 1.
20. Sewaka, *op. cit.*, hal. 186.
21. *Ibid.*, hal. 188.
22. Tanu Suherly, 1968, hal. 188.
23. Sewaka, *op. cit.*, hal. 196 – 197.
24. *Ibid.*
25. Ekadjati, *op. cit.* hal. 455.

BAB V PENUTUP

Strategi dan taktik Belanda untuk menguasai kembali Indonesia yang sebelum Perang Dunia II merupakan jajahannya yang bernama Hindia Belanda, telah mendorongnya untuk membentuk "negara-negara" dan/atau "daerah-daerah istimewa" di wilayah-wilayah Republik Indonesia yang direbutnya dengan kekerasan senjata. Pembentukan negara-negara dan daerah-daerah istimewa itu bukanlah atas kehendak murni seluruh rakyat dari daerah-daerah yang bersangkutan melainkan atas tekanan-tekanan militer Belanda. Negara-negara itu adalah bentuk *fait accompli* terhadap Republik Indonesia untuk menerima sebuah Republik Indonesia Serikat dalam Unit Indonesia-Belanda yang akan didominasi Belanda.

"Negara Pasundan" adalah sebuah model negara federal yang dicoba untuk ditegakkan atas dasar-dasar primordialisme etnis Sunda. Perbedaan-perbedaan etnis, kebudayaan, bahasa, dan adat-istiadat dijadikan salah satu alasan untuk memisahkannya dari kelompok-kelompok etnis lain. Sejumlah orang Indonesia sendiri yang menjadi pemimpin dan/atau pendukung dengan berbagai macam motif, giat dan aktif atau menerima pasif bentuk dan isi Negara Pasundan itu. Di antaranya ada sebagian dari para aristokrat (menak) Sunda yang menjadi pegawai pamongpraja pada masa prakolonial, karena takut kehi

langan posisi dalam struktur Republik yang masih muda dan baru; ada oportunistis-oportunistis politik yang melihat kesempatan dalam Negara Pasundan untuk tampil ke puncak yang di dalam Republik sulit akan dicapainya; ada tokoh-tokoh nasional lokal pro-Republik tetapi moderat melihat Negara Pasundan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi politiknya guna mengimbangi golongan-golongan federalis; ada tokoh-tokoh Republik sendiri asal Jawa Barat yang melihat bahwa perjuangan "dari dalam" Negara Pasundan sebagai suatu taktik untuk menggiring Jawa Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia; dan ada pula sejumlah pendukung pasif berasal dari para pegawai yang karena faktor ekonomi atau tidak sempat mengungsi terpaksa bekerja atau tinggal di daerah pendudukan Negara Pasundan. Semuanya, dilihat dalam kerangka politik Republik Indonesia merupakan gerakan-gerakan sentrifugal yang merugikan.

Ternyata primordialisme kesukuan tidak menjamin teguhnya struktur politik Negara Pasundan. Jawa Barat, khususnya Bandung yang dijadikan ibu kota dari Negara Pasundan, sejak zaman pergerakan kebangsaan telah menjadi pusat kegiatan politik dan pendidikan. Sejumlah pemimpin kebangsaan telah timbul, begitu pula golongan terpelajarnya, baik dari kalangan bangsawan (menak) maupun rakyat biasa dan mereka ini semua menjadi elit-elit dalam struktur sosial yang sedang berubah. Interaksi antara suku terjadi, sehingga visi kebangsaan timbul melampaui batas-batas kultur "kesundaan" meskipun yang terakhir ini mustahil dapat hilang sama sekali. Kemudian setelah Proklamasi, perjuangan bersenjata dari Republik Indonesia bermula antara lain di Jawa Barat dalam menghadapi sisa-sisa Jepang, Sekutu (Inggris), dan akhirnya Belanda. Pemimpin-pemimpin Republik asal Jawa Barat sendiri begitu juga rakyat yang sadar tidak melihat perlawanan terhadap Belanda itu sebagai perlawanan lokal tetapi sebagai suatu perjuangan bersama seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya maka timbul reaksi keras mereka terhadap usaha-usaha separatis pendukung Negara Pasundan dari sejumlah tokoh Jawa Barat tertentu. Bersama-sama dengan elemen-elemen nasional lokal yang berjuang dengan cara mereka

masing-masing dari dalam Negara Pasundan, para pemimpin yang berjuang dari luar daerah pendudukan Belanda ini merupakan kekuatan-kekuatan sentripetal yang mempunyai daya integratif. Kegiatan-kegiatan mereka ini, tentu saja dengan dukungan rakyat Jawa Barat sendiri bersama-sama dengan TNI yang berjuang dari "dalam wilayah" Negara Pasundan sebelum "hijrah" atau setelah *long march*, merupakan potensi utama yang mengakhiri Negara Pasundan. Akhirnya setelah menjadi bagian dari RIS, Negara Pasundan meleburkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketika RIS juga bubar, bekas Negara Pasundan itu kembali menjadi salah satu provinsi dari Republik Indonesia. Pengalaman bernegara Pasundan meskipun tragis bagi sejumlah elit tertentu tetapi adalah salah satu episode yang berharga dalam proses pembentukan dan pembelajaran kesadaran kesatuan dan persatuan bangsa.

DAFTAR BACAAN

Arsip

Bundel Arsip "Negara Pasundan" di ARSIP PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT, Bandung.

Drooglever, P.J. & Schouten, M.J.B., ed. *Officiele Bescheigen Betreffende De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*. Jilid 10-14 . s-Gravenhage . Martinus Nijhoff. 1988. (Di ARSIP NASIONAL RI, Jakarta).

Wal, S.L. Ban der, ed. *Officiele Bescheiden Betreffende De Nederlans-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*. Jilid 6-9. s-Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1976. (DI ARSIP NASIONAL RI, Jakarta).

Buku

Ali, Moh., et. al *Sedjarah Djawa Barat; Suatu Tanggapan*. Bandung . Pemerintah Daerah Djawa Barat. 1972.

Alisyahbana, Samiati. *A Preliminary Study of Class Structures Among the Sundanese in the Priangan*. Ithaca . Cornell University. 1954.

Bemmelen, R.W. van. *The Geology di Indonesia*. I. The Hague: Gubernment Printing office. 1949.

- Cribb, Robert Bridson. *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945–1949. Pergulatan Antara Otonomi*. Jakarta : Grafiti. 1990.
- Dijk, Cornelis van. *Rebellion Under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia*. The Hague : Martinus Nijhoff. 1981.
- Ekadjati, Edi S., et. al. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*. Jakarta : Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. 1982.
- . *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*. Jakarta : Girimukti 1984.
- , et. al. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Jakarta . Proyek IDKD Jawa Barat. 1986.
- Feith, Herbert & Castles, Lance, ed. *Indonesia Political Thinking 1945–1965*. Ithaca and London : Cornell University Press. 1970.
- Garna, Yudistira. "Gambaran Umum Daerah Jawa Barat", *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*. Jakarta : Girimukti. 1984.
- Hardjasaputra, A. Sobana. *Pemerintahan Daerah Jawa Barat Pada Masa Revolusi Fisik (September 1945–Juni 1948)*. Bandung . Fakultas Sastra Unpad. 1980.
- Ide Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1985.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. *Buku Saku Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS. 1978.
- Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press. 1970.
- Kartidirdjo, Sartoni, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V. Jakarta : Balai Pustaka. 1975.

- Koesoemahatmajda, Djenal Hoesen. *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpraja Ditinjau dari Segi Sejarah*. Bandung : Alumni. 1978.
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan*. 11 Jilid. Bandung: Angkasa. 1978.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Natosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka. 1984.
- Regeringsalmanak voor Nederlandsh-Indie*. Deel II, 129. 1928.
- Reid, Anthony J.S. *The Indonesia National Rebolution 1945-1950*. Banberra : Longman. 1974.
- Risalah Tahunan 1948-1949 Parlemen Pasundan*. Bandung : Drukkerij Mascotte. tt.
- Santosa, Racham. "Djakarta Raya Pada Djaman Djepang (1942-1945)." Prasaran pada Seminar Sedjarah Nasional II di Jogjakarta. 1970.
- Sejarah Kota Bandung. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1950)*. Bandung: Pemda Kodya Tk. II Bandung & Universitas Padjadjaran. 1981.
- Sewaka. *Tjorat-Tjocet dari Djaman ke Djaman*. Bandung: Visser. 1955.
- Smail, John R.W. *Bandung in the Early Revolution 1945-1946; A Study in the Social History of the Indonesia Revolution*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project. 1964.
- Suherly, Tanu. "Sekitar Negara Pasundan". Naskah Seminar Sejarah Nasional II. 26-29 Agustus 1970, Yogyakarta. 1970.
- Sumantri, Iwa Kusuma. *Sedjarah Revolusi Indonesia*. Djilid II. Djakarta: Grafika. 1964.
- The, Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintah daeran di Negara Republik Indonesia*. Djil. I. Djakarta: Gunung Agung. 1967.

- Tirtoprodjo, Susanto. *Sedjarah Revolusi Nasional Tahapan Revolusi Bersenjata, 1945–1950*. Djakarta: Pembangunan. 1962.
- Tuhuteru, J.M.A. *Riwayat Singkat Berdirinya Negara Pasundan*. Djakarta: Djawatan Penerangan Pemerintah. 19?
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, ed. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984.
- Risalah Tahunan 1948–1949 Parlemen–Pasundan*. Bandung: Drukkerij Mascotte. 19?
- Sejarah Kota Bandung. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1959)*. Bandung: Pemda Kodya Tk. II Bandung & Universitas Padjadjaran. 1981.
- Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia–Daerah Jawa–Barat*. Jakarta: IDKD. 1980/1981.
- Sewaka, M. *Tjorat-Tjoret Dari Djaman ke Djaman*.
- Tanu Suherly, "Sekitar Negara Pasundan". Naskah Seminar Sejarah Nasional II, 26–29 Agustus 1970, Yogyakarta.
- 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1945–1950*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1981.
- Volkstelling 1930*. "Inheemsche Bevolking van West Java". Deel I. VI. Batavia. 1936.
- Yoeniarto. *Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. 1975.

Berita, Majalah, Surat Kabar

Api Rakyat, "Kartalegawa Trompet Kaum Kapitalis Belanda", 5 Mei 1947; "Tariklah Semua Tenggara Belanda, Tepatilah Linggajati", 12 Mei 1947; "Gara-gara Kartalegawa", 30 Mei 1947.

Berita Antara, 10 Februari 1950, 11 Februari 1950.

Harian Indonesia, 7 Maret 1950; 9 Maret 1950.

Merdeka, 7 November 1949.

Pemandangan, 16 Maret 1942.

Soeara Merdeka, 5 Oktober 1945.

Skripsi

Junaedi, "Runtuhnya Negara Pasundan". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.

Sukinda, Kusnadi Hermawan. "Negara Pasundan. Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Proses Pembentukan dan Perkembangannya tahun 1948–1950". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, Universitas Padjadjaran, Bandung. 1986.



Repro Kempen.

R.A.A.M. Wiranatakusumah
Wali negara dari Negara Pasundan (1948 --1950).



R.A.M. Suria Kartalegawa
Mantan bupati Garut; memproklamasikan berdirinya
"Negara Pasundan" dan mengangkat dirinya sebagai "presiden"
pada 4 Mei 1947

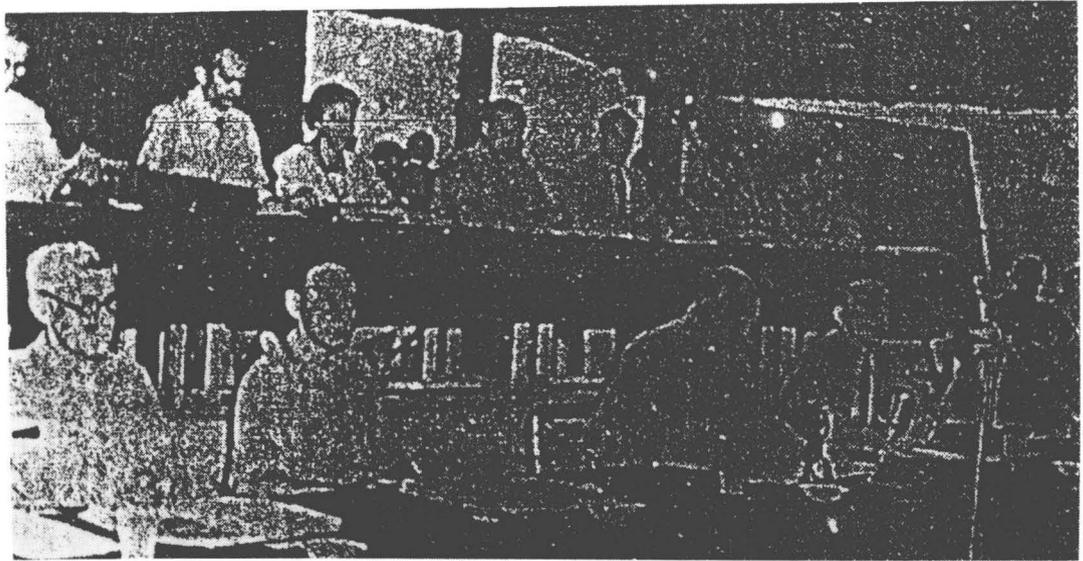


*Demonstrasi spontan rakyat Jawa Barat
menentang pembentukan "Negara Pasundan".*

Perhatikan tulisan di spanduk:

"Tolak Negara Pasundan" dan

*"Ra'jat Pasundan Tukangeun Karno-Hata" [Rkyat Pasundan di belakang
Sukarno - Hatta]*



*Konferensi Malino (sebelah selatan Ujung Pandang)
antara tanggal 16 – 22 Juli 1946
di bawah pimpinan Van Mook
adal dari gerakan negara-negara federal Van Mook*



*Konferensi Den Pasar (Bali)
antara tanggal 18 – 24 Desember 1946
di bawah pimpinan Van Mook
berdirinya Negara Indonesia Timur*



*Propaganda PRP Symbol "kroon"
(..... tak boleh ketinggalan).*

*Propaganda PRP (Partai Rakyat Pasundan)
Lambang "mahkota" (kroon) Belanda*

lg. merdeka dapat di mengerti, Jepang menganggap bahwa naskah Linggardjati memberi jitu up dasar guna tuntutan itu, yaitu pasal 4. Tetapi ada satu faktor lg. yaitu kata Brandt, yaitu lg. mengenai ekonomi lg. tergantung kepada soal geografis.

Suara pers.

Sk. Ken Po Djakarta menyatakan bahwa "proklamasi republik Patunden" tidak menggerakkan mereka lg. telah memperhatikan praktik Surja Kartalegawa selama setahun ini dan mengingat besarnya bantuan finansial dan propaganda dari pihak Belanda kepadanya.

Jang mengherankan ialah bahwa jumlah anggota partai ia, sudah, katanya, bertambah dgn 1 juta dan bahwa, katanya lagi, 200.000 orang Sunda bersandjata berperang melawan tentara republik (mereka tang turut Belanda? RAA AR), demikian pula bahwa 12.000 tentara Sunda sudah berkolaborasi dgn Belanda.

Propaganda demikian telah menjelak Ken Po dan surat kabar ini sangat anehkah propaganda semacam itu akan mendapat effect diluar negeri terutama karena correspondent ini negeri mengetahui keadaan lg. sebenarnya.

Sementara itu "pendapat" Ken Po "republik Patunden" ini menerbitkan kesukaran baru dimengembangkan perbandingan Linggardjati.

Meskipun partai Kartalegawa itu argumennya tidak sebanyak seperti dikehendaki dan organisasinya masih masih lagi mempunyai arti politik juga karena mendapat sokongan finansial dan propaganda.

Ken Po berpendapat bahwa sokongan terutama yang didapat Kartalegawa ialah dari golongan feodal dan kolot yang menentang aliran baru.

Kedua-tan Rakjat Djawa berpendapat, bahwa negara Republik

dan diluar itu orang diberi kartu-landa-nu. S. a dan dari itu itu dianggap sebagai anggota.

"Nasional" berkecukupan, bahwa gerakan Kartalegawa tidak membahayakan bagi Republik, karena Rakjat Djawa Barat ialah hasil pendirianannya dan itu bukan kosong dan hampanya gerakan Kartalegawa ini.

Sk. Buruh Jogja.

Rakjat Indonesia di Djawa Barat terutama di daerah Jawa Barat diduduki oleh tentara Belanda memperhatikan perjuangannya dengan mengadakan rapat-rapat umum untuk menentang aksi Kartalegawa ds. itu.

Dikota2 lain umumnya masih terpeladjar tinggal beberapa orang saja dan sebagian besar dari mereka itu tidak pula bersedia diamping Kartalegawa ds. Mengingat Kartalegawa bisa memperkirakan kehendakannya itu selama dilindungi oleh bajong tentara Belanda.

Dgn. memberikan informasi lg. mengenai "perjuangan perang" kepada Rakjat Djawa Barat itu, Kartalegawa lampau hendak menfasilitasi rotasi sebagai kaki-langan kaum nasionalis Belanda.

Kalangan politik.

Diantara orang2 politik berasal dari Djawa Barat lg. banyak sekali terkumpul di Jogja, beberapa menyatakan kepada "Antara" bahwa politik "memilih telah sudah terlebih dulu diduga akan ditakutkan oleh Belanda dgn menggunakan orang sebagai alat.

Dalam rapat revolusi ada kontra-revolusi dan gerakan-Kartalegawa tidak lain dari pada salah satu alatnya.

Kelaguan ini lg. merupakan hasil betul akan di Jawa Rakjat Indonesia di Djawa Barat ialah bahwa Rakjat itu akan akan diperlihatkan Kartalegawa dgn Belanda sebagai dilangsung.

ulas
Seri
dalam
enting
kristal
saran
long
lung

omist
ou-lik
-iken
reka
ne di
lagi,
tanda
betif.
Deng
ngan-
ntah"
men-
Julu-
ahkan
kebi-
egeri".
dapat
teri

rtawan
dikak-
Nedja-
awa ja
dalaar
Nanti,
tepada
ra kita
bond-
pitaaja
nkman,
a men-
al itu

sir!

anga-2
g usul
kamer-
dg. 8
Menir
og me-
rsobat.

ata

istem se-bengol (0025) - di-
hucatan: Orut dalam pemerintah
"modis belanda" alimurum, yang
sangat "menggelisahkan" rakyat
dijel te dalam derahhat. Kelika
la mudi hidi anggota "Volksraad",
karena itu tulis "10 (25" -nja,
ja telah menjadi terusan-berat
pada bahu rakyat Orut tetap
meninggalkan bekas. Tentang
penghidupan - "prive" -nja tak
perlu kita perpanjangkan.

Demikian antara lain bahan2
ja mungkin perlu bagi tindakan
kita atas "proklamasi republik
pasundan" ja akan dilenggara-
kan dibawah pimpinan Kartalegawa
lab. tjalon "perdana menteri"
dim paduun sand wara itu.
Tak perlu kita dalam la daripada
alat propaganda lawan kita, yang
100%, diokong oleh Belanda
dalam materiel dan moreel itu;
kita dapat menganggap dari per-
pogan Kartalegawa sendiri, bahwa
ia sedang mengimani. Surtu
pers, antara lain, sk. "Ken Po",
"Kedulatan Rakyat", cab. telah
tjukup menpanduikan ketpa buruk
suisana penjelenggara "nasik-h
Lingardjati" yang sedang kit-
usahakan dengan Belanda berama-
ma; berhubung dgn peralitiwa
tab. Ini sangat kita seialkan.

Diesamping segala itu, "prokla-
masi" ini hanya akan lebih men-
dajuhkan kerja bersama antara
kita dgn Belanda; butaklah Bel-
anda berada dibelakang ajar pe-
diwars ini dgn usag dan propa-
gandaaja; ketjuall itu d'iga akan
meruntjngkan bebantjan rakyat
Pasundan belaka terhaap ke-
"kelief"-an Kartalegawa et. lg.
dgn segala optimisme m'jabukan
langkah2aja seolah-olah; idak me-
makal perhalungan itu.

Ditilik dari Kartalegawa sendiri;
ia sudah tingg' uatana; mungkin
benar tal run mempunyai penga-
rah pada keefhatan piklannya.
Dan ini, Kuslomo (sengas kuma-
nja), biar bagaimana djuga, Mr. ini
mestiagak asing bagi kita dan
mungkin djuga ia hanya mudi be-
dahan Republik yang sebanth-
benarnya.

telitijeret ambal-ambalan an
Surja sampai ked'apit d'iana,
hujan dan awan. Kintaja hujan
itu al mat subur lo pak.

Ini bukan barang baru ja
Barang lama yang sedjak Mus
dijahung berada dihergeri m
bligga kini selalu didjilantja
Politik lama "verdeel en heert"
Belanda dibekakang lajar, jeta
"sabok n'ilih tangan", sedikita
tjoba ngrikiti Republik dari d'
seperti bakti TBC.

Ketika dengar d'gri kawani
dari daerah Preangan bahwa pi
Karta ini riwayatja sudah d'at
Da'u ngusulern perekonomi
rakyat 24 sen, seneng sama w
nita seolahan hiduonia sel-
royal, belakng didjandjikan di
bupati 7 keturunan.
Waaaahhh... waaaahhhh...
Ketika.

Olah-Raga.

Ma di uo, 3 Mei.
Pada hari Djumat lbi, di Kiri
Koto telah dilangsungkan res-
nembentukan pengurus P.O.R
bagian Tennis.
Rapat tab. telah berhasil met
bentuk pengurus abb :
Ketua: Sdr. Soewondo, wk. ketia
Sdr. Soebroto, Penulis/bendahir
Sdr. Sekretaris: Sebagai pelaw
telah dipilih Sdr. Soemadi Hoo
d'uu pembantuja Sdr. Soepardi

ADPRTBNSI TIAPSAPTON
"PENGROEBOENG"

Pabrik dan Toko Kefjamat
terbesar di Djawa
A. KASOEM
Klaten Dj. Raya 32/34 (At
goc teroes books)
A. KASOEM
KELATEN
Mangrove
Diponegoro
Klaten

Ra u
Dio
perma
lagge
kame
Mung
ukant
ming
Se
masu
Keus
aja

Mo

Di
Perai
dier
keper
undia
dijela
dang
baru
ilap2
dibij

Su

Wa
Pr
ja ki
alder
Cong
USA
perh
USA
snege
nja
kalan
Lo
ngil
uat
tuak
Dik
sunt
mas
mas
mas

PROKLAMASI KARTALEGAWA

DITARIK KEMBALI?

Kartalegawa mulai insjaf

Djakarta, 7-5 Mei, Antara

SEDAK kemarin di sekitar Djakarta, terbit surat2 selebaran yg dianda tungan oleh R. A. A. Soeria Kartalegawa atas nama seluruh Partai Rakjat Pasundan, yg menjatakan pembubaran partai tsb. Surat selebaran itu, yg berkepala "proklamasi" berbunyi sbb.:

Meledak

Beklen orang berterbangan - London, Mei.

Laporan pegurus batu bara bagian barat dala mengtakan 3 orang mati, 6 orang hilang dan 25 orang lainnya diangkut berumah sakit, karena terjadi ledakan dalam tambang batu bara di Barnsley daerah Yorkshire, 172 mil dari London.

Menurut laporan tak resmi dari daerah pertambangan Barnsley, 9 orang mati karena ledakan dalam tambang, 1 orang masih tertulup dalam tambang dan kini sedang diadakan usaha untuk melepaskan orang tsb. Antara

Tidak bertentangan?

London, Mei, UP

Selama konferensi Moskow diadakan tempo hari Stalin dengan Ernest Bevin telah mengadakan pemertijaraan sebentar tentang ruidian pendudukan Inggris Mesir dan pita soal Sudan, demikian menurut sumber pemerintah.

Dikatakan pula dalam pada itu Stalin menjatakan, Rusia selalu menghargai akan kepaulangan Inggris di Mesir dan Timur tengah yang dianggap tsb bertentangan dengan kepentingan2 Rusia. Antara

Kabinet Italia exit?

Rome, Mr. Reuters.

Kabinet Italia sedang mengadakan sidang penting yang mungkin dapat menentukan apakah pemerintah yang sekarang ini akan diteruskan atau tidak.

Menurut sumber yang dapat dipercaya menent2 dari partai komunis dan sosialis minta ke terangan sedelajnja kepada pemerintah Alcide de Gasperi tentang maksudnya mengenai

"Kami seluruh anggota Partai Rakjat Pasundan dengar ini menjatakan: ketetapan kami kepada tjaja kemerdekaan bangsa Indonesia yg terwujud dlm bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhubung dengan itu seliap anggota Partai Rakjat Pasundan adalah warga negara Republik Indonesia. Perihal Partai Rakjat Pasundan dgn ini kami bubarkan seluruhnya. Bertubung dgn ini maka "proklamasi berdirinja negara Republik Pasundan" yg ditarkan pada tg. 4 Mei 1947, ditarik kembali. Bandung tg. 6 Mei 1947 Atas nama Partai Rakjat Pasundan seluruhnja.

R. A. A. Soeria Kartalegawa". Demikian bunyi surat selebaran itu, yg kini di di bahan pembijaraan dan pertijaraan chalaak ramai di Djakarta.

Perantjisi benteng etachir kapitalis barat.

TERHADAP EKSPANSI KOMUNIS. Paris, Mei, U. Keluasan Amerika Serikat di

Belanda tidak dijudiri

Djombang, Mei, Ant.

Pertahanan kita dibatalah Barat dan Barat dala Mojokartominggu yg akhir ini senantias mendapat gangguan dari Belanda. Pasukan2 Belanda bdrkali-kali menjerang post kita yg terdapat dan menggunakan senapan mesin dan mortar. Korban2 terdapat diantara penduduk akan tetapi tidak membawa perubahan penting terhadap pertahanan kita.

Hoang-Ho.

Mengalirkan darah.

Nanking, Mei, AP

Berita2 pro-pemerintah mengatakan bahwa Komunis di Shan-Tengah sedang mengadakan serangan hebat untuk merebut seluruh jalan kereta-aji yang menuju ke Taiyuan.

Selalu itu 150.000 tentara Komunis mengadakan serangan hebat pada berbagai tempat sepanjang Kali Hoang Ho, dan berhasil merebut tempat2 penjelajaraan yang strategis. Antara

Pemogokan - Djepang dan kapal.

Singapur, Mei.

Buruh tem dan bis Singapur dalam rajat2ya memulutkan wajah bekerja lagi.

Sementara itu diberitaskan bahwa pada akhir bulan ini akan berlabuh dipelabuhan Singapur kapal perindustrian Amerika "Tosled" dalam perijanaannya ke Djepang, sedangkan 1000 orang buruh di Djepang berangkat ke Djepang dari Singapur.

